LAKIP TAHUN 2025

Pemerintah Kabupaten Simalungun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025



KABUPATEN SIMALUNGUN
2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan yang telah diperjanjikan oleh Bupati Simalungun Tahun 2025 dan tetap berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.

Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama, maka Misi Kabupaten Simalungun dan juga Jumlah Indikator dapat diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 (satu), dengan jumlah sasaran 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama
- Misi 2 (dua), dengan jumlah sasaran 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama
- Misi 3 (tiga), dengan jumlah sasaran 1 (satu) sasaran dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama
- Misi 4 (empat), dengan jumlah sasaran 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama

Berikut adalah rincian realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025:

Tabel
Capaian atas indikator kinerja utama yang tercantum pada Perubahan Perjanjina Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 1: Benahi							
1	Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	TonCO2Eq	173.083,31	84,10262588	0,0005%	Sangat Kurang
Misi 2: Awasi							
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,67	68,90	106%	Sangat Memuaskan
Misi 3: Dampingi							
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan	Tingkat Kemiskinan	%	7,57	6,91	109%	Sangat Memuaskan
4		Gini Rasio	Rasio	0,290	0,230	126%	Sangat Memuaskan
5		PDRB Perkapita	Juta Rp	58,3	60,17	103%	Sangat Memuaskan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
6	usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	4,74	91%	Sangat Memuaskan
7		Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,170	5,23	101%	Sangat Memuaskan
8		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12	4,48	114%	Sangat Memuaskan
Misi 4: Solusi							
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,35	76,48	100%	Sangat Memuaskan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintah yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Simalungun. Hal ini juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju terciptanya ***Good Government*** dan ***Clean Government***. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari Kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja yang merupakan sarana pelaporan kinerja untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta media pertanggungjawaban kinerja yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan, sasaran dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan, kiranya dapat dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Pamatang Raya, 14 April 2026

Bupati Simalungun,

Anton Achmad Saragih

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun 4
1.3.1.Geografis 4
1.3.1.1. Luas dan Batas Wilayah 4
1.3.1.2. Letak dan Kondisi Geografis 5
1.3.1.3. Morfologi dan Topografi 7
1.3.1.4. Hidrologi 9
1.3.1.5. Penggunaan Lahan 10
1.3.1.6. Kawasan Strategis 11
1.3.2.Demografi 12
1.3.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 12
1.3.2.2. Perekonomian 14
a. Produk Domestik Regional Bruto 14
b. Struktur Pereknomoian 15
1.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi 17
1.3.2.4. Ketenagakerjaan 17
1.4. Sistematika Penulisan 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA 23
2.1. Visi Pembangunan Tahun 2025-2029 23
2.2. Misi Pembangunan Tahun 2025-2029 23
2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 25
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54
3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 55
3.1.1. Klasifikasi Penilaian Capaian 58
3.1.2. Pengurukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2025 60
3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Kabupaten Simalungun Tahun 2025 60
3.2. Relisasi Anggaran 161

BAB IV PENUTUP 180
4.1. Kesimpulan 180
4.2. Rekomendasi 182

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan 5
Tabel 1.2 Luas wilayah Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Ketinggain..... 8
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin
dan Kecamatan di Kab. Simalungun Tahun 2025 12
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di
Kabupaten Simalungun, 2020, 2024, dan 2025 13
Tabel 1.5 Peran PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 15
Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2020-
2023-2024 17
Tabel 2.1 Penyandingan Misi Kepala Daerah, dengan Misi RPJPD
(Transfomasi).....25
Tabel 2.2 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator.....26
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama dan Definisi Operasional 30
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Pada RPJMD
2021-2026 50
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan
Pada RPJMD 2025-2029.....51
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Berdasarkan RPJMD
Tahun 2025 - 2029.....56
Tabel 3.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 58
Tabel 3.3 Interpretasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 59
Tabel 3.4 Capaian atas Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 60
Tabel 3.5 Realisasi Capaian Indikator Penurunan Emisi GRK Tahun 2025 ...61
Tabel 3.6 Kategori Sumber Emisi GRK dari Proses Industri dan
Dari Proses Industri dan Penggunaan Produk.....64
Tabel 3.7 Total Emisi GRK Berdasarkan Sekotr 65
Tabel 3.8 Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Simalungun Berdasarkan
Kategori Tahun 2020-2024 (Gg Co2eq) 65
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK
Kumulatif dengan beberapa tahun terakhir 68

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Akhir Renstra.....69
Tabel 3.11 Analisis Penyenan Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis Lingkungan.....69
Tabel 3.12 Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi ..70
Tabel 3.13 Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi 72
Tabel 3.14 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 73
Tabel 3.15 Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025.....75
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Dengan beberapa tahun terakhir.....85
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian Nasional / Provinsi.....86
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan Capaian Nasional/Provinsi.....87
Tabel 3.19 Efisiensi Penggunan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun Tahun 2025 91
Tabel 3.20 Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Pemberddayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan usaha dan Kegiatan Ekonomi Lokal 92
Tabel 3.21 Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan 92
Tabel 3.22 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Simalngun Tahun, 2017-2025 93
Tabel 3.23 Realisasi Kinerja Indikator Gini Rasio.....95
Tabel 3.24 Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan 95
Tabel 3.25 PDRB Kabupaten Simalungun Tahun 2025 96
Tabel 3.26 Distribusi Persentase Produk Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun, 2021-2025.....97
Tabel 3.27 Distribusi Produk Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Simalungun % 2021-2025.....98
Tabel 3.28 Realisasi Kinerja LPE Tahun 2025.....99
Tabel 3.29 LPE Kabupaten Simalungun Tahuun 2025.....99

Tabel 3.30 Industri Pengolahan Kabupaten Simalungun 109
Tabel 3.31 Daftar IKM yang Peltihan Pure Buah dan Olahan
Buah Lainnya..... 111
Tabel 3.32 Daftar Peserta Pelatihan Pengolahan Bisnis dan
Managemen Wirausaha Pure Buah..... 112
Tabel 3.33 Daftar Peserta Pelatihan Operator Rumah Kemasan 113
Tabel 3.34 Daftar Peserta Pelatihan Standarisasi Mutu dan Kemasan 114
Tabel 3.35 Daftar Realisasi Investasi PMA dan PMDN Laporan Kegiatan
Penanaman Modal Tahun 2025 Kabupaten Simalungun 116
Tabel 3.36 Realisasi Capaian Kinerja Indiaktor Kontribusi PDRB
Kab/Kota Sumatera Utara 120
Tabel 3.37 Kontribusi PDRB Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2025 120
Tabel 3.38 Realisai Capaian Kinerja Indiaktor TPT Tahun 2025 121
Tabel 3.39 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten
Simalungun Tahun 2025 122
Tabel 3.40 TPT Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara Tahuun 2025 122
Tabel 3.41 TPAK Menurut Kab/Kota di Sumatera Utara 2024-2025 123
Tabel 3.42 Rekapiturlasi dan Daftar Pamagangan Luar Negeri
Ke Jepang Program Kerjasama dengan Im Japan Tahun 2025..... 124
Tabel 3.43 Rekapitulasi Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja di Kabupaten Simalungun Tahun 2025..... 126
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengembangan usaha Kegiatan ekonomi local
Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir..... 126
Tabel 3.45 Perbandingan Realsiasi Kinerja Tahun 2025 dengan
Bebereapa tahun terkahir 127
Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan
Standar Provinsi Sumatera Utara..... 129
Tebel 3.47 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota
Di Sumatera Utara Tahun 2025 130
Tabel 3.48 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab/Kota di Sekitar Kab. Simalungun 132
Tabel 3.49 Realisasi Kinerja Indikator Kinerja IPM..... 135
Tabel 3.50 IPM Kabupaten Simalungun Tahun 2025 136
Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia
Dengan Beberapa Tahun Terakhir..... 157

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir Renstra 2-25-2029 158
Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan capaian Nasional dan Provinsi 158
Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Pertumbuhan IPM Nasional Provinsi dan Kab/Kota di Sekitar Kab. Simalungun 159
Tabel 3.55 Realisasi PAD Kab. Simalungun tahun 2025 161
Tabel 3.56 Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2025 164
Tabel 3.57 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan Kinerja merupakan kewajiban bagi setiap instansi yang menjadi suatu perwujudan kewajiban untuk mempertangungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Sejalan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi *kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas***.** Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati/ Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Terwujudnya suatu tata Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan Sistem Pertanggung Jawaban yang tepat,jelas,terukur, legitimate. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sejalan dengan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Simalungun, diwajibkan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Simalngun Tahun 2025 yang di maksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelengggaraan kegiatan yang di cerminkan dari Pencapian Kinerja, Visi, Misi. Realisasi Pecapaian Indikator Kinerja utama dan Sasaran dengan target yang telah di tetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 1);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 Nomor 2).

1.3. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun

1.3.1. Geografis

1.3.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Simlangun terdiri dari 32 Kecamatan, 386 Nagori (Desa) dan 27 Kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Hatonduhan (7,69%) sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi (0,89%). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Simalungun adalah;

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo;

e. Sebelah Tengah berbatasan dengan Kotamadya Pematang Siantar.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nagori	Kalurahan	Luas Wilayah	
				Km	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pematang Silimahuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Haranggaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,90	1,55
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85
7	Pematang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sipangan Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	Panei	16	1	77,96	1,78
14	Panombean Panei	11	0	73,74	1,69
15	Raya	12	5	261,56	5,98
16	Dolog Masagal	9	0	105,77	2,42
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92
18	Silou Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	Siantar	17	0	73,99	1,69
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja Bah Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pematang Bandar	8	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	11	0	107,33	2,45
29	Bandar	10	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	14	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	10	1	285,43	6,53
32	Ujung Padang	16	1	228,49	5,23
	SIMALUNGUN	**386**	**27**	**4 372,50**	**100,00**

Sumber : Dokuemn RTRW Kabupaten Simaulngun 2011-2031, Bapprida Kab. Simalungun

1.3.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Simalungun adalah merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Potensi Sumber Daya yang banyak. Kabupaten Simalungun secara keseluruhan memiliki

luas administrasi atau 5,99 dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-1400mdpl, 75% lahannya berada pada kemiringan 0-15%. Adapun letak astronomisnya antara 02°36'-03°18' Lintang Utara dan 98°32'-99°35' Bujur Timur dengan luas 372,5km².

Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten terluas ke-3 setelah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara serta berada di Kawasan Danau Toba-Parapat (BPS Provinsi Sumut, 2024). Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Simalungun menuju Ibu Kota kabupaten adalah 51,42 km, dimana jarak terjauh adalah Kecamatan Silou Kahean sejauh 127 km dan Kecamatan Ujung Padang sejauh 113 km

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Berdasarkan Jarak

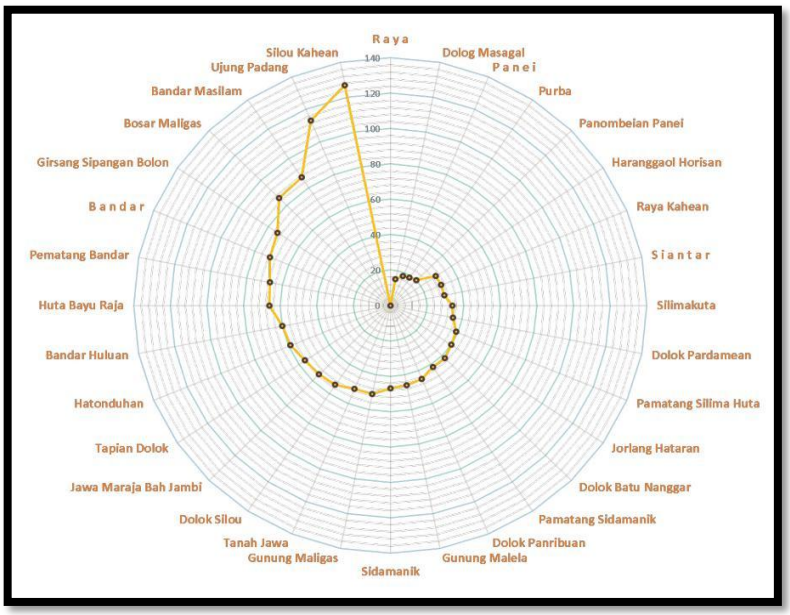

Gambar: Jarak Antara Kecmatan dengan Ibukota Kabupaten Simaungun
Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Gambar 1.2
Peta Kabupaten Simalungun

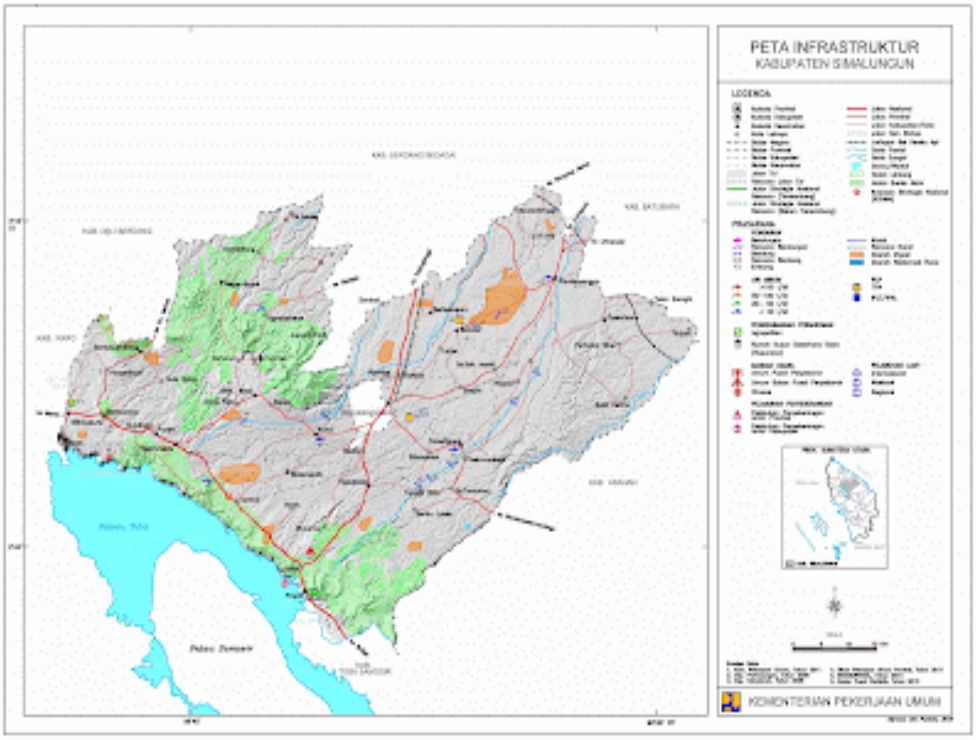

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1.3.1.3. Morfologi dan Topografi

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-1.400 m diatas permukaan laut (rata-rata 3.369m) dan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu:

a. Daerah dengan ketinggian 20m-389m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Siantar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Baru Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km atau 49,26% dari luas Kabupaten Simalungun.
b. Daerah dengan ketinggain 600-920 mdpl termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean,

Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan luas 1.276,07 km atau 29,09% dari luas Kabupaten Simalungun.

c. Daerah dengan ketinggian 1.100-1400 mdpl dalam kategori dataran tinggi uang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 atau 21,65 % dari luas Kabupaten Simalungun

Dengan Topografi, cuaca dan curah hujan yang mencukupi menjadikan Kabupaten Simalungun terkenal sebagai daerah penghasil (lumbung) beras dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk Sebahagian besar adalah dari usaha pertanian, tanaman pangan dan perkebunan baik dalam skala besar maupun perkebunan rakyat.

Luas wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Luas wilayah Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Ketinggain

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (ha)
1	≤ 100	83.738
2	101 – 500	161.230
3	501 – 1000	92.392
4	1001 – 1500	99.701
5	≥ 1501	1599

Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bapperida Kab. Simalungun

Dengan Posisi Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda. Penyebaran kemiringan lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari :

a. Kemiringan datar (0-2%)
b. Landai (2-15%)
c. Bergelombang/berbukit (15-40%)
d. Dan curam (> 40%)

Luas lahan/ lereng di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Desa1/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah di Kabupaten Simalungun,

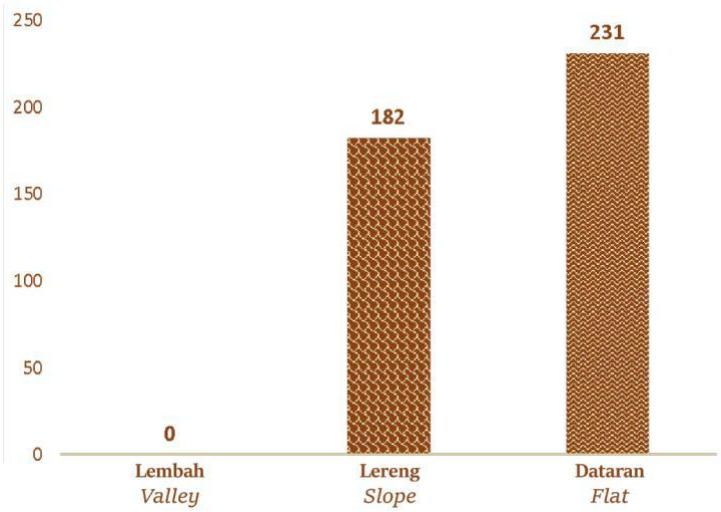

Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2025

1.3.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari atas air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolon dan DAS sebagi diantaranya:

a. DAS Silou
b. DAS Wampu
c. DAS Bedagai
d. DAS Asahan

e. DAS Padang
f. DAS Silou Tua
g. DAS Ular
h. DAS Bahapal
i. DAS Bah Bolon

Wilayah sungai lintas Kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal, dan Bah pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun yang menyebar hampir seluruh kecamatan di Kawasan dataran tinggi yang ada di Kabupaten Simalungun.

1.3.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Simalungun sangat bervariasi, yaitu terdiri dari atas penggunaan untuk pemukiman, persawahan, tegalan/kebun campuran, perkebunan besar, perkebunan rakyat, hutan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, dan beberapa jenis penggunaan lahan lainnya. Secara umum, penggunaan lahan secara keseluruhan di dominasi untuk sektor pertanian dan perkebunan.

Penggunaan lahan terluas di Kabupaten Simalungun sendiri terdiri dari sawah seluas 31.021 Ha (7,14%), lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang, perkebunan rakyat, padang pengembalaan/rumput, hutan negara, tambak, kolam empang dll) seluas 357.111 Ha (84,54%), bukan lahan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) seluas 27.518 Ha (8,3%).

Adanya perkembangan penduduk dan kegiatannya, kemajuan perekonomian masyarakat

dan pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nasional dan global mendorong terjadinya perubahan pemilihan lokasi pemukiman dan kegiatan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti industri, transportasi dan pertambangan cukup cepat dan mengubah pola pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan permanfaatan ruang tersebut bertambah luas namun bersifat lebih terkonsentrasi dan tidak tersebar.

1.3.1.6. Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalan lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis nasional dan Kawasan Strategis Provinsi wilayah kabupaten seperti:

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Agropolitas Dataran Tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Silimakuta, Kawasan Strategis Tebing Tinggi – Siantar untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Tapian Dolok, dan Kawasan

Stragetis Simalungun – Batubara – Asahan dan Sekitarnya (mencakup didalamnya KEK-Sei Mangkei). Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dilakukan melalui perwujudan Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya serta Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1.3.2.Demografi

1.3.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Simalungun bersumber dari hasil Proyeksi Penduduk Hasil SP2020 tahun 2020 - 2035 (Pertengahan Tahun/Juni) sebanyak 1.067.499 jiwa yang terdiri atas 537.650 jiwa penduduk laki-laki dan 529.849 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 244 orang per km persegi, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2025 sebesar 1,59 persen

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 24,22 persen, 15-64 tahun sebesar 67,79 persen dan usia 65 tahun ke atas sebesar 7,99 persen yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Simalungun, 2025

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio JK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silimakuta	8.578	8.608	17.186	99,65
Pamatang Silima Huta	6.542	6.584	13.126	99,36
Purba	14.441	14.231	28.672	101,48
Haranggaol Horisan	3.044	3.120	6.164	97,56
Dolok Pardamean	7.478	7.400	14.878	101,05
Sidamanik	13.870	14.522	28.392	95,51
Pamatang Sidamanik	9.604	9.625	19.229	99,78
Girsang Sipangan Bolon	8.239	8.464	16.703	97,34

Tanah Jawa	26.407	27.025	53.432	97,71
Hatonduhan	12.928	13.027	25.955	99,24
Dolok Panribuan	10.784	11.014	21.798	97,91
Jorlang Hataran	8.676	8.984	17.660	96,57
P a n e i	12.927	13.498	26.425	95,77
Panombeian Panei	11.755	12.080	23.835	97,31
R a y a	15.099	15.698	30.797	96,18
Dolog Masagal	6.627	6.674	13.301	99,30
Dolok Silou	8.746	8.846	17.592	98,87
Silou Kahean	9.688	9.736	19.424	99,51
Raya Kahean	9.901	10.017	19.918	98,84
Tapian Dolok	22.349	21.705	44.054	102,97
Dolok Batu Nanggar	22.393	22.084	44.477	101,40
S i a t a r	33.848	34.189	68.037	99,00
Gunung Malela	19.679	19.582	39.261	100,50
Gunung Maligas	17.627	17.013	34.640	103,61
Huta Bayu Raja	16.905	17.397	34.302	97,17
Jawa Maraja Bah Jambi	10.840	11.120	21.960	97,48
Pematang Bandar	18.446	18.540	36.986	99,49
Bandar Huluan	14.337	14.412	28.749	99,48
B a n d a r	38.799	38.670	77.469	100,33
Bandar Masilam	14.315	14.300	28.615	100,10
Bosar Maligas	20.271	20.002	40.273	101,34
Ujung Padang	21.212	21.098	42.310	100,54
Simalungun	**476.355**	**479.265**	**955.620**	**99,39**

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Tabel: 1.4
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di
Kabupaten Simalungun, 2020, 2024, dan 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		Persentase Penduduk		
	2020	2024	2025	2020-2024	2020-2025	2020	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Silimakuta	17.479	18.979	19.366	2,22	2,18	1,77	1,80	1,81
Pamatang Silima Huta	13.390	14.589	14.900	2,31	2,28	1,35	1,39	1,40
Purba	27.536	29.692	30.246	2,03	2,00	2,78	2,82	2,83
Haranggaol Horisan	7.041	7.927	8.162	3,21	3,16	0,71	0,75	0,76
Dolok Pardamean	15.136	15.939	16.140	1,39	1,36	1,53	1,52	1,51
Sidamanik	30.853	31.996	32.276	0,97	0,95	3,12	3,04	3,02
Pamatang Sidamanik	19.716	20.926	21.232	1,60	1,57	1,99	1,99	1,99
Girsang Sipangan Bolon	17.941	19.293	19.639	1,96	1,92	1,81	1,83	1,84
Tanah Jawa	54.900	57.670	58.362	1,32	1,30	5,54	5,48	5,47
Hatonduhan	26.632	28.703	29.235	2,02	1,98	2,69	2,73	2,74
Dolok Panribuan	22.018	23.488	23.862	1,74	1,71	2,22	2,23	2,24
Jorlang Hataran	19.154	20.585	20.952	1,94	1,91	1,93	1,96	1,96
P a n e i	28.326	31.105	31.829	2,53	2,49	2,86	2,96	2,98
Panombeian Panei	24.993	27.284	27.879	2,37	2,33	2,52	2,59	2,61
R a y a	30.150	32.092	32.585	1,68	1,65	3,04	3,05	3,05
Dolog Masagal	13.406	15.153	15.618	3,32	3,27	1,35	1,44	1,46
Dolok Silou	17.696	19.249	19.651	2,27	2,23	1,79	1,83	1,84

Silou Kahean	19.477	20.235	20.421	1,02	1,00	1,97	1,92	1,91
Raya Kahean	21.583	23.124	23 517	1,86	1,82	2,18	2,20	2,20
Tapian Dolok	45.032	47.383	47.971	1,37	1,34	4,55	4,50	4,49
Dolok Batu Nanggar	45.659	47.662	48.158	1,15	1,13	4,61	4,53	4,51
Siatar	73.536	76.989	77.847	1,23	1,21	7,43	7,32	7,29
Gunung Malela	41.189	44.403	45.227	2,02	1,99	4,16	4,22	4,24
Gunung Maligas	33.734	36.681	37.442	2,26	2,22	3,41	3,49	3,51
Huta Bayu Raja	35.426	37.661	38.227	1,64	1,61	3,58	3,58	3,58
Jawa Maraja Bah Jambi	22.892	23.796	24.019	1,04	1,02	2,31	2,26	2,25
Pematang Bandar	38.688	41.379	42.064	1,81	1,78	3,91	3,93	3,94
Bandar Huluan	29.484	30.629	30.911	1,02	1,00	2,98	2,91	2,90
Bandar	79.006	84.697	86.150	1,87	1,84	7,98	8,05	8,07
Bandar Masilam	30.015	32.095	32.625	1,80	1,77	3,03	3,05	3,06
Bosar Maligas	43.355	44.532	44.814	0,72	0,70	4,38	4,23	4,20
Ujung Padang	44.803	45.909	46.172	0,65	0,64	4,52	4,36	4,33
Simalungun	**990.246**	**1.051.845**	**1.067.499**	**1,62**	**1,59**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

1.3.2.2. Perekonomian

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2025 sebesar Rp 64,810 triliun. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kontributor utama dengan peranan mencapai Rp 37,298 triliun (57,55 %). Selanjutnya diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 9,679 triliun (14,93 %). Sementara itu, kategori-kategori lainnya memberikan total kontribusi sebesar 27,52 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Simalungun.

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Simalungun pada tahun 2025 sebesar Rp 34,617 triliun. Kategori Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,97 persen, diikuti oleh Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,37 persen kemudian Kategori Informasi

dan Komunikasi sebesar 5,84 dan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,97 persen. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tahun 2025 mengalami kontraksi tumbuh sebesar -0,27 persen.

b. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian daerah menggambarkan komposisi kontribusi berbagai sektor ekonomi dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur ini menunjukkan sektor-sektor yang menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi serta mencerminkan Tingkat perkembangan ekonomi daerah.

Secara umum, perekonomian daerah didukung oleh beberapa sektor utama seperti sektor perdagangan, industry pengolahan, pertanian, konstruksi, serta jasa-jasa lainnya. Perubahan struktur perekonomian dari waktu ke waktu menunjukan adanya pergeseran peran antar sektor ekonomi. Pergeseran ini dapat dipengaruhi oleh beberapa factor seperti perkembangan investasi, peningkatan produktivitas, kebijakan Pembangunan daerah, serta perubahan pola konsumsi Masyarakat. Dengan memahami struktur perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan Pembangunan yang lebih tepat sasaran, Khususnya dalam mendorong sektor-sektor potensial agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan beberapa lapangan usaha yang mendorong peningkatan PDRB:

Tabel. 1.5
Peran PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	21.859	24.915	28.406	33.328	37.298
2	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	94	99	107	112	118
3	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	4.932	5.294	5.480	5.873	6.514
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	28	30	31	31	31
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	35	37	38	41	43
6	Konstruksi/*Construction*	4.253	4.602	4.776	4.824	5.114
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	6.747	7.456	8.226	8.976	9.679
8	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	693	772	900	1.032	1.134
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	335	359	403	462	494
10	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	237	256	278	299	318
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	471	513	533	564	583
12	Real Estat/*Real Estate Activities*	381	398	409	437	460
13	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	38	42	46	49	53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	1.824	1.830	1.883	2.085	2.099
15	Jasa Pendidikan/*Education*	436	457	480	517	570
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	166	173	192	214	237
17	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	47	52	56	61	63
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional*	**42.557**	**47.286**	**52.239**	**58.906**	**64.810**

Sumber : BPS Kabupaten Simalungun, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Simalungun Regency, various census, survey, and other sources*

1.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun pada Tahun 2025 mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jika pada tahun 2024 pertumbuhannya tercapat pada angka 4,89% maka pada tahun 2024 ekonomi turun 4,73%.

Tabel 1.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun
Tahun 2022-2023-2024-2025

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi6/*Economic Growth 6*	%	4,68	5,07	4,89	4,73

Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka, 2025

1.3.2.4. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional di Simalungun pada tahun 2025 sebesar 811.291 jiwa dengan tingkat partisipasinya sebesar 74,52%. Pada umumnya penduduk Simalungun bekerja sebagai Buruh/Karyawan/pegawai/employee sebanyak 195.126 jiwa, kemudian Berusaha sendiri yakni sebanyak 105.394 jiwa, dan selanjutnya pekerja bebas sebanyak 95.237 jiwa. Sedangkan menurut pendidikan, angkatan kerja di Simalungun 96,47% berpendidikan terbanyak sampai dengan tingkat SMP/MTs, sedangkan berpendidikan SMA/SMK 94,71% dan 92,86% berpendidikan Diploma sampai dengan Sarjana **.** Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun tahun 2025 sebanyak 360 orang, dengan rincian 212

laki-laki dan 148 perempuan. Jumlah ini meningkat 38 jiwa dibanding tahun 2024

Jumlah PNS Tahun 2024 sebesar 6.898 terdiri dari 2.016 laki-laki dan 4.882 perempuan, dimana 86,39 Persen merupakan lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan golongan maka PNS di Pemerintahan Kabupaten Simalungun sebesar 59,65 persen menduduki golongan III dan 22,21 persen menduduki golongan IV sementara berdasarkan tempat bekerja 1.477 orang atau 21,41 persen di Dinas Kesehatan selanjutnya 16 orang di Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak atau sekitar 0,23 persen. Menurut kecamatan, maka jumlah PNS terbanyak berada di lingkungan kantor Kecamatan Pematang Bandar sebanyak 40 orang, sedangkan jumlah PNS paling sedikit di Kecamatan Dolok Pardamean berjumlah 7 orang.

Kelembagaan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun terdiri dari Sekretariat Daerah 3 (Tiga) Asissten dan 12 (duabelas) bagian, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, Dinas 21 (duapuluh satu) Perangkat Daerah, Badan 5 (lima) Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja 1 (satu) Perangkat Daerah, 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, dan 3 (tiga) Rumah Sakit. Rincian Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Daerah

1. Asisten Terdiri dari :
   a. Asisten Pemerintahan dan Kesra
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   c. Asisten Administrasi Umum

2. Staf Ahli Terdiri dari:
    a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra
    b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
    c. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum
3. Kepala Bagian Terdiri dari
    a. Bagian Tata Pemerintahan
    b. Bagian Kerjasama
    c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
    d. Bagian Hukum
    e. Bagian Pembangunan
    f. Bagian Perekonomian
    g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
    h. Bagian Sumber Daya Alam
    i. Bagian Organisasi
    j. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
    k. Bagian Umum
    l. Bagian Perencanaan dan Keuangan

B. Sekretariat DPRD

C. Inspektorat Daerah

D. Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja

a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Perhubungan
c. Dinas Perpustakaan dan Arsip
d. Dinas Lingkungan Hidup
e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekomoni Kreatif
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori
i. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
k. Dinas Sosial
l. Dinas Komunikasi dan Informatika
m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdunag Anak
n. Dinas Pertanian
o. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
p. Dinas Kesehatan
q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
r. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
s. Dinas Ketenagakerjaan
t. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan
u. Dinas Pemuda dan Olahraga
v. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

E. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

a. Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim
b. Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan
c. Rumah Sakit Umum Daerah Parapat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatas Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issue)* yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikshtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan tentang :

a. Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yaitu :

- Membandingkan antara target dan hasil realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

2.1. Visi Pembangunan Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencaan lima tahunan yang memuat visi dan misi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sampai 5 (lima) tahun terakhir dengan memaksimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki

Visi Pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 adalah : **"Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju"**

2.2. Misi Pembangunan Tahun 2025-2029

Kabupaten Simalungun telah menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul
2. Mewujudkan transformasi ekonomi melalui kegiatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan hilirisasi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
4. Mewujudkan ketenteraman serta ketertiban umum dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan.
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah.
7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan

Selanjutnya Misi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Benahi Membenahi pelayanan dan fasilitas publik di Kabupaten Simalungun. Pelayanan wajib pada masyarakat harus dapat direncanakan dan terdigitalisasi. Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan yang bisa diselesaikan oleh pemerintah secara digital mengadopsi layanan perbankan yang sudah bisa di lakukan secara digital.
2. Awasi Melaksanakan pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Pengawasan ini menjadi penting sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam masa waktu yang diharapkan. Pengawasan juga dilakukan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat dengan menghadirkan ASN yang mengutamakan pelayanan masyarakat.
3. Dampingi Melakukan pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjamin pencapaian kesejahteraan rakyat. Menjadikan aparatur pemerintah sebagai sahabat bagi masyarakat.
4. Solusi Pemerintah yang akan dibangun untuk Simalungun kedepan adalah pemerintahan yang mampu menjadi solusi terhadap permasalahan ditengah masyarakat. Masyarakat bukanlah pihak yang dapat dipersalahkan terhadap penurunan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Masyarakat haruslah menjadi penerima manfaat utama terhadap alokasi anggaran yang ada di Kabupaten Simalungun
5. Sinergi Pemerintah Kabupaten Simalungun kedepan haruslah menjadi pemerintahan yang bersinergi dengan pemerintahan pusat dan daerah. Sinergitas sangat penting untuk menjamin

meningkatnya kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia emas 2045

Tabel 2.1
Penyandingan Misi Kepala Daerah dengan Misi RPJPD (Transformasi)

Misi Kepala Daerah Simalungun	Penyandingan dengan Misi RPJPD (Tranformasi)
Misi 1: Benahi	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas
	Misi 7 : Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Misi 2: Awasi	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul
	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas
Misi 3: Dampingi	Misi 1 : Mewujudkan transformasi sosial untuk SDM unggul
	Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi melalui kegiatan ekonomi hijau, transformasi digital, dan hilirisasi
	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah
Misi 4: Solusi	Misi 3 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas
	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan
Misi 5: Sinergi	Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata berbasis karakteristik wilayah
	Misi 8 : Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan

2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Strategi serta arah kebijakan RPJMD 2025-2029 terhadap Visi dan Misi Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam bentuk matriks berikut :

Tabel 2.2

Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Visi: Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju			
Misi 1: BENAHI	T1. Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan		Indeks Inovasi Daerah
			Indeks kualitas lingkungan hidup
		S1.1. Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE
		S1.2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik
		S 1.3. Terciptanya program- program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)
		S1.4 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur
	T2. Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Misi 2: AWASI		S2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP
	T3. Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah		Opini BPK
		S3.1. Terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		S3.2. Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.	
			Indeks Profesionalitas ASN
		S3.3. Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Indeks Integritas Nasional / Survei Penilaian Integritas (SPI)
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1
	T4. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		Tingkat Kemiskinan
			Gini Rasio
		S4.1. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi Local	PDRB Perkapita
			Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Misi 3: DAMPINGI	T5. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi
			Kontribusi PDRB Kab/Kota
		S5.1. Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat	Indeks Akses Keuangan Daerah
			Jumlah Industri Kecil Menengah
			PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
			Indeks Pembangunan Kebudayaan
		S5.2 Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 4: SOLUSI	T6. Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran.		Indeks Pembangunan Manusia
		S6.1. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
			Harapan Lama Sekolah (tahun)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
		S6.2. Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Misi 5: SINERGI	T7. Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Simalungun.		Indek Daya Saing Daerah
		S7.1. Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 2.3 Indikaor Kinerja Utama dan Definisi Operasional

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan		Indeks Inovasi Daerah	Instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan, mengelola dan menerapkan inovasi	Penghitungan Indeks Inovasi Daerah $Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} x\ 100$ $SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke-i$ $SID = \frac{\sum_{j=1}^{n}(\sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ ke-i)Inovasi\ Ke\ j}{MAX(10,n)} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$ $Skor\ Jumlah\ Inovasi = \begin{cases} MIN(n,200) \times 0.38, & urusan\ wajib\ yandas\ yang\ dikirimkan \geq 3 \\ 0, & urusan\ wajib\ yandas\ yang\ dikirimkan < 3 \end{cases}$ Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. **Kategori** / **Rentang Skor** **Sangat Inovatif** 65,01 - 100,00 **Inovatif** 40,01 – 65,00 **Kurang Inovatif** 0,01 – 40,00 **Tidak Dapat Dinilai** 0	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas lingkungan hidup suatu wilayah dalam periode tertentu	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sesuai surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:S.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik/SPBE	nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan	Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Memuaskan : 4,2 - 5,0; Sangat Baik : 3,5 - < 4,2; Baik : 2,6 - < 3,5; Cukup : 1,8 - < 2,6; Kurang : <1,8	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik	indeks pelayanan publik	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.	1. Menentukan nilai untuk setiap indikator *Nilai per indikator:* $(\frac{nilai\ FO1 + Nilai\ FO2 + nilai\ FO3}{3})$ *x bobot per indikator* 2. Menentukan nilai setiap aspek *Nilai per aspek:* $\sum$ *nilai per indikator* 3. Menentukan indeks *Nilai indeks:* $\sum (nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$	Dinas Kesehatan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; Dinas Sosial; Dinas Pendidikan

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Definisi Kinerja Operasional</th><th>Formulasi Penghitungan</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td></td><td>Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan</td><td>Penurunan emisi GRK Kumulatif</td><td>perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.</td><td>$\%PEK = \sum^{i}_{i = \text{base year}} PE_t \,/\, \sum^{i}_{i = \text{base year}} EB_t$

%PEK = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif
$\sum^{i}_{i = \text{base year}} PE_t$ = akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t
$\sum^{i}_{i = \text{base year}} EB_t$ = akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t
t = titik tahun perhitungan
i = base year tahun 2010</td><td>Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian</td></tr>
<tr><td></td><td>Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah</td><td>Indeks infrastruktur</td><td>instrumen untuk mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur di suatu wilayah</td><td><table><tr><th>Bobot</th><th>Komponen Penilaian</th></tr><tr><td>30%</td><td>Tingkat Kemantapan Jalan</td></tr><tr><td>25%</td><td>Indeks Kinerja Sistem Irigasi</td></tr><tr><td>15%</td><td>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>15%</td><td>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic</td></tr><tr><td>15%</td><td>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten</td></tr></table></td><td>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</td></tr>
<tr><td>Terwujudnya pengawasan yang efektif terhadap</td><td></td><td>Indeks reformasi birokrasi</td><td>Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang berpedoman pada Peraturan</td><td>Predikat indeks reformasi birokrasi ditetapkan melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB</td><td>Sekretariat Daerah</td></tr>
</table>

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
pembangunan			Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks SAKIP	Nilai Indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Simalungun yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB dengan Komponen (1) Perencanaan Kinerja;(2) Pengukuran Kinerja;(3) Pelaporan Kinerja;(4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Sekretariat Daerah
Peningkatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah		opini BPK	Opini BPK adalah opini/kesimpulan yang diambil BPK setelah melakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan	Nilai Hasil Pemeriksaan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK dan menghasilkan opini	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Definisi Kinerja Operasional</th><th>Formulasi Penghitungan</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif</td>
<td>indeks pengelolaan keuangan daerah</td>
<td>instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.</td>
<td>
<table>
<tr><th>DIMENSI PENGUKURAN IPKD</th><th>BOBOT</th></tr>
<tr><td>Opini BPK Atas LKPD</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Kondisi Keuangan Daerah</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Penyerapan Anggaran Belanja Daerah</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</td><td>15</td></tr>
<tr><th>SKALA</th><th>KATEGORI</th></tr>
<tr><td>80-100</td><td>BAIK</td></tr>
<tr><td>51-79</td><td>CUKUP BAIK</td></tr>
<tr><td><50</td><td>KURANG BAIK</td></tr>
</table>
</td>
<td>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat</td>
<td>Indeks Profesionalitas ASN</td>
<td>Instrumen statistik kuantitatif yang memberikan gambaran kualitas ASN secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada kinerja operasional</td>
<td>Nilai Indeks Profesionalitas ASN dihitung langsung oleh BKN melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin</td>
<td>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</td>
</tr>
</table>

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
			organisasi pemerintahan		
	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP diukur melalui penilaian terhadap 5 unsur SPIP(lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan),yang menunjukan Tingkat konsistensi,efektivitas dan keberllanjutan penerapannya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan, pengamanan asset dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Maturitas SPIP = Jumlah skor unsur SPIP 5	Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
		kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemrintah (APIP)	Kapabilitas APIP diukur melalui penilaian terhadap 6 (enam) elemen Kapabilitas, yaitu peran dan layanan,pengelolaan SDM, Praktik Profesional,akuntabilitas dan manajemen kinerja, hubungan organisasidan budaya, serta struktur tata kelolayang menunjukan Tingkat kematangan proses, kualitas hasil pengawasan dan kontribusi APIP dalam Peningkatan tata Kelola, manjemen resiko dan pengendalian intern organisasi.	Kapabilitas APIP ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh elemen dan key process area pada setiap level kapabilitas IA-CM. Level Kapabilitas APIP ditetapkan pada level tertinggidimana seluruh elemen kapanbilitas telah terpenuhi secara memadai berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.	Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
		tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	Tindak lanjut rekomendasi BPK-RI diukur melalui persentase dan status penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh entitas sesuai rekomendasi, dalam proses tindak lanjut atau belum ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam system pemantauan tindak lanjut BPK RI.	Tindak lanjut Rekomendasi BPK RI diukur menggunakan persentase rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, serta dianalisis berdasarkan status penyelesaian nilai kerugian yang dipulihkan, ketepatan waktu penyelesaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.	Inspektorat Daerah
Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		Tingkat kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata	$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z-y_i}{z}\right]^\alpha$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\ldots,q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Sekretariat Daerah; Dinas Sosial (BPS)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
			pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)		
		Gini Rasio	salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis	Rasio Gini = $1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi	Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BPS)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode	Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BPS)
		Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Proporsi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah persentase bagian PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan $= \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Pertanian, Kehutanan\ dan\ Perikanan}{Nilai\ PDRB\ kabupaten}$ x 100%	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (BPS)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya pendpatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		Laju pertumbuhan ekonomi	indikator yang menggambarkan persentase peningkatan nilai PDRB suatu daerah dalam periode tertentu	$r_{(t-1,t)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: r = Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase PDBt = Produk domestik bruto pada tahun berjalan. PDBt-1 = Produk domestik bruto tahun sebelumnya.	Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BPS)
		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	Kontribusi PDRB Kab/kota adalah share PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi	Kontribusi PDRB Kab/Kota $= \frac{PDRB\ Kab/Kota}{PDRB\ Provinsi} \times 100\%$	Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Definisi Kinerja Operasional</th><th>Formulasi Penghitungan</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Tersedianya akses yang lebih baik untuk pembiayaan dan modal usaha bagi masyarakat</td><td>Indeks akses keuangan daerah</td><td>instrumen yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat di suatu daerah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal</td><td>$$IKAD_q = \left(\sum_{i=1}^{14} a_i Z_{im}\right) \times 10$$
<table>
<tr><th>No</th><th>Dimensi</th><th>Kategori</th><th>Label</th><th>Indikator</th><th>Bobot</th><th>Sumber data</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="9">Penggunaan</td><td rowspan="3">Kepemilikan akun</td><td>REKS</td><td>Jumlah rekening pihak ketiga dibandingkan jumlah penduduk dewasa</td><td>0.1</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>2</td><td>TABUNGAN</td><td>Jumlah pemilik tabungan dibandingkan jumlah penduduk dewasa</td><td>0.15</td><td>Susenas</td></tr>
<tr><td>3</td><td>EWALLET</td><td>Jumlah rekening e wallet dibandingkan jumlah penduduk dewasa</td><td>0.1</td><td>BI</td></tr>
<tr><td>4</td><td rowspan="3">Pinjaman</td><td>REKPINJAMAN_UMKM</td><td>Jumlah rekening pinjaman ke UMKM dibandingkan total rekening pinjaman</td><td>0.13</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>5</td><td>REKPINJAMAN_IND</td><td>Jumlah rekening pinjaman individu dibandingkan jumlah penduduk dewasa</td><td>0.05</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>6</td><td>UMKM_PEREMPUAN</td><td>Jumlah rekening pinjaman UMKM perempuan dibandingkan rekening pinjaman UMKM total</td><td>0.07</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>7</td><td rowspan="2">Asuransi</td><td>POLIS</td><td>Jumlah polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk dewasa</td><td>0.07</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>8</td><td>BPJS_PBI</td><td>Jumlah pemilik BPJS PBI atau Jamkesda penduduk berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah</td><td>0.012</td><td>Susenas</td></tr>
<tr><td>9</td><td>BPJS_MANDIRI</td><td>Jumlah pemilik BPJS Mandiri/ Asuransi Swasta/ Jamkes Perusahaan penduduk non berpenghasilan rendah dibandingkan jumlah penduduk non berpenghasilan rendah</td><td>0.018</td><td>Susenas</td></tr>
<tr><td>10</td><td rowspan="3">Ketersediaan</td><td colspan="2">ATM</td><td>Ketersediaan ATM per 100.000 penduduk dewasa</td><td>0.05</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">AGEN</td><td>Ketersediaan Agen Laku Pandai per 100.000 penduduk dewasa</td><td>0.08</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">QRIS</td><td>Ketersediaan merchant QRIS per 100.000 penduduk dewasa</td><td>0.07</td><td>BI</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Kedalaman</td><td colspan="2">DPK</td><td>Rasio dana pihak ketiga terhadap PDRB</td><td>0.05</td><td>OJK</td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td colspan="2">PINJAMAN_UMKM</td><td>Rasio pinjaman UMKM terhadap total pinjaman</td><td>0.05</td><td>OJK</td></tr>
</table></td><td>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian</td></tr>
<tr><td>Jumlah Industri kecil menengah</td><td>Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan</td><td>$$Proporsi\ IKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri}$$</td><td>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</td></tr>
</table>

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
			jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama		
		PDRB penyediaan akomodasi dan makan/minum	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata	$Rasio\ PDRB\ \text{Penyediaan Akmamin} = \frac{Nilai\ Tambah\ Penyediaan\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Provinsi} \times 100\%$	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
		indeks pembangunan kebudayaan	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender	$IPK = \sum_{j=1}^{7}(W_j \times indeks\ D_j)$ Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $Indeks\ D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ji}}{n_j}\right) \times 100$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ji} = Nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j	Dinas Kebudayaan, Pariwissata, dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pendidikan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
	Menghasilkan sumber dasya manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$TPT = \frac{PP}{PAK} X\ 100\%$ TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka PP : Jumlah Pengangguran PAK : Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Definisi Kinerja Operasional</th><th>Formulasi Penghitungan</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr>
<td>Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran</td>
<td></td>
<td>Indeks Pembangunan Manusia</td>
<td>Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah</td>
<td>IPM = $^1/_3$ [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$]
Dimana:
$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup
$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$(indeks melek huruf) + $^1/_3$(indeks rata-rata lama sekolah)
$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak
Indeks $X_{(i)}$= $X_{(i)}$ - $X_{(i)min}$ / [$X_{(i)maks}$ - $X_{(i)min}$]
Dimana:
$X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)
$X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$
$X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
<table>
<tr><th>Indikator Komponen IPM (=X(I))</th><th>Nilai maksimum</th><th>Nilai Minimum</th><th>Catatan</th></tr>
<tr><td>Angka Harapan Hidup</td><td>85</td><td>25</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
<tr><td>Angka Melek Huruf</td><td>100</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
<tr><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>15</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr>
<tr><td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td><td>732.720 a)</td><td>300.000 b)</td><td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td></tr>
</table>
</td>
<td>Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun</td>
<td>Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15tahun</td>
<td>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua</td>
<td>$Rata - rata\ Lama\ Sekolah\ 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$
Keterangan:
P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas
x_i = Lama sekolah penduduk ke- i</td>
<td>Dinas Pendidikan</td>
</tr>
</table>

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
			jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.		
		Harapan lama sekolah	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Kinerja Operasional	Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
	Meningkatnya Kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	Dinas Kesehatan
Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten yang mendukung tercapainya kesejahteraan		Indeks Daya Saing Daerah	instrumen pengukuran daya saing pada tingkat Kabupaten Simalungun yang merefleksikan tingkat produktifitas daerah	Rumus min-max untuk standardisasi data IDSD $Skor_{i,d} = \left(\frac{N_{i,d} - Nmin_i}{Nmax_i - Nmin_i}\right) \times 5$, dimana: $Skor_{i,d}$ adalah skor indikator ke-i dari daerah ke-d; $N_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d; $Nmin_i$ adalah nilai data terendah untuk indikator ke-i; dan $Nmax_i$ adalah nilai tertinggi untuk indikator ke-i. Nilai min dan max tiap indikator ditetapkan berdasarkan pada: (1). kebijakan nasional (RPJMN, Peraturan Menteri); (2). standar global (GCI, UNDP, GERD UNESCO, dll); atau (3). riwayat distribusi data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

<table>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Definisi Kinerja Operasional</th><th>Formulasi Penghitungan</th><th>Penanggung Jawab</th></tr>
<tr><td>masyarakat Simalungun</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</td><td>Indeks perencanaan Pembangunan daerah</td><td>instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara sistematis, konsisten, terintegrasi, dan berbasis data</td><td>Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah dihitung dengan mengukur beberapa komponen pada dokumen perencanaan yang dinilai sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Sub-Komponen</th><th>Dokumen yang Dinilai</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">SINERGI</td><td>Keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN</td><td>RPJMD</td></tr>
<tr><td>Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP</td><td rowspan="5">RKPD</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">KUALITAS PERENCANAAN</td><td>Kesesuaian anggaran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah</td></tr>
<tr><td>Kesesuaian prioritas daerah dengan isu</td></tr>
<tr><td>Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah</td></tr>
<tr><td>Kesesuaian program/kegiatan/proyek untuk mencapai target dan sasaran</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KETERHUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN PERENCANAAN KINERJA</td><td>Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait</td><td>RKPD/RENSTRA OPD</td></tr>
</table>
Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daeah dilakukan dalam rentang nilai 1-100 dengan predikat sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Rentang Nilai</th><th>Predikat</th></tr>
<tr><td>91-100</td><td>Sangat Baik</td></tr>
<tr><td>81-90</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>71-80</td><td>Cukup Baik</td></tr>
<tr><td>61-70</td><td>Kurang</td></tr>
<tr><td><60</td><td>Sangat Kurang</td></tr>
</table></td><td>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah</td></tr>
</table>

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan Recana Kerja Tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja oleh seluruh OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun selama Tahun Anggaran 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan pada RPJMD 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.34
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.80
		LPE Kategori Industri Pengolahan	3.5
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.88
3.	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5.4
4.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7
		Indeks Gini	0.265
		Pendapatan Perkapita	56.01
5.	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.1
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.64
		Indeks Kesehatan	80.44
7.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	70.87
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.1
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	62.5
9.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Refromasi Birokrasi	64.17 (B)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	64.00 (B)
		Opini BPK	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72.5
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	68.5
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	30.05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
11.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kualitas Layanan Infrastuktur	22.87
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	72.00

Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditandatangani pada awal tahun 2025 dan telah dirubah dan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Simalungun Periode Tahun 2025-2029.

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Yang telah disesuaikan dengan 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		Tingkat Kemiskinan	%	7,57
2			Gini Rasio	Rasio	0,29
3		Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	173.083,31
4	Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,35
5		Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		kebutuhan dunia kerja			
6		Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	Juta Rp	58,3
7	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37
8			Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,17
9	Terwujudnya Pengawasan yang efektif terhadap pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,67

Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Kabupaten Simalungun yang telah disesuaikan dengan RPJMD Periode 2025-2029 telah di tandatangani oleh Bupati Simalungun dengan menggunakan Tandatangan Elektronik :

https://drive.google.com/file/d/131mpN8xLU7P_6piGFeK-JYpPffmVsL75/view?usp=sharing

(*link googeldrive*)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu media untuk mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi. Sebagai salah satu bentuk transparansi, pengukuran kinerja dilakukan dengan realisasi masing-masing kinerja unit organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja

Secara umum tujuan perjanjian kinerja Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kabupaten Simalungun.
5. Sebagai dasar dalam pengukuran sasaran kinerja, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
6. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar.

Untuk pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan skala ordinal dengan 5 (lima) kategori, yaitu : Sangat Baik; Baik; Cukup; Kurang; dan, Sangat Kurang, dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja adalah tingkat hasil yang spesifik dan terencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu eksplisit dengan tingkat sumber daya tertentu. Tanpa ada target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran capaian target kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja dengan indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD 2025-2029.

Berikut adalah tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bupati Simalungun , berhasil tidaknya pencapaian Bupati Simalungun untuk Tahun 2025 dapat diukur dengan tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut:

Tabel 3.1
Tabel Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan RJPMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	S1.1. Meningkatnya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terdigitalisasi	Indeks Inovasi Daerah	52,55	53,95	56,36	58,76	61,17	62,37	
2		Indeks kualitas lingkungan hidup	74,46	74,64	74,81	74,98	75,15	75,42	
3		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE	2,72	2,842	2,964	3,086	3,208	3,268	
4	S1.2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	
5	S 1.3. Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	173.083,31	196.427,81	224.109,15	256.395,70	288.934,62	325.768,62	
6	S1.4 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur	0,532	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	
7	S2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,67	66,5	68,5	70,8	73,2	75,5	
8		Indeks SAKIP	54	57	60	62	64	66	
9		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
10	S3.1. Terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,5	74	75,5	77	78,5	80	
11	S3.2. Terwujudnya kinerja ASN yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.	Indeks Profesionalitas ASN	55,79	56	56,42	56,7	57,05	57,4	
12	S3.3. Meningkatnya Akuntabilitas dan tata Kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Indeks Integritas Nasional / Survei Penilaian Integritas (SPI)	73	74,20	76,50	77,50	78,50	80	
13		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
14		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
15		Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	80%	81%	82%	83%	84%	85%	
16		Tingkat Kemiskinan	7,57	7,34	6,88	6,41	5,95	5,72	
17		Gini Rasio	0,290	0,289	0,286	0,282	0,279	0,277	

No	Sasaran	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	S4.1. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	58,3	78,09	101,88	125,67	149,46	161,36	
19		Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	4,88	5	5,15	5,3	5,45	5,6	
20		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,37	5,31	5,37	5,42	5,47	5,50	
21		Kontribusi PDRB Kab/Kota	5,170	5,172	5,173	5,174	5,175	5,176	
22		Indeks Akses Keuangan Daerah	3,82	3,84	3,87	3,89	3,92	3,93	
23		Jumlah Industri Kecil Menengah	9.054	9.056	9.058	9.060	9.062	9.064	
24		PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,95	1,02	1,08	1,15	1,18	
25		Indeks Pembangunan Kebudayaan	30,56	41,67	52,78	63,89	75,00	86,11	
26	S5.2 Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,12	5,09	4,98	4,88	4,77	4,72	
27		Indeks Pembangunan Manusia	76,35	76,99	77,63	78,27	78,91	79,22	
28	S6.1. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Simalungun.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,2	10,01	10,23	10,44	10,65	10,76	
29		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,12	13,22	13,31	13,41	13,51	13,56	
30	S6.2. Meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Simalungun	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,41	74,47	74,8	75,13	75,47	75,63	
31		Indek Daya Saing Daerah	3,59	3,66	3,73	3,8	3,88	3,91	
32	S7.1. Terselenggaranya koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	63,28	63,35	64,785	65,17	65,45	65,8	

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Utama Bupati Simalungun yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2025 - 2029. Adapaun Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut :

TABEL 3.2
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		Tingkat Kemiskinan	%	7,57
2			Gini Rasio	Rasio	0,290
3		Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	TonCO2Eq	173.083,31
4	Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,35
5		Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12
6		Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	Juta Rp	58,3
7	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37
8			Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,170
9	Terwujudnya Pengawasan yang efektif terhadap pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,67

3.1.1.Klasifikasi Penilaian Capaian

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan.

Tabel 3.3
Interpretasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	**AA**	**>90-100**	**Sangat Memuaskan**
			Telah terwujud Good Governnance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	**A**	**>80-90**	**Memuaskan**
			Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
3.	**BB**	**>70-80**	**Sangat Baik**
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	**B**	**>60-70**	**Baik**
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	**CC**	**>50-60**	**Cukup (Memadai)**
			Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	**C**	**>30-50**	**Kurang**
			Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	**D**	**0-30**	**Sangat Kurang**
			Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

3.1.2.Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.4
Capaian atas Indikator Kinerja Utama
Yang tercantum pada Perubahan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 1: Benahi							
1	Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	TonCO2Eq	173.083,31	84,10262588	0,0005%	Sangat Kurang
Misi 2: Awasi							
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,67	68,90	106%	Sangat Memuaskan
Misi 3: Dampingi							
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Tingkat Kemiskinan	%	7,57	6,91	109%	Sangat Memuaskan
4		Gini Rasio	Rasio	0,290	0,230	126%	Sangat Memuaskan
5		PDRB Perkapita	Juta Rp	58,3	60,17	103%	Sangat Memuaskan
6		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	4,74	91%	Sangat Memuaskan
7		Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,170	5,23	101%	Sangat Memuaskan
8		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12	4,48	114%	Sangat Memuaskan
Misi 4: Solusi							
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,35	76,48	100%	Sangat Memuaskan

3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui selisih atau celah kinerja baik positif atau negatif (*Performance gap*). Selanjutnya atas dasar selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapat strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*Performance improvement*).

1. MISI I : Benahi

Sasaran : Terciptanya Program-program Pembangunan yang berbasis Lingkungan

Indikator : Penurunan Emisi GRK

Tabel 3.5
Realisasi Capaian
Indikator Penurunan Emisi GRK Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 1: Benahi							
1	Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	TonCO2Eq	173.083,31	84,10262588	0,0005%	Sangat Kurang

Analisis Capaian Kinerja :

1. **Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca**

Penghitungan Realisasi IRGK pada tahun 2025 didasarkan pada hasil yang diperoleh dengan melengkapi data dan nilai yang ada di aplikasi **Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia** (AKSARA), tahun 2025 realisasi IRGK Kabupaten Simalungu adalah sebesar 84,10262 TonCO2Eq dengan capaian kinerja 0,0005%.

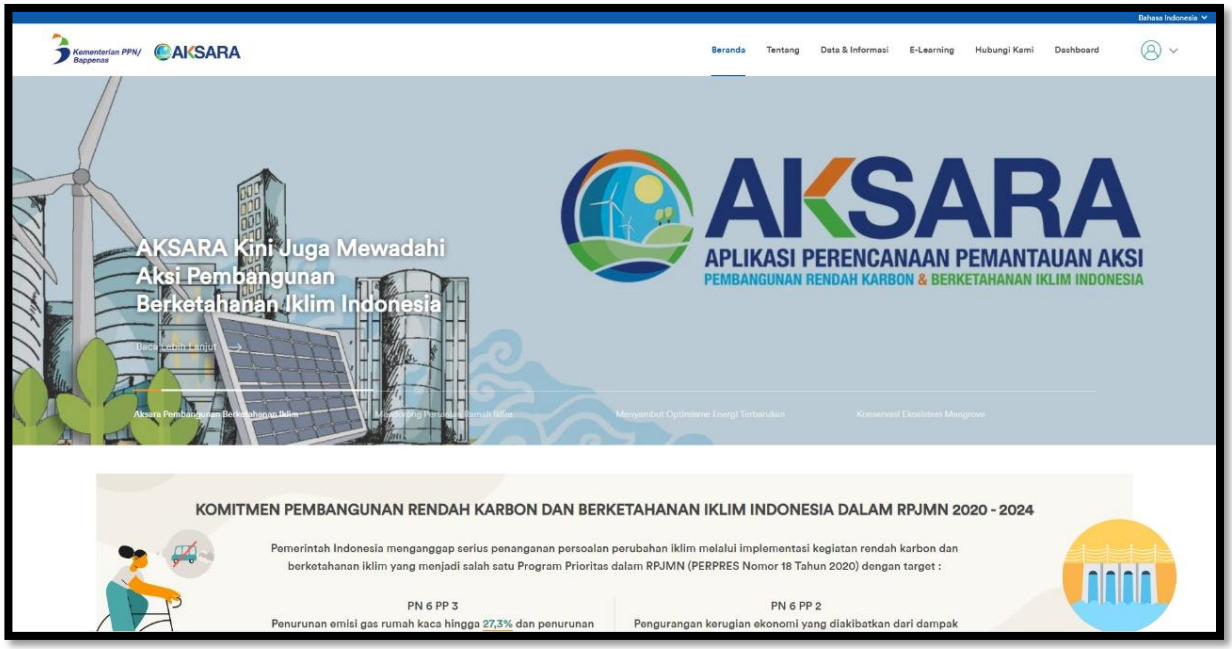

Sumber: Aplikasi AKSARA, 2026

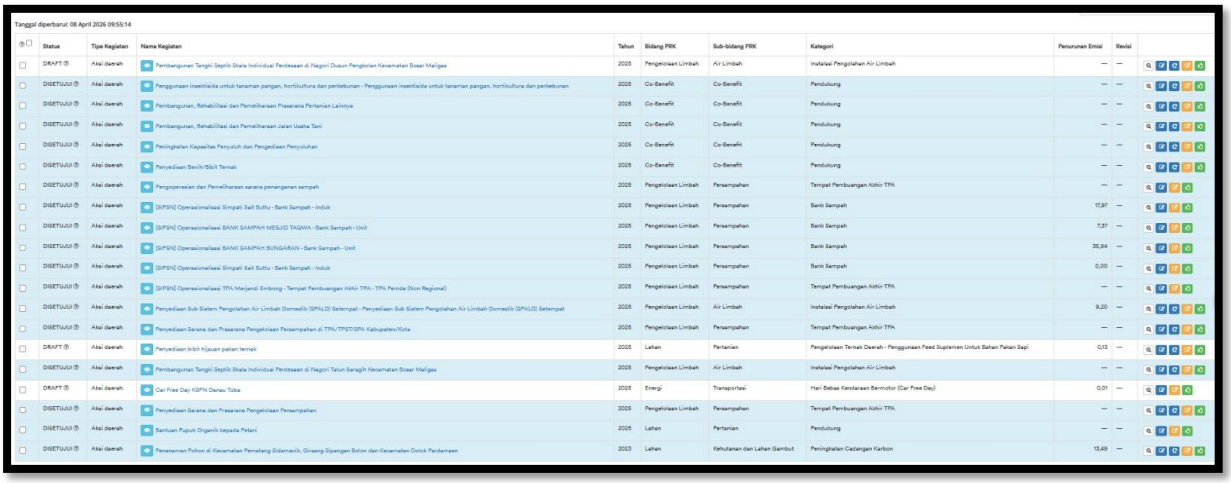

Sumber: Aplikasi Aksara, 2026

Tanggal diperbarui: 08 April 2026 09:55:14

Status	Tipe Kegiatan	Nama Kegiatan	Tahun	Bidang PRK	Sub-bidang PRK	Kategori	Penurunan Emisi	Revisi
DRAFT	Aksi daerah	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Nagori Dusun Pengkolan Kecamatan Bosar Maligas	2025	Pengelolaan Limbah	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Penggunaan insektisida untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - Penggunaan insektisida untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2025	Co-Benefit	Co-Benefit	Pendukung	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2025	Co-Benefit	Co-Benefit	Pendukung	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2025	Co-Benefit	Co-Benefit	Pendukung	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pengediaan Penyuluhan	2025	Co-Benefit	Co-Benefit	Pendukung	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Penyediaan Benih/Bibit Ternak	2025	Co-Benefit	Co-Benefit	Pendukung	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Tempat Pembuangan Akhir TPA	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi Simpati Salt Buttu - Bank Sampah - Induk	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	17,97	—
DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi BANK SAMPAH MESJID TAQWA - Bank Sampah - Unit	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	7,37	—
DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi BANK SAMPAH SUNGARAN - Bank Sampah - Unit	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	35,94	—
DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi Simpati Salt Buttu - Bank Sampah - Induk	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	0,00	—
DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi TPA Marjandi Embong - Tempat Pembuangan Akhir TPA - TPA Pemda (Non Regional)	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Tempat Pembuangan Akhir TPA	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2025	Pengelolaan Limbah	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	9,20	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Tempat Pembuangan Akhir TPA	—	—
DRAFT	Aksi daerah	Penyediaan bibit hijauan pakan ternak	2025	Lahan	Pertanian	Pengelolaan Ternak Daerah - Penggunaan Feed Duplemen Untuk Bahan Pakan Segi	0,13	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Nagori Talun Saragih Kecamatan Bosar Maligas	2025	Pengelolaan Limbah	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	—	—
DRAFT	Aksi daerah	Car Free Day KSPN Danau Toba	2025	Energi	Transportasi	Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	0,01	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Tempat Pembuangan Akhir TPA	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Bantuan Pupuk Organik kepada Petani	2025	Lahan	Pertanian	Pendukung	—	—
DISETUJUI	Aksi daerah	Penanaman Pohon di Kecamatan Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon dan Kecamatan Dolok Pardamean	2023	Lahan	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	13,49	—

Sumber: Aplikasi AKSARA, 2026



	Status	Tipe Kegiatan	Nama Kegiatan	Tahun	Bidang PRK	Sub-bidang PRK	Kategori	Penurunan Emisi	Revisi
	DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi BANK SAMPAH MESJID TAQWA - Bank Sampah - Unit	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	7,37	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi BANK SAMPAH BUNGARAN - Bank Sampah - Unit	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	35,94	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi Simpati Sait Buttu - Bank Sampah - Induk	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Bank Sampah	0,00	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	[SIPSN] Operasionalisasi TPA Marjandi Embong - Tempat Pembuangan Akhir TPA - TPA Pemda (Non Regional)	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Tempat Pembuangan Akhir TPA	—	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2025	Pengelolaan Limbah	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	9,20	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Tempat Pembuangan Akhir TPA	—	—
	DRAFT	Aksi daerah	Penyediaan bibit hijauan pakan ternak	2025	Lahan	Pertanian	Pengelolaan Ternak Daerah - Penggunaan Feed Suplemen Untuk Bahan Pakan Sapi	0,13	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di Nagori Talun Saragih Kecamatan Bosar Maligas	2025	Pengelolaan Limbah	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	—	—
	DRAFT	Aksi daerah	Car Free Day KSPN Danau Toba	2025	Energi	Transportasi	Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	0,01	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2025	Pengelolaan Limbah	Persampahan	Tempat Pembuangan Akhir TPA	—	—
	DISETUJUI	Aksi daerah	Bantuan Pupuk Organik kepada Petani	2025	Lahan	Pertanian	Pendukung	—	—
	DISETUJUI	Aksi	Penanaman Pohon di Kecamatan Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon dan	2023	Lahan	Kehutanan dan Lahan	Peningkatan Cadangan Karbon	13,49	—

sumber: Aplikasi AKSARA, 2026

Pemerintah Kabupaten Simalungun juga memalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan upaya Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) upaya dimaksudkan sebagai cara yang sistematis untuk mengurangi jumlah pelepasan gas-gas pencemar ke atmosfer yang berasal dari aktivitas manusia. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten baru menerapkan perencaaan awal indikator Penurunan Emisi GRK, sehingga realsiasi dan capaian belum dapat dihitung. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Simalungun melaui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun telah melaksanakan penyusunan dokumen inventarisasi gas rumah kaca di Kabupaten Simalungun. Inventarisasi di dasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Sumber-sumber utama emisi GRK yang tercakup di dalam inventarisasi emisi GRK kegiatan terkait proses industri dan penggunaan produk (industrial processes and production use, IPPU). Emisi GRK dari kegiatan IPPU mencakup; emisi GRK yang terjadi selama proses/reaksi kimiadi industri, penggunaan gas-gas kategori GRK di dalam produk, dan penggunaan karbon bahan bakar fosil untuk kegiatan (non-energi), yaitu bukan untuk penyediaan energi namun untuk kegiatan produksi. Kategori sumber emisi GRK dari Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU).

Tabel 3.6
Kategori Sumber Emisi GRK dari Proses Industri dan Penggunaan Produk

Kode	Kategori	Cakupan Kategori
2A	Industri Mineral	Produksi Semen, Kapur, Kaca, Proses lain yang menggunaan karbonat, Keramik, Penggunaan lain Soda Abu, Produksi Non - Metallurgical Mg, dan Lainnya
2B	Industri Kimia	Produksi Ammonia, Asam Nitrat, Asam Adipat, Caprolactam, Glyoxal & Glyoxylic Acid, Produksi Karbida, Titanium Dioksida, Soda Abu, Petrokima/Carbon Black, Fluorochemical, dan Lainnya
2C	Industri Logam	Produksi Besi dan Baja, Ferroalloys, Aluminium, Magnesium, Timbal, Produksi Seng, dan Lainnya
2D	Non-Energi Produk dari Bahan Bakar dan Penggunaan Solvent	Penggunaan Pelumas, Lilin Paraffin.
2E	Industri Electronik	Integrated Circuit/Semiconductor, TFT Flat Panel Display, Fotovoltaik, Heat Transfer Fluid, dan Lainnya
2F	Penggunaan Produk sebagai Bahan Peluruhan Lapisan Ozon	Refrigeran dan AC, Foam Blowing Agent, Alat Pemadam Kebakaran, Aerosols, Pelarut, dan Aplikasi lainnya
2G	Pembuatan Produk- produk Lainnya dan Penggunaannya	Peralatan Listrik, SF6/PFCs Penggunaan Produk Lain, N2O dari Penggunaan Produk, dan Lainnya
2H	Lainnya	Industri Pulp dan Kertas, Industri Makanan dan Minuman, dan Lainnya

Sumber: DLH Kab. Simalungun, 2025

Tabel 3.7
Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan dan Penggunaan Energi	711,64	2.120,99	956,74	706,32	1.129,94
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	268,75	313,81	345,17	325,57	375,13
AFOLU	1.524,37	1.203,00	1.351,27	1.369,48	1.194,55
Pengelolaan Limbah	74,93	88,99	78,81	79,42	73,71
Total	**2.579,69**	**3.726,79**	**2.731,99**	**2.480,79**	**2.773,33**

Sumber: DLH Kab. Simalungun, 2025

Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Simalungun berdasarkan data tahun 2020- 2024 mencapai 2.773,33 Gg CO2eq dengan proporsi sumber emisi terbesar dari sektor AFOLU mencapai 1.194,55 Gg CO2eq (43,07%), sektor energi mencapai 1.129,94 Gg CO2eq (40,74%), dan sektor IPPU mencapai 375,13 Gg CO2eq (13,53%). Sementara itu proporsi sumber emisi terkecil terdapat pada sektor pengelolaan limbah sebesar 73,71 Gg CO2eq (2,66%).

Tabel 3.8
Emisi dan Serapan GRK Kabupaten Simalungun Berdasarkan Kategori Tahun 2020-2024 (Gg CO2eq)

Sektor & Sub-sektor	Jenis Gas	Emisi GRK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1 **Sektor Pengadaan & Penggunaan Energi**	CO2	703,98	2.104,56	942,34	693,14	1.114,60
	CH4	0,08	0,15	0,14	0,13	0,17
	N2O	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
	CO2e	**711,64**	**2.120,99**	**956,74**	**706,32**	**1.129,94**
1A2 Industri Pengolahan & Konstruksi	CO2	490,6	1546,93	351,38	140,79	549,62
	CH4	0,07	0,12	0,05	0,04	0,08
	N2O	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	CO2e	**494,52**	**1553,63**	**354,54**	**143,38**	**554,1**
1A3 Transportasi	CO2	213,38	557,63	590,96	552,11	564,74
	CH4	0,01	0,03	0,09	0,09	0,09
	N2O	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
	CO2e	**217,12**	**567,36**	**602,2**	**562,7**	**575,6**
1A4 Residential	CO2	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sektor & Sub-sektor	Jenis Gas	Emisi GRK				
		2020	2021	2022	2023	2024
	CO2e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24**	**0,24**
2 Sektor Proses Industri & Penggunaan Produk (IPPU)	CO2	268,75	313,81	345,17	325,57	375,13
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**268,75**	**313,81**	**345,17**	**325,57**	**375,13**
2D1. Penggunaan Pelumas	CO2	268,75	313,81	345,17	325,56	375,13
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**268,75**	**313,81**	**345,17**	**325,56**	**375,13**
2D2. Penggunaan Lilin Parafin	CO2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**
AFOLU	CO2	167,51	66,40	86,52	114,59	40,18
	CH4	7,09	7,23	7,20	4,77	4,82
	N2O	3,89	3,17	3,59	3,71	3,40
	CO2e	**1524,37**	**1203,00**	**1351,27**	**1369,48**	**1194,55**
3A Sektor Perternakan	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	7,04	7,18	7,16	4,73	4,76
	N2O	0,11	0,11	0,11	0,07	0,08
	CO2e	**183,02**	**186,08**	**185,63**	**122,39**	**123,38**
3A1. Fermentasi Enterik	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	6,46	6,60	6,59	4,35	4,38
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**135,66**	**138,59**	**138,39**	**91,29**	**92,02**
3A2.a (CH4) Dari Pengelolaan Pupuk Kandang	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,58	0,58	0,57	0,38	0,38
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**12,24**	**12,15**	**11,91**	**7,88**	**7,94**
3A2.b Emisi N2O Langsung Dari Limbah Ternak / Pupuk Kandang	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,11	0,11	0,11	0,07	0,08
	CO2e	**35,12**	**35,34**	**35,33**	**23,22**	**23,42**
3B Sektor Kehutanan	CO2	-229,38	-254,51	-254,51	-254,51	-254,51
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**-229,38**	**-254,51**	**-254,51**	**-254,51**	**-254,51**
3B1a Hutan yang Tersisa	CO2	-620,09	-624,99	-624,99	-624,99	-624,99
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**-620,09**	**-624,99**	**-624,99**	**-624,99**	**-624,99**
3B2a Lahan Pertanian yang Tersisa	CO2	353,21	361,77	361,77	361,77	361,77
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**353,21**	**361,77**	**361,77**	**361,77**	**361,77**
3B2b Lahan Non-Pertanian menjadi Lahan Pertanian	CO2	72,59	26,55	26,55	26,55	26,55
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**72,59**	**26,55**	**26,55**	**26,55**	**26,55**
3B3b Lahan Non-Padang Rumput menjadi Lahan Pertanian	CO2	-35,09	-24,89	-24,89	-24,89	-24,89
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**-35,09**	**-24,89**	**-24,89**	**-24,89**	**-24,89**
3B6b Lahan Non-Lain menjadi	CO2	0,00	7,05	7,05	7,05	7,05
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sektor & Sub-sektor	Jenis Gas	Emisi GRK				
		2020	2021	2022	2023	2024
Lahan Lain	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**0,00**	**7,05**	**7,05**	**7,05**	**7,05**
3C Agregat	CO2	396,89	320,91	341,03	369,10	294,69
	CH4	0,05	0,05	0,04	0,04	0,06
	N2O	3,78	3,06	3,48	3,64	3,32
	CO2e	**1570,73**	**1271,43**	**1420,15**	**1501,60**	**1325,68**
3C1.a Pembakaran Biomassa Lahan Pertanian	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,05	0,05	0,04	0,04	0,06
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**1,53**	**1,43**	**1,26**	**1,26**	**1,74**
3C2. Pengapuran	CO2	1,00	0,98	0,74	0,92	0,92
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**1,00**	**0,98**	**0,74**	**0,92**	**0,92**
3C3. Pemupukan Urea	CO2	395,89	319,93	340,29	368,18	293,77
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**395,89**	**319,93**	**340,29**	**368,18**	**293,77**
3C4. Emisi N2O Langsung dari Tanah yang Dikelola	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	3,28	2,63	3,02	3,18	2,88
	CO2e	**1015,49**	**815,06**	**936,72**	**986,13**	**891,35**
3C5. Emisi N2O Tidak Langsung dari Tanah yang Dikelola	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,48	0,41	0,43	0,45	0,43
	CO2e	**149,54**	**126,35**	**133,12**	**140,59**	**133,28**
3C6. Emisi N2O Tidak Langsung dari Pengelolaan Pupuk Kandang	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01
	CO2e	**7,28**	**7,68**	**8,02**	**4,52**	**4,62**
4 Limbah	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	3,15	3,60	3,26	3,35	3,07
	N2O	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
	CO2e	**74,93**	**88,99**	**78,81**	**79,42**	**73,71**
4B. Pengolahan Limbah Padat secara Biologi	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**0,00**	**4,73**	**1,47**	**0,00**	**0,00**
4D1. Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N2O	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	CO2e	**8,68**	**8,79**	**8,95**	**9,08**	**9,22**
4D2. Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Industri	CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CH4	3,15	3,59	3,26	3,35	3,07
	N2O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CO2e	**66,25**	**75,47**	**68,39**	**70,34**	**64,49**
TOTAL	**CO2e**	**2.579,69**	**3.726,79**	**2.731,99**	**2.480,79**	**2.773,33**

Sumber: DLH, Kab. Simlaungun, 2025



Foto: Konsultasi publik penyusunan Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca, Sumber: DLH Kab. Simalungun, 2025

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2025		Capaian
				2022	2023	2024	Target	Realisasi	
1	Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	TonCO2 Eq	NA	NA	NA	173.083,31	84,10262588	0,0005%

Realisai capaian Kinerja Penurunan Emisi GRK Tahun 2025 pada tahun adalah sebesar 84,10262588, sedangkan dari tahun 2022 sampai degan tahun 2024 tidak dapat diperbandingkan karena IGRK merupakan indikator baru yang dimunculkan sesuai dengan Intrusksi BAPPENAS pada tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Penurunan Emisi GRK Tahun 2025 dengan target Akhir Jangka Menengah di RPJMD 2025-2029

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan
1	Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	TonCO2 Eq	84,10262588	288.934,62	0,0003%

Pada tabel diatas menunjukkan target akhir RPHMD yang akan disasar adalah sebesar 288.934,62, sedangkan realisasi IGRK 2025 adalah sebesar 84,1026258 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2025 maka tingakt kemajuannya adalah sebesar 0,0003.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tabel 3.11
Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1	Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK	173.083,31	84,10262588	0,0005	Hasil IGRK 2025 masih dapat berubah seiring dengan data yang akan dipenuhi dan diloengkapi di aplikasi AKSARA terus diperbaharui sehingga besaran angka realisasi juga akan berubah

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Adapun program kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam peningkatan kualitas penurunan Emisi Gas Rumah Kaca :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pengendalian Pencemaran Air: Pemantauan kualitas sungai, danau, dan laut serta pengawasan limbah industri.

Pengendalian Pencemaran Udara: Pemantauan emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri untuk menjaga Indeks Kualitas Udara (IKU).

Pengendalian Kerusakan Lahan/Hutan: Fokus pada pencegahan kebakaran hutan, kerusakan ekosistem akibat berkurangnya

2. MISI 2 : Awasi

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 3.12
Realisasi Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 2: Awasi							
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,67	68,90	106%	Sangat memuaskan

Analisis Capaian Kinerja :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Secara umum, tujuan utama **reformasi birokrasi** adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perubahan sistematis pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia

aparatur. Lebih lanjut, reformasi birokrasi pada dewasa ini menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang difokuskan oleh pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia mengarahkan implementasi reformasi birokrasi bermuara pada tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered),* serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Sehubungan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi menjadi sebuah instrumen alat (*tools)* dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 adalah sebesar 68,90 (B), dengan capaian sebesar 106%, Indeks Reformasi Birokrasi terus ditingkatkan dengan melaksanakan. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan juga Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, dalam surat tersebut ada penambahan indikator khususnya di indikator Renaksi RB tematik. Beberapa indikator tersebut diantaranya, Hilirisasi, **Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.** Bertambahnya beberapa indikator baru didalam penyusunan RB Tematik tersebut yang merupakan dari Penyesuaian dan Mendukung RPJMN 2025-2029 yang juga disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Simalungun untuk periode 2025-2029.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun menjadikan indeks reformasi birokrasi

sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintahannya, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator internal pada tahap perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*), sementara evaluasi eksternal dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:

a. RB General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
b. RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Tabel 3.13
Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Nilai	Kategori	Predikat
1	>100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 - 100	A	Memuaskan
		A-	Memuaskan dengan catatan
3	>70-80	BB	Sangat Baik
4	>60-70	B	Baik
5	>50-60	CC	Cukup
6	>30-50	C	Kurang
7	0-30	D	Sangat Kurang

Sumber : Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tabel 3.14
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Simalungun Tahun 2025

No	KOMPONEN	BOBOT
1	RB General	58,97
2	RB Tematik	10,65
3	Total Nilai	69,62
4	Indeks RB	69,62
Predikat		**B**

*Sumber : *Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simalungun dari KemenPAN RB Tahun 2025 (portalrb.go.id)*

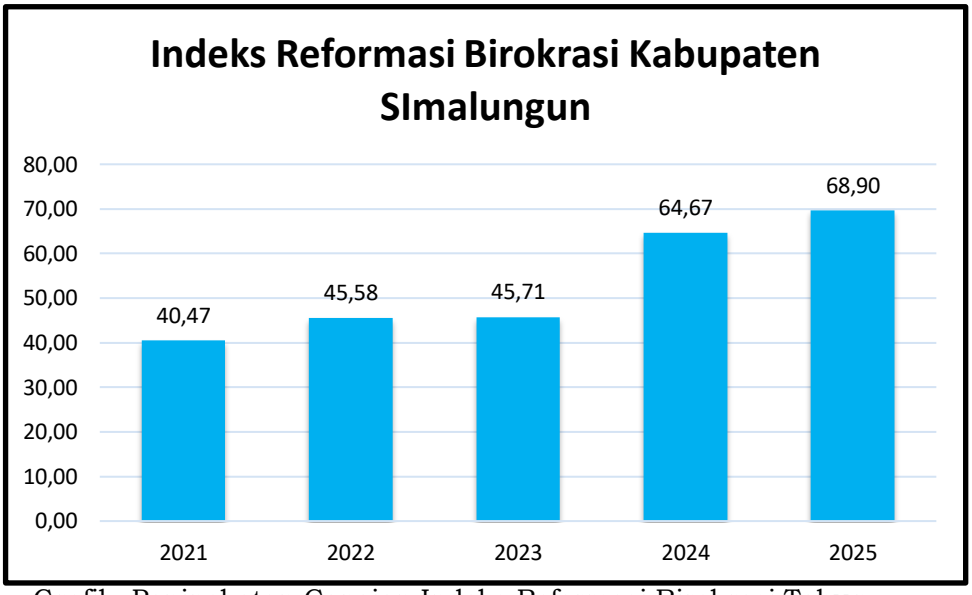

Grafik. Peningkatan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 – 2025

sumber: screenshoot, Portal RB-Evaluasi RB Tahun 2025

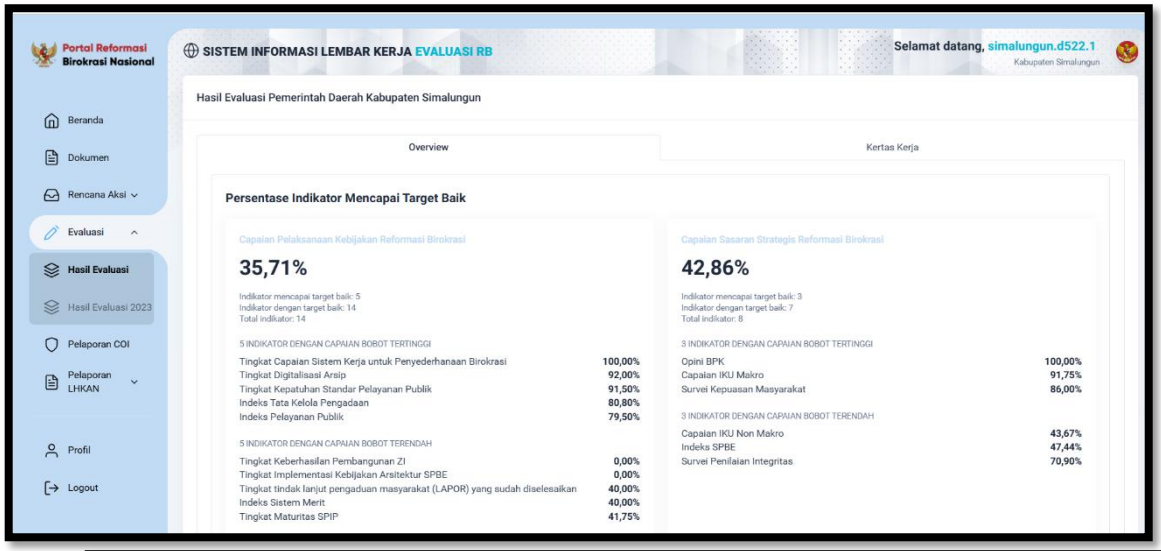

Sumber: portalrb, 2025 (https://www.portalrb.id/evaluasi/hasil-evaluasi)

Dari tampilan gambar dan tabel hasil LHE Reformasi Birokrasi diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,90 poin dari total 120 poin. Nilai ini membawa Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapatkan predikat B (Baik). Predikat **B (Baik)** dengan rentang nilai **60 hingga <70** menunjukkan bahwa instansi pemerintah Kabupaten Simalungun telah berhasil membangun fondasi tata kelola yang memadai, namun masih memerlukan perbaikan signifikan pada aspek implementasi dan keberlanjutan hasil, selain itu masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki, seperti pelaksanaan percepatan transformasi digital dan

pembangunan budaya BerAKHLAK yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, dampak nyata dari reformasi birokrasi ini terhadap pembangunan juga belum sepenuhnya terwujud.

Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya memperbaiki kualitas pemerintahan dan juga meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi yang bukan hanya sekadar pemenuhan administrasi tetapi juga harus mulai menunjukkan **hasil yang berdampak nyata** serta sistem yang terintegrasi. Secara detail, nilai 69,62 didapat dari masing – masing sub komponen RB General dan RB Tematik, yang mana penjabarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Tematik Tahun 2025

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Tim Penilai
Reformasi Birokrasi General						
1	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.58	1,58	Tim Penilai Nasional
2	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	0.00	0.00	Tim Penilai Nasional
3	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	3	5.00	3.00	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
4	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	2.09	1.67	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	0.00	0.00	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
6	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	55.52	2.22	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
7	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	91.82	2.3	Arsip Nasional Republik Indonesia
8	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah	2.5	2.00	1.00	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Tim Penilai
		Diselesaikan				Digital Pelayanan Publik
9	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.4	51.19	1.28	Lembaga Administrasi Negara
10	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	66.54	1.66	Kementerian Hukum dan HAM
11	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.32	1.16	Badan Pusat Statistik
12	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	80.92	2.02	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	164.00	1.60	Komisi Aparatur Sipil Negara
14	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	2	3.97	1.59	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
15	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	91.46	1.83	Ombudsman Republik Indonesia
16	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	2.37	4.27	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"
17	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	91.77	3.67	Tim Penilai Nasional
18	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	6	78.57	2.62	Tim Penilai Nasional
19	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	3.00	5.00	Badan Pemeriksa Keuangan
20	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	74,11	2.96	Badan Pemeriksa Keuangan
21	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	71.27	2.85	Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA
22	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	70.92	7.09	Komisi Pemberantasan Korupsi
23	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	86.06	6.88	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

No.	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Tim Penilai
Reformasi Birokrasi Tematik						
24	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1			Tim Penilai Nasional
25	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1			Tim Penilai Nasional
26	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0.24	0.24	Tim Penilai Nasional
27	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	0.70	0.70	Tim Penilai Nasional
28	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0.15	0.15	Tim Penilai Nasional
29	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2.31	2.31	Tim Penilai Nasional
30	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	2.00	2.00	Tim Penilai Nasional
31	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0.38	0.38	Tim Penilai Nasional
32	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	1,44	1.44	Tim Penilai Nasional
33	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2.98	2.98	Tim Penilai Nasional
34	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	0.00	0.00	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"
35	Strategi Pembangunan	Percepatan Hilirisasi	0.01			Tim Penilai Nasional
36	Strategi Pembangunan	Ketahanan Pangan	0.01			Tim Penilai Nasional
37	Strategi Pembangunan	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	0.01			Tim Penilai Nasional
38	Strategi Pembangunan	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	0.01			Tim Penilai Nasional

Sumber: Portalrb.go.id,2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa beberapa indikator yang masih mendapatkan hasil yang cukup baik dan pengimplementasiannya telah berjalan dengan baik dan juga optimal seperti; Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Pelayanan Publik, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat indeks BerAKHLAK dan Opini BPK

Selanjutnya beberpa indikator yang perlu ditingkatkan ialah, sistem kerja, maturitas SPIP, nilai SAKIP, tingkat tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR), indeks pembangunan stastistik, indeks tata kelola pengadaan, indeks sistem merit, serta survei penilaian integritas. Sementara itu, untuk zona integritas, indeks kualitas kebijakan, dan tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE belum menyumbang skor dikarenakan satu dan lain hal (informasi lebih lanjut akan disampaikan pada sub bagian kendala dan hambatan yang terjadi).

Beberapa Langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 seperti:

1. **Membentuk Tim Reformasi Birokrasi**

   Tim Reformasi Birokrasi dibentuk untuk mengawal pelaksanaan indikator reformasi birokrasi, baik yang general maupun tematik. Tujuan tim ini adalah untuk memastikan tahapan reformasi birokrasi di Kabupaten Simalungun berjalan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan adanya tim ini, diharapkan birokrasi bisa menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lebih cepat serta efisien. Tim juga diharapkan dapat membentuk rasa tanggung jawab bagi pihak terkait.

2. **Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi**

   Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun untuk menetapkan langkah-langkah dalam mencapai target indikator. Penyusunan dimulai dengan menelaah rekomendasi dari kementerian, lembaga, atau instansi pembina yang ada dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Rencana aksi ini kemudian dijalankan selama tahun 2025.

3. **Evaluasi Rencana Aksi**

   Rencana aksi yang disusun dievaluasi oleh Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya dan realistis. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa aksi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada hasil (output) tetapi juga berdampak positif (outcome).

4. **Laporan Capaian Aksi Triwulan**

   Setiap triwulan, perangkat daerah pengampu indikator kinerja diminta untuk melaporkan aksi yang telah dilakukan dan capaian yang diperoleh. Mereka juga harus menyampaikan kendala yang dihadapi dan bukti pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaporan ini kemudian dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, yang akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki rencana aksi yang belum terealisasi.

5. **Koordinasi dengan Instansi Pembina dan Daerah Lain**

   Perangkat daerah pengampu indikator kinerja rutin berkoordinasi dengan instansi pembina dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan pembinaan agar implementasi lebih optimal. Selain itu, mereka juga aktif berkoordinasi dengan kabupaten lain untuk berbagi pengetahuan, mencari

solusi atas kendala yang dihadapi, dan menerapkan hal-hal yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Simalungun.

6. **Koordinasi Dengan Tim Reformasi Birokrasi**

   Setiap perangkat daerah pengampu indikator kinerja juga berkoordinasi dengan tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Koordinasi ini dilakukan untuk meminta bantuan atau pendampingan saat melaksanakan kegiatan, mengevaluasi hasil, atau mengatasi hambatan yang muncul.

7. **Dialog Kinerja Rutin**

   Untuk memantau capaian kinerja, Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun rutin mengadakan dialog kinerja. Dalam dialog ini, perangkat daerah memaparkan progres yang telah dicapai, target yang berhasil direalisasikan, serta kendala yang dihadapi. Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah kemudian memberikan saran dan masukan untuk perbaikan.

8. **Melakukan berbagai upaya peningkatan khususnya pada masing-masing komponen yaitu**:

   1) Tingkat Digitalisasi Arsip

   a. Memastikan Bahwa Tingkat digitalisasi arsip yang dilaksanakan oleh instansi telah sesuai dengan standar nasional kearsipan.
   b. Mendukung proses penilaian, pengawasan, dan akreditasi kearsipan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Mendukung pencapaian nilai pengawasan kearsipan yang lebih baik dalam proses evaluasi oleh ANRI

   2) Survei Penilaian Integritas

   a. Melakukan peningkatan untuk kejelasan informasi layanan dengan mengemas prosedur layanan secara jelas dan interaktif.

b. Evaluasi prosedur pelaksanaan kegiatan layanan melalui survei kepuasan layanan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat.
c. Terus memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada Masyarakat dan memastikan kebutuhan dengan baik.
d. Melakukan sosialisasi mengenai aturan terkait gratifikasi dan laranyan suap-menyuap.
e. Perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan komprehensif.
f. Melakukan edukasi mengenai pengawasan persaingan usaha dan melakukan due diligence terhadap vendor untuk memastikan integritas dalam pengadaan barang dan jasa.
g. Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi serta sanksi bagi vendor yang tidak memenuhi standar.
h. Menerapkan kaidah SNI-ISO 37001 dan SNI-ISO 37301, agar proses rekrutmen dan promosi dapat dilakukan secara adil dan transparan.

3) Indeks Pelayanan Publik

a. Kelengkapan dokumen standar pelayanan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
b. Informasi pelayanan kepada Masyarakat belum tersosialisasi secara optimal melalui media informasi yang tersedia.
c. Pengelolaan pengaduan Masyarakat masih perlu ditingkatkan agar lebih responsive dan terintegrasi.
d. Monitoring dan evaluasi pelayanan public dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik.
e. Pemanfatan teknologi informasi dalam pelayanan masih dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kemudahan akses Masyarakat.

4) Indeks Tata Kelola Pengadaan

a. Melakukan persiapan pada Domain Pemanfaatan Sistem Pengadaan seperti mengoptimalisasikan pengisian RUP dan SiRUP dan memaksimalkan penggunaaan e-Purchasing (e-Katalog)
b. Persiapan pada Domain SDM Pengadaan dan Kelembagaan (UKPBJ)
c. Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan dan melakukan penguatan pengadaan yang mendukung kebijakan nasional
d. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi pengadaan serta membentuk Tim ITKP di Instansi

5) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

a. Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Pelayanan dan mempublikasikan standar pelayanan kepada Masyarakat
b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan meningkatkan kompetensi kepada petugas pelayanan
c. Transparansi informasi layanan kepada Masyarakat dan penguatan sistem pengaduan Masyarakat

6) Survei Kepuasan Masyarakat

a. Peningkatan kualitas pelayanan public dengan melakukan tindak lanjut perbaikan secara konsisten.
b. Mengoptimalkan data hasil SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan.

7) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi

a. Memastikan proses kerja lebih cepat dan sederhana serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat koordinasi lintas unit kerja.

b. Melakukan evaluasi system kerja, Pernyempurnaan proses bisnis, penguatan koordinasi, optimalisasi jabatan fungsional, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

8) Nilai SAKIP

a. Penyempurnaan Perencanaan Kinerja dan Penguatan Cascading Kinerja
b. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
c. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja (LKjIP)
d. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola SAKIP
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Kinerja.

9) Indeks SPBE

a. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
b. Penguatan kebijakan dan Tata Kelola SPBE
c. Integrasi Aplikasi dan Sistem Informasi
d. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
e. Pengembangan layanan Digital Terintegrasi
f. Peningkatan manajemen data dan informasi serta peningkatan kompetensi SDM dibidang SPBE
g. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPBE

10) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan

a. Meningkatkan sosialisasi dan kampanye kanal SP4N-LAPOR! Kepada pengguna layanan instansi serta mendorong digitalisasi pengaduan ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR!
b. Melakukan evaluasi dan perbaikan pengelolaan pengaduan guna mendorong seluruh unit penerima aduan untuk menindaklanjuti seluruh pengaduan yang diterima

c. Mempercepat proses respon awal dan tindak lanjut pengaduan agar sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

11) Indeks Reformasi Hukum

a. Penataan Regulasi yang lebih sistematis dan Peningkatan kualitas penyusunan peraturan.
b. Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan Hukum
c. Pemanfaatan Sistem Informasi Produk Hukum dan Peningkatan Kompetensi SDM di bidang hukum.
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Hukum.

12) Indeks BerAkhlak

a. Penguatan Internalisasi Nilai-Nilai BerAkhlak
b. Integrasi Nilai BerAkhlak dalam Sistem Manajemen Kinerja
c. Penguatan Budaya kerja Kolaboratif
d. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya kerja.

13) Indeks Pembangunan Statistik

a. Penguatan tata Kelola Statistik Sektoral dan peningkatan kualitas data statistic serta penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data.
b. Peningkatan pemanfaatan data statistik dalam perencanaan

14) Indeks Kualitas Kebijakan

Peningkatan kualitas kebijakan pada dimensi perencanaan, implementasi, evaluasi dan transparansi dan partisipasi public.

15) Tingkat Maturitas SPIP

a. Perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading dan crosscutting atas keterkaitan sasaran strategis yang diambil dengan satker yang terlibat dengan indicator kinerja yang

berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART.

b. Memberikan pembekalan secara berkelanjutan terkait manajemen resiko kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen resiko.
c. Menyusun kebijakan pengendalian korupsi yang didalamnya memuat pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi.

Kendati demikian, ada beberapa hambatan yang terjadi pada beberapa komponen, yaitu :

1. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

   Hambatan utama dalam pembangunan Zona Integritas terlihat dari belum dilakukannya penyusunan arsitektur SPBE sesuai standar, yang mengakibatkan integrasi sistem informasi belum optimal, proses layanan kurang efisisen, dan implementasi reformasi digital di instansi berjalan tidak konsisten.
2. Arsitektur SPBE

Tingkat implementasi kebijakan Arsitektus SPBE belum dapat dilakukan karena terhalang pada Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sesuai standar.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2025		Capaian
				2022	2023	2024	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	45.58 (C)	45.71	62,47	64,67	68,90	106%

Peningkatan nilai IRB dari mulai tahun 2022 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan yang cukup baik dimulai pada tahun 2022 dengan nilai 45,58 (C), tahun 2023 dengan nilai 45,17 (C) dan pada tahun 2024 dengan nilai 62,47 (B), dan tahun 2025 menjadi 68,90 (B). Penilaian IRB mencakup dua ketgori yakni Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan target Akhir Jangka Menengah di RPJMD 2025-2029

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,80 (B)	73,2 (BB)	94%

Pada tabel tersebut menunjukan tingkat kemajuan realisasi kinerja dari Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi terhadap target yang akan di sasar pada akhir periode RPJMD tahun 2029 yakni sebesar 94%, dari target Realisasi kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar 72,2 (BB). Jika melihat trend positif yang ditunjukan dengan terus meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun maka Pemerintah Kabupaten Simalungn Optimis akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan target akhir RPJMD.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dengan target Nasional/Provinsi Tahun 2025

Tabel 3.18
Perbandingan Realiasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan Capaian Nasional/Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Nasional/Provinsi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,90 (B)	75,69 (rata-rata Nasional)	90%
					75,18 (Sumatera Utara)	91%

pada tabel diatas menunjukkan tingkat perbandingan realisasi capaian Indeks RB Kabupaten Simalungun terhadap Indeks RB Nasional dan Provinsi.

Untuk capaian nasional menggunakan rata-rata capaian Indeks RB Nasioal untuk Tahun 2024 dimana :

- **Kementerian/Lembaga: 82,98** (naik 6,17 poin dibandingkan tahun sebelumnya).
- **Pemerintah Provinsi: 74,63** (naik 4,92 poin).
- **Pemerintah Kabupaten/Kota: 69,46** (naik signifikan sebesar 10,14 poin)
- **Sehingga rata rata capaian nasiona adalah sebesar 75,69**

  Kemudian untuk capaian perbandingan ditingkat provinsi sumatera utara, data indeks yang dimunculkan adalah indeks RB Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dengan capaian Indeks sebesar 75,18 dengan tingkat kemajuan terhadap Indeks RB Kabupaten Simalungun sebesar 92%. Dari kedua perbandingan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara maka maka Kabupaten Simalungun masih dibawah capaian rata rata nasional dan Provinsi Sumatera Utara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Keberhasilan capaian indeks reformasi birokrasi pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti:

a. Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Dokumen Rencana Aksi disusun untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai masing-masing target indikator baik general maupun tematik. Dalam penyusunan rencana aksi Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapatkan pendampingan dari Biro Organsiasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan rencana aksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Simalungun diawali dengan membedah dan menelaah rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing kementerian/lembaga meso/instansi pembina indikator kinerja sebagaimana juga tertera pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Selanjutnya apa yang direkomendasikan ditindaklanjuti dengan menjadikan sebuah rencana yang akan dilakukan selama tahun 2024. Penyusunan rencana aksi ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah pengampu indikator Reformasi Birokrasi, mulai dari Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa), Inspektorat, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak.

b. Selanjutnya, rencana aksi yang telah disusun tidak semata – mata hanya disusun, melainkan dievaluasi oleh Tim Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memastikan target dari masing-masing indikator telah diatas capaian tahun lalu serta realistis dan juga logis, dalam artian bukan hanya sekedar menentukan angka. Selain itu, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa aksi yang akan dilakukan bukan hanya berorientasi hasil (*output*), tapi juga berdampak (*outcome*).
c. Mendorong Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi untuk melaporkan aksi yang telah dilakukan serta sejauh mana capaian yang dihasilkan setiap triwulan. Dalam menyampaikan realisasi rencana aksi ini, Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja diminta untuk menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses realisasi serta bukti pelaksanaan dan hasil kegiatan. Selanjutnya, realisasi rencana aksi tersebut dimonitoring dan dievaluasi oleh Tim Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. Hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan berisi berbagai rekomendasi yang mana salah satunya yaitu, mendorong rencana aksi yang belum terealisasi.
d. Masing – masing perangkat daerah pengampu indikator kinerja reformasi birokrasi rutin melakukan koordinasi

dengan instansi pembina dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan pembinaan agar implementasi dapat berjalan lebih optimal. Tidak berhenti sampai disitu, para perangkat daerah pengampu indikator kinerja reformasi juga rajin berkoordinasi dengan kabupaten lain dalam hal *sharing knowledge*. Pada kegiatan *sharing knowledge* ini antar instansi bertukar pikiran apa yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan. Beberapa hal yang dianggap sama dan dapat diterapkan, maka perangkat daerah dari Kabupaten Simalungun mengaplikasikannya yang mana menyesuaikan situasi dan juga kondisi.

e. Perangkat daerah masing-masing pengampu indikator kinerja juga turut serta berkoordinasi dengan para tim reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Koordinasi ini biasanya dilakukan untuk meminta mendampingi pada saat pelaksanaan kegiatan, evaluasi, serta terjadi hambatan. Misalnya, Dinas Komunikasi dan Informatika, pada saat evaluasi arsitektur SPBE mengalami kendala dalam penginputan as – is.

f. Dalam rangka memantau capaian kinerja indikator reformasi birokrasi, Kepala Daerah beserta dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun rutin melakukan dialog kinerja setiap senin per bulan. Dalam dialog kinerja ini, Perangkat Daerah melakukan paparan terkait progres yang telah dilakukan, target yang telah berhasil direalisasikan, serta kendala yang ditemui. Selanjutnya, Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun menanggapi untuk memberikan saran dan masukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dalam kebijakan Indeks Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencama Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n}((\text{AAROi} \times \text{CROi}) - \text{RAROi})}{\sum_{i=1}^{n}(\text{AARO}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AARO_i : alokasi anggaran RO i

RARO_i : realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,67	68,90	107%	92.826.200	90.638.733	97,64	10,7%

Berdasarkan tabel diatas disampaikan bahwa terdapat efisiensi sebesar 10,7 %. Adapun anggaran yang diakumulasikan baik pagu maupun realisasi berasal dari data yang disampaikan oleh masing-masing unit kerja pengampu komponen reformasi birokrasi. Secara angka dapat terlihat bahwa efisiensi yang dilakukan cukup besar.

Selain itu, secara teknis juga demikian, banyak program program yang dilaksanakan berdasarkan hasil Kerjasama dan komitmen untuk peningkatan kualitas indeks reformasi birokrasi

3. Misi 3: Dampingi

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Usaha dan Kegiatan Ekonomi Lokal

Tabel 3.20
Realisai Capaian Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan dan partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Usaha dan Kegiatan Ekonomi Lokal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 3: Dampingi							
3	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Tingkat Kemiskinan	%	7,57	6,91	109%	Sangat Memuaskan
4		Gini Rasio	Rasio	0,290	0,230	126%	Sangat Memuaskan
5		PDRB Perkapita	Juta Rp	58,3	60,17	103%	Sangat Memuaskan
6		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	4,73	88%	Sangat Memuaskan
7		Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,170	5,23	101%	Sangat Memuaskan
8		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12	4,48	114%	Sangat Memuaskan

1. Perbandingan Realisai Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan usaha dan kegiatan ekonomi lokal tahun 2025 terhadap target tahun 2025:

a. Tingkat Kemiskinan

Tabel 3.21
Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya Pemeberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Tingkat Kemiskinan	%	7,57	6,91	109%	-

Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan Kabupaten Simalungun Tahun 2025 adalah sebesar 6,91% dari target yang akan disasar sebesar 7,57%, semakin kecil angka yang ditunjukkan pada realisasi maka semakin baik realisasi kinerja capaian tingkat kemiskinan yang akan disasar, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** merupakan nilai minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita perhari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 3.22
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Simalungun, 2017 - 2025

Tahun *Year*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*	Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	331.860	91,35	10,65
2018	342.477	80,3	9,31
2019	359.540	76,33	8,81
2020	387.549	73,64	8,46
2021	416.714	76,99	8,81
2022	441.744	72,47	8,26
2023	467.926	69,21	7,87
2024	496.959	68,05	7,72
2025	513.793	61,12	6,91

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Dalam penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 telah membantuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Simalungun. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 000.7.5/922.a/2025. Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025.

Tim ini bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pelaksanaan penanggulanagan kemiskinan di Kabupaten Simalungun

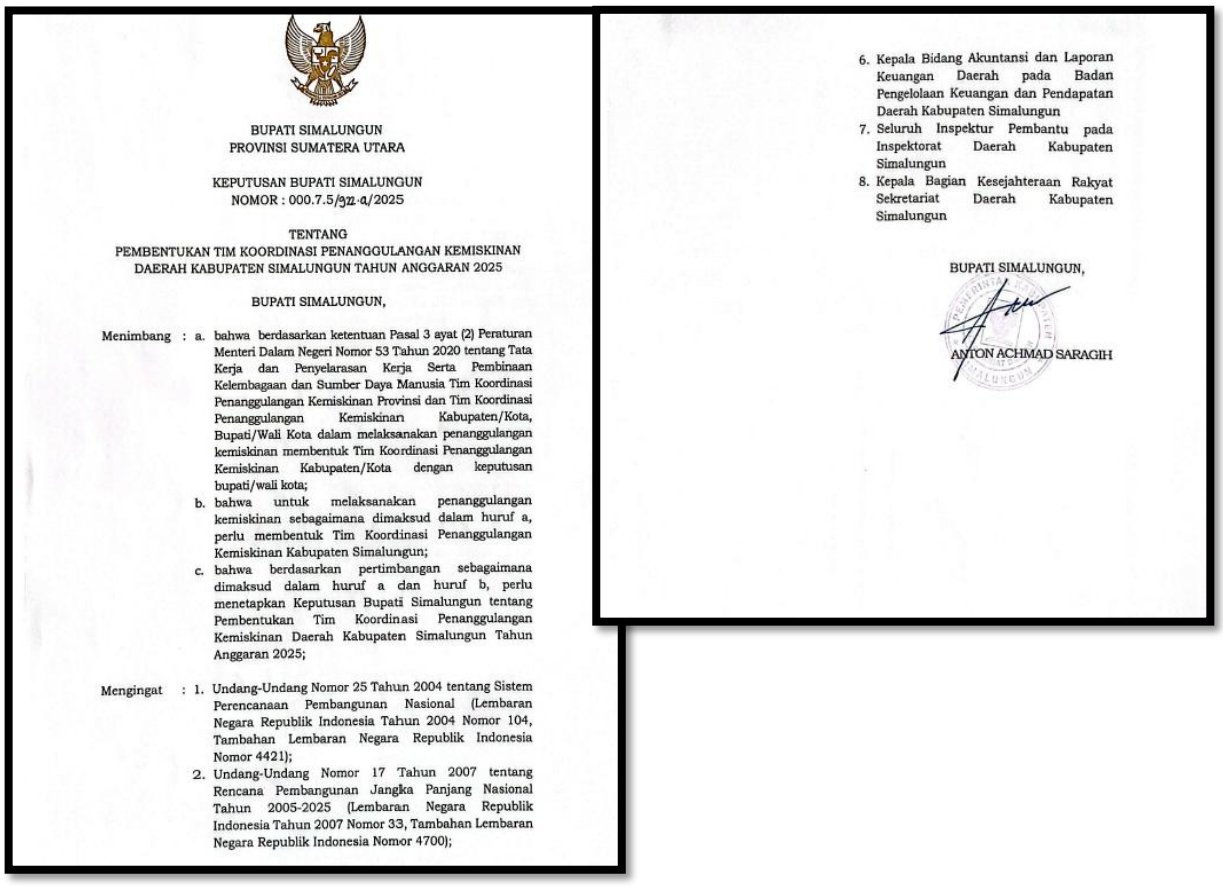

BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 000.7.5/922.a/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota;

b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Simalungun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Simalungun tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Kepala Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
7. Seluruh Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Simalungun
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun

BUPATI SIMALUNGUN,

ANTON ACHMAD SARAGIH

Screenshoot Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan TKPKD Kabupaten Simalungun.

b. Gini Rasio

Tabel 3.23
Realisasi Kinerja Indikator Gini Rasio

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 3: Dampingi							
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Gini Rasio	Rasio	0,290	0,230	126%	-

Gini Rasio merupakan ndikator yang digunakan untuk mengukur tingkat **ketimpangan distribusi pendapatan** , secara Sederhananya dapat dijelaskan bahwa angka ini menunjukkan seberapa merata uang atau pengeluaran terbagi di antara penduduk di sebuah wilayah.

Gini Rasio Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 sebesar **0,230** sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar **0,290** sehingga capaian dari Kinerja Indikator gini Rasio adalah sebesar **126%**. Capaian ini diperoleh dengan membandingnkan Target dengan Realisasi.

Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Kabupaten Simalunugun masuk dalam kategori koefisien **sedang.**

c. PDRB Perkapita.

Tabel 3.24
Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Kemiskinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 3: Dampingi							
5	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	Juta Rp	58,3	60,17	103%	Sangat Memuaskan

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk di suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan per kapita merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi suatu negara. Untuk mengetahui pendapatan perkapita adalah dengan membandingkan antara PDRB dengan total jumlah penduduk.

Tahun 2025 PDRB perkapita Kabupaten Simalungun berada pada posisi 60.17 (juta) sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar 58.3 (juta) sehingga capaian dari indikator kinerjany adalah sebesar 103%.

Tabel. 3.25
PDRB Kabupaten Simalunugn Tahun 2025

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EKONOMI/ *ECONOMIC*					
PDRB Per Kapita Harga Berlaku *Per Capita of GRDP at Current Price*	juta rupiah *million rupiahs*	46,29	50,43	56,00	60.17

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 3.26
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Simalungun, 2021 - 2025

	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	51,34	52,69	54,38	56,58	57,55
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	11,58	11,20	10,49	9,95	10,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi/*Construction*	9,99	9,73	9,14	8,19	7,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	15,85	15,77	15,74	15,24	14,93
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	1,63	1,63	1,72	1,75	1,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	0,79	0,76	0,77	0,78	0,76
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	0,56	0,54	0,53	0,51	0,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	1,11	1,09	1,02	1,96	0,90

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data dari Bada Pusta Statistik Nasional bahwa PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa, Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. dan Jaminan Sosial Wajib;

Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Tabel 3.27
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Simalungun (%), 2021 - 2025

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah					
Tangga	53,20	51,34	50,72	49,07	**48,16**
Household Consumption Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,00	0,94	0,98	0,99	**0,95**
NPISH Consumption Expenditure					
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,91	5,55	5,69	5,24	**4,97**
Government Consumption Expenditure					
Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,09	23,94	22,81	21,78	**20,58**
Gross Fixed Capital Formation					
Perubahan Inventori	1,12	0,93	1,47	1,23	**0,76**
Changes in Inventories					
Net Ekspor Barang dan Jasa	13,67	17,30	18,34	21,68	**24,59**
Net Exports of Goods and Services					
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Gross Regional Domestic Product					

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah Sehinga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 (tujuh) komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

d. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel. 3.28
Realisasi Kinerja Laju Paertumbuhna Ekonomi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 3: Dampingi							
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	4,73	88%	Sangat Memuaskan

Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi suatu wilayah meningkat atau berkembang dalam periode tertentu (biasanya per tahun atau per kuartal/Triwulan. Pada tahun 2025 Laju Pertumbuhan Ekonomi Simalungun berada pada posisi 4,73% sedangkan target yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebesar 5,37% sehingga capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 88%.

Tabel 3.29
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EKONOMI/*ECONOMIC*					
Laju Pertumbuhan Ekonomi/*Economic Growth*	%	4,68	5,07	4,89	4,73

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan Pengembangan Program Pembangunan dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk beberapa tahun kedepan, seperti yang tertuang dalam RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran tersebut dicapai dengan Program dan Kegiatan sebagaimana dijelaskan dengan Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam

pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi local dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Secara umum Ekonomi Simalungun sangat bergantung pada sektor-sektor seperti :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian daerah.
2. Industri Pengolahan: Sektor ini juga menjadi salah satu pilar utama pendapatan daerah.
3. Perdagangan: Sektor perdagangan besar dan eceran turut menyumbang pertumbuhan ekonomi yang stabil

a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Untuk meningkatkan Laju Pertumbhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berupaya meningkatkan hasil produksi pertanian diantaranya:

- **Rerata Produktivitas Padi Sawah**

Salah satu komoditas tanaman pangan yang dominan diusahakan oleh masyarakat adalah padi, yang terdiri atas padi sawah dan padi ladang. Kabupaten Simalungun dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Target produktivitas padi sawah tahun 2025 adalah 52,71 Kw/Ha dan realisasinya mencapai 57,22 Kw/Ha dimana persentasenya sebesar 108,56%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang direncanakan.

Realisasi produktivitas padi sawah Tahun 2025 didukung oleh penerapan pemupukan berimbang, penggunaan benih bermutu, ketersediaan alat dan mesin pertanian yang memadai dalam pengolahan lahan, serta adanya gerakan percepatan tanam melalui pemanfaatan benih bantuan pemerintah. Selain itu, dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, pada Tahun 2025 juga dilaksanakan Gerakan Percepatan Tanam secara

terkoordinasi. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk Sasaran Strategis 1 telah terealisasi melampaui target yang ditetapkan

Kecamatan-kecamatan dengan produktivitas dan produksi padi sawah tertinggi yang berkontribusi besar terhadap total produksi dan berperan sebagai lumbung padi Kabupaten Simalungun adalah Kecamatan Tanah Jawa dengan total produksi sebesar 55.285 ton, Kecamatan Hutabayu Raja dengan total produksi sebesar 39.419 ton dan Kecamatan Panei dengan total produksi sebesar 23.161 ton.

Berikut adalah pelaksanaan Panen Raya Padi di Kecamatan Tanah Jawa dengan luas baku sawah 2.970 ha dengan produksi rata-rata 6,7 ton per hektar, dan hasil ubinan di lokasi panen tersebut mencapai 7,01 ton per ha dengan varietas Padi Cibatu.



Gambar 1 Kegiatan Pelaksanaan Panen Raya Padi di Kecamatan Tanah Jawa

- **Rerata Produktivitas Padi Ladang**

Selain padi sawah, masyarakat di Kabupaten Simalungun, khususnya di wilayah Simalungun bagian atas, juga mengusahakan padi ladang. Target produktivitas padi ladang pada tahun 2025 adalah 32,89 Kw/Ha, realisasinya mencapai 47,37 Kw/Ha atau sebesar 144,03% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja produktivitas padi ladang Tahun 2025 telah melampaui target. Tingginya realisasi produktivitas tersebut didukung oleh

penerapan pemupukan berimbang, penggunaan benih bermutu, ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang memadai dalam pengolahan lahan, serta adanya percepatan tanam melalui pemanfaatan bantuan benih dari pemerintah.

Kecamatan-kecamatan dengan produktivitas dan produksi padi ladang tertinggi yang berkontribusi besar terhadap total produksi dan berperan sebagai lumbung padi Kabupaten Simalungun adalah Kecamatan Purba dengan total produksi sebesar 22.320,56 ton, Kecamatan Raya dengan total produksi sebesar 12.713,48 ton dan Kecamatan Dolog Masagal dengan total produksi sebesar 10.428,58 ton.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas Tahun 2025, dilaksanakan kegiatan Launching Gerakan Tanam Perdana serta Gerakan Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi Lahan Kering. Berdasarkan capaian tersebut, Sasaran Strategis 1 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasinya telah melampaui target yang direncanakan



Gambar 2 Kegiatan Pelaksanaan Launching Gerakan Tanam Padi Lahan Kering Bersama BRMP Perkebunan di Kecamatan Dolog Masagal

- **Rerata Produktivitas Jagung**

Selain komoditi padi, masyarakat juga mengusahakan tanaman palawija, khususnya jagung. Target produktivitas jagung pada Tahun 2025 adalah 52,99 Kw/Ha, realisasinya mencapai 58,08 Kw/Ha atau sebesar 109,61% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian produktivitas jagung pada Tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan. Tercapainya produktivitas jagung didukung oleh penerapan pemupukan berimbang, penggunaan benih bermutu, ketersediaan alat dan mesin pertanian yang memadai dalam pengolahan lahan, serta dukungan bantuan benih dari pemerintah. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk Sasaran Strategis 1 menunjukkan kinerja yang baik karena realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan.

Kecamatan-kecamatan dengan produktivitas dan produksi jagung tertinggi yang berkontribusi besar terhadap total produksi dan berperan sebagai lumbung jagung Kabupaten Simalungun adalah Kecamatan Tanah Jawa dengan total produksi sebesar 21.537 ton, Kecamatan Dolog Masagal dengan total produksi sebesar 17.936 ton dan Kecamatan Dolog Panribuan dengan total produksi sebesar 16.925 ton.



Gambar 3 Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Jagung Serentak bersama Polri dalam upaya Peningkatan Produktivitas/Produksi

- **Rerata Produktivitas Ubi Kayu**

Komoditas ubi kayu memilliki target produktivitas pada tahun 2025 sebesar 300,21 Kw/Ha dan realisasinya mencapai 330,99 Kw/Ha atau sebesar 110,25% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produktivitas ubi kayu Tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan. Peningkatan produktivitas ubi kayu tersebut didukung oleh perawatan yang relatif mudah serta tersedianya pasar yang luas, terutama melalui penyerapan hasil oleh pabrik tapioka di Kabupaten Simalungun maupun luar daerah. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk Sasaran Strategis 1 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan.

Kecamatan-kecamatan dengan produktivitas dan produksi ubi kayu tertinggi yang berkontribusi besar terhadap total produksi dan berperan sebagai sentra ubi kayu Kabupaten Simalungun adalah Kecamatan Bandar dengan total produksi sebesar 15.530 ton, Kecamatan Bandar Masilam dengan total produksi

sebesar 15.285 ton dan Kecamatan Bandar Huluan dengan total produksi sebesar 12.688 ton.



Gambar 4 Pertanaman di Salah Satu Sentra Ubi Kayu yang ada di Kecamatan Bandar Huluan

- **Rerata Produktivitas Bawang Merah**

Komoditi bawang merah memiliki target produktivitas tahun 2025 sebesar 10,83 Ton/Ha dan realisasinya sebesar 16,83 Ton/Ha atau sebesar 155,40% dari targer yang ditetapkan. Dengan demikian, produktivitas bawang merah Tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan secara signifikan. Peningkatan produktivitas bawang merah tersebut didukung oleh penerapan pemupukan berimbang, pemberian bantuan benih unggul, serta ketersediaan alat dan mesin pertanian yang memadai dalam pengolahan lahan. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk Sasaran Strategis 1 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan

Kecamatan-kecamatan dengan produktivitas dan produksi bawang merah tertinggi yang berkontribusi besar terhadap total produksi dan berperan sebagai sentra bawang merah Kabupaten Simalungun adalah Kecamatan Silimakuta dengan total produksi sebesar 4.723 ton, Kecamatan Dolok Pardamean dengan total



produksi sebesar 2.714 ton dan Kecamatan Bandar Huluan dengan total produksi sebesar 2.127 ton.

Gambar 5 Kegiatan Pendropingan Bawang Merah ke kelompok Tani
Di Kecamata Purba

- **Rerata Produktivitas Cabai**

Komoditas cabai memiliki target produktivitas tahun 2025 sebesar 9,61 Ton/Ha dan realisasinya mencapai 19,55 Ton/Ha atau sebesar 203,43% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, produktivitas cabai Tahun 2025 telah melampaui target secara signifikan. Peningkatan produktivitas cabai tersebut didukung oleh penerapan pemupukan berimbang, pemberian bantuan benih unggul, serta ketersediaan alat dan mesin pertanian yang memadai dalam pengolahan lahan. Berdasarkan capaian ini, Sasaran Strategis 1 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasinya telah melampaui target yang direncanakan.

Kecamatan-kecamatan dengan produktivitas dan produksi cabai terkhusus cabai keriting tertinggi yang berkontribusi besar terhadap total produksi dan berperan sebagai sentra cabai keriting Kabupaten Simalungun adalah Kecamatan Purba dengan total produksi sebesar 17.061 ton, Kecamatan Silimakuta dengan total produksi sebesar 15.498 ton dan Kecamatan Pematang Silimakuta dengan total produksi sebesar 7.985 ton.



Gambar 6 Kegiatan Penyerahan bibit cabai merah ke kelompok tani Di Kecamatan Bandar

- **Rerata Produktivitas Jeruk**

Komoditas jeruk memiliki target produktivitas pada tahun 2025 sebesar 26,60 Ton/Ha dan realisasinya mencapai 34,22 Ton/Ha atau sebesar 128,64% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, produktivitas jeruk Tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan. Peningkatan produktivitas jeruk tersebut didukung oleh penerapan pemupukan berimbang, pemberian bantuan bibit unggul, serta ketersediaan alat dan mesin pertanian yang memadai dalam pengolahan lahan. Berdasarkan capaian ini, Sasaran Strategis 1 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan.



Gambar 7 Kegiatan Pemberian bibit jeruk kepada kelompok tani

- **Rerata Produktivitas Sawit (TBS)**

  Komoditas kelapa sawit memiliki target produktivitas pada tahun 2025 sebesar 20.031,12 Kg/Ha dan realisasinya tahun 2025 mencapai 14.215,91 Kg/Ha atau sebesar 70,97% dari target yang ditetapkan. Meskipun realisasi belum mencapai target, produktivitas kelapa sawit pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan bertambahnya pertanaman sawit yang mulai memasuki masa produksi.

b. Rerata Produktivitas Karet

Komoditas karet memiliki target produktivitas tahun 2025 adalah 880,70 Kg/Ha dan realisasinya mencapai 1093,41 Kg/Ha atau sebesar 124,15%. dari target yang ditetapkan. Produktivitas karet Tahun 2025 mengalami peningkatan karena pertanaman karet baru mulai memasuki masa produksi.

c. Rerata Produktivitas Kopi

Komoditas kopi memiliki target produktivitas tahun 2025 sebesar 510,93 Kg/Ha dan realisasinya mencapai 1201,28 Kg/Ha atas sebesar 235,15% dari

target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, produktivitas kopi Tahun 2025 telah melampaui target secara signifikan. Peningkatan produktivitas kopi tersebut terutama didorong oleh pertanaman kopi baru yang mulai memasuki masa produksi, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, pemeliharaan tanaman yang optimal, dan penyediaan benih unggu

d. Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Industri pengolahan di Kabupaten Simalungun didominasi oleh sektor agroindustri yang memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan, berpusat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Sektor utamanya meliputi pengolahan kelapa sawit (oleokimia), minyak nabati, kakao, makanan/roti, serta pengolahan beras organik dan rotan.

Kabupaten Simalungun memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada hilirisasi industri kelapa sawit dan karet, kawasan ini dirancang untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Tabel. 3.30
Industri Pengolahan Kabupaten Simalungun

No	PDRB dan Indeks Implisit	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB atas Dasar harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun (miliar rupiah)	Industri Pengolahan	4.932	5.294	5.480	5.873	6.514

No	PDRB dan Indeks Implisit	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PDRB atas Dasar harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun	Industri Pengolahan	2.791	2.847	2.935	3.005	3.246
3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun	Industri Pengolahan	11,58	11,20	10,49	9,95	10,05
4	PDRB atas Dasar harga Berlaku Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun (persen),	Industri Pengolahan	2,00	2,01	3,07	2,39	8,03
5	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Simalungun Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun	Industri Pengolahan	176,73	185,95	186,75	195,47	200,69
6	Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Simalungun Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun	Industri Pengolahan	6,26	5,22	0,43	4,67	2,67

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Tabel diatas menunjukkan jenis industri pengolahan dari PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan usaha sebesar 6,514 (Miliar), PDRB atas Dasar Harja Konstan 2010 menurut lapangan usaha sebesar 4,246, PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 10,5, PDRB atas Dasar harga Berlaku Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha sebesar 8,03 (Persen) , Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Simalungun Menurut Lapangan Usaha sebesar 200,69 dan Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Simalungun Menurut Lapangan sebesar 2,67.

Selain itu Industri Kecil Menengah juga menopang perkembangan ekonomi di Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan program pelatihan kepada pelaku usaha Industri Kecil Menangah dengan mengadakan pelatihan berupa Pelatihan Wirausaha Baru Puree

Buah dan Olahan Buah Lainnya, Pelatihan "Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wira Usaha", Pelatihan Standarisasi Mutu dan Kemasan, Pelatihan "Rumah Kemasan", Kegiatan FGD "Proses Bisnis dan Kelembagaan", FGD "Akses Pasar dan Kemitraan", FGD "Temu Bisnis dengan IKM".

Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menyediakan fasilitas berupa pameran dagang lokal yang di laksanakan di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dan Kecamatan Girsang Sipanganbolon dan pameran dagang nasional yang dilaksanakan di Kab. Tangerang, DKI Jakarta dan Kab. Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk memperkenalkan produk IKM sehingga mampu untuk meningkatkan kompetisi Pelaku Usaha/Industri Kecil Menengah. Dengan adanya pelatihan dan pameran dagang ini diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM, Produktivas dan daya saing para pelaku Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Simalungun serta diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Simalungun

Tabel 3.31
Daftar IKM Yang Mengikuti Pelatihan Pure Buah dan Olahan Buah Lainnya

NO	Nama Peserta	Kecamatan
1	YAN ADHINATA SIPAYUNG	Bandar
2	SUJONO	Panei Tongah, Panei
3	MUHAMMAD HAZRIL FAQIH	Jawa Maraja, Bah Jambi
4	AI SAIDAH	Bandar Huluan
5	SUSILAWATI	Gunung Maligas
6	ASNAH	Tanah Jawa
7	IGA OKTAVIANY SITORUS	Bandar
8	MARSAWATI	Jawa Maraja, Bah Jambi
9	WAHYUNI	Gunung Maligas
10	CLARA FAGIANSYAH	Bandar
11	TINI IKA SULFIANI	Sidamanik
12	PUTRI FEBRIYANTI	Ujung Padang
13	MELATI	Ujung Padang
14	HETTY SIMBOLON	Girsang Sipangan Bolon
15	ALEXSANDRO Y.S SIRAIT	Bosar Maligas
16	DANIEL PANJAITAN	Bandar

NO	Nama Peserta	Kecamatan
17	MURSYID EKA KURNIAWAN	Tapian Dolok
18	WAHYUDI	Jawa Maraja, Bah Jambi
19	INDAH YANI NASUTION	Bandar
20	SILVI ANGGARAINI	Bandar Huluan
21	TIARA SINAGA	Girsang Sipangan Bolon
22	ETI YULIA NASUTION	Pematang Sidamanik
23	NURUL FADILLA	Bandar
24	DEWI SYNTIA PUTRI	Bandar
25	SUPRAPTI	Tapian Dolok
26	WEGI FEBRIANI	Bandar Huluan
27	RONAULI ARTA SIDABUTAR	Sidamanik
28	PAINEM	Bandar Huluan
29	ROHANA SARAGIH	Panei
30	CHRISTOPER SITOMPUL	Bosar Maligas
31	BAYU LAVENDA	Tapian Dolok
32	PANDU PARGAULAN HASIBUAN	Sidamanik
33	DIAN APRINALDI PAKPAHAN	Girsang Sipangan Bolon
34	DEWI RIANTI	Bandar Huluan
35	PUSMAIDA	Jawa Maraja, Bah Jambi
36	ADISTYA SUCI PRADINA	Bandar
37	TATIK MURGIYANTI	Bandar Masilam
38	YESI SARVILA SARAGIH	Bandar Masilam
39	SRI YULIANI	Bandar Huluan
40	NUR KOMARIAH SARAGIH	Pamatang Raya
41	SITI KHAIRUNNISYAH	Bandar
42	SUSIWIARTI	Pematang Sidamanik
43	HAMIDAH	Pematang Sidamanik
44	DORMUNIKA SIREGAR	Panei
45	JHON POWER SILALAHI	Bandar Masilam
46	LISTON TAMPUBOLON	Panei
47	WARSIH	Bandar Masilam
48	DINA MEI SARI	Bandar
49	PENTI SURYANI	Gunung Malela
50	BONA SIMSON SINAGA	Panei

Sumber: Disperindag, Kab. Simalungun, 2025

Tabel 3.32
Daftar Peserta Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Managemen Wirausaha Puree Buah

NO	NAMA	ALAMAT
1	REYNALDI ABDULLAH BATUBARA	Kecamatan Bandar
2	YAN ADHINATA SIPAYUNG	Kecamatan Bandar
3	IGA OKTAVIANY SITORUS	Kecamatan Bandar
4	DINA MEI SARI	Perdagangan II, Gg. Air Bersih
5	INDAH YANI NASUTION	Kecamatan Bandar
6	NURUL FADILLA	Jl. Rajamin Purba Pasar 1-A
7	SRI YULIANI	Komplek. RS Laras
8	DEWI RIANTI	Naga Jaya I
9	JULIANA DEWI	Pasar I Bahapal
10	PAINEM	Nagori Naga Jaya II
11	AI SAIDAH	Huta I Naga Sopa
12	TATIK MURGIYANTI	Huta IV, Panombeian Baru
13	IMMANUEL AMBARITA	Kec. Pamatang Sidamanik
14	JHON POWER SILALAHI	Bandar Masilam
15	DANIEL PANJAITAN/DESI PANJAITAN	Perdagangan II, Bandar

NO	NAMA	ALAMAT
16	NUR KOMARIAH SARAGIH	Kec. Raya
17	SUPRAPTI	Kec. Tapian Dolok
18	MARSAWATI	Jawa Maraja
19	HAMIDAH	Pematang Sidamanik
20	TINI EKA SULFIANI	Sidamanik
21	WAHYUNI	Gunung Maligas
22	RONAULI A. SIDABUTAR	Sidamanik
23	LISTON TAMPUBOLON	Simpang Raya Dasma, Panei
24	BONA SIMSON SINAGA	Simpang Raya Dasma, Panei
25	SUJONO	Panei Tongah, Panei
26	MURSID EKA KURNIAWAN	Sinaksak, Tapian Dolok
27	SUSILAWATI	Karang Sari, Gunung Maligas
28	CHRISTOPER SITOMPUL	Desa Marihat Tanjung, Kec. Bosar Maligas
29	ALEXSANDRO YUWAWEN SUGATA SIRAIT	Dusun Teladan, Kec. Bosar Maligas
30	BAYU LAVENDA	Parmonangan, Jorlang Hataran
31	SUSIWIARTI	Sait Buttu Saribu
32	NINA AFRIANI BR PURBA	PT. EDI Afd OD
33	ETI YULIA NASUTION	Sait Buttu Saribu
34	PENTI SURIYANI	Kec. Gunung Malela
35	UMYANA	Kec. Pematang Bandar
36	ADISTYA SUCI PRADINA	Pasar IA Perdagangan III
37	HELISTIA RINI	Huta II Landbaw, Bandar
38	ADISTYA SUCI PRADINA	Pasar IA Perdagangan III
39	WARSIH	Panombean Baru, Kec. Bandar Masilam
40	YESI SARVILA SARAGIH	Panombean Baru, Kec. Bandar Masilam
41	WEGI FEBRIANI	Bah Gunung, Kec. Bandar Huluan
42	SILVI ANGGRAINI	Huta 6 Bah Gunung, Kec. Bandar Huluan
43	PUTRI FEBRIYANTI	HUTA I Nagori Riah Naposo, Ujung Padang
44	SILVI ANDINI	HUTA I Nagori Riah Naposo, Ujung Padang
45	CLARA FAGIANSYAH	Pasar IA Perdagangan

Sumber: Disperindag, Kab. Simalungun, 2025

Tabel 3.33
Daftar Peserta Pelatihan Operator Rumah Kemasan

NO	Nama Peserta	Kecamatan
1	Denni Simarmata,S.Pd	Purba
2	Natanael Silalahi,S.Kom	Raya
3	Afriyanti Sidabutar,S.E	Raya
4	Rouli Situmorang,S.Pd	Dolog Masagal
5	Yuli Mariana Malau,A.Md	Raya
6	Endang Sri Putri Damanik,SM	Raya
7	Senna rasria Sipayung,A.Md	Saribudolok
8	Devi Maysyaroh,A.Md	JawaMaraja Bahjambi
9	Guruh Simanungkalit,SH	Siantar
10	Kharitscel Purba,S.AB	Raya
11	Rosmaulina Purba	Raya
12	Rosita Nainggolan,A.Md	Tanah Jawa
13	Rosnaria Sijabat,A.Md	Raya
14	Corri Juni Purba,S.Kom	Siantar
15	Educha Pardede,S.ST	Siantar

NO	Nama Peserta	Kecamatan
16	Rona H Siregar,SE	Siantar
17	Karmedi Saragih,S.Kom	Raya
18	Sonni A Saragih,SP	Raya
19	Lestari Sirait	Siantar
20	Ramasdin Saragih	Raya

Sumber: Disperindag, Kab. Simalungun, 2025

Tabel. 3.34
Daftar Peserta Pelatihan Standarisasi Mutu dan Kemasan

NO	Nama Peserta	Kecamatan
1	CRISTOPEL PURBA	PANEI
2	NURRAYANI	BAHLIRAN
3	NURIDAH DAMANIK	RAYA
4	HENDRA PURBA	RAYA
5	AYU LESTARI SITANGGANG	RAYA
6	ASNAH	TANAH JAWA
7	YULIANA	TANAH JAWA
8	WAHYUNI	GUNUNG MALIGAS
9	SARIANTI	PAMATANG SIDAMANIK
10	SUSI WIARTI	PAMATANG SIDAMANIK
11	HAMIDAH	PAMATANG SIDAMANIK
12	ETI JULIANA NASUTION	PAMATANG SIDAMANIK
13	LISMA SYAHFITRI	BOSAR MALIGAS
14	RONAULI SIDABUTAR	SIDAMANIK
15	KARMEDI SARAGIH	RAYA
16	RIZKI ANANDA	SIANTAR
17	CORRI PURBA	SIANTAR
18	SONNI SARAGIH	RAYA
19	MARSELINA HALOHO	SIANTAR
20	ROSNARIA SARAGIH	RAYA

Sumber: Disperindag, Kab. Simalungun, 2025

e. Sektor Perdagangan

Pada sektor Perdagangan juga merupakan salah satu pilar penyumbang meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2024 LPE Kabupaten Simalungun berada posisi 4,89 sedangkan pada tahun 2025 berada pada posisi 4,74.

Pada tahun 2025 Nilai Investasi di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya Nilai investasi memiliki pengaruh yang

sangat signifikan terhadap **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)** di Kabupaten Simalungun. Investasi berperan sebagai pemicu aktivitas produksi yang kemudian meningkatkan nilai PDRB dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

- Jumlah Investasi Periode Jan s.d Des Tahun 2024: Rp. 9.617.913.353.680,00
- Jumlah Investasi Periode Jan s.d Des Tahun 2025: Rp. 18.102.341.193.224,00
- Realisasi Investasi Periode Jan s.d Desember 2025 : Rp. 18.102.341.193.224,00
  - Target 2025 : 7,10 %
- Realisasi Investasi 2025 :

  Jumlah Investasi 2025 - Jumlah Investasi 2024 x 100 %
  Jumlah Investasi Tahun 2024

  = 18.102.341.193.224,00 - 9.617.913.353.680,00 x 100%
  9.617.913.353.680,00

  =88.21 %
- Capaian Investasi 2025 : 88.21 %

  = 88.21 % / 7,10 % x 100 %

  = 1.242,39 %



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Simalungun, 2025

Tabel 3.35
Daftar Realisasi Investasi PMA dan PMDN Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2025 Kabupaten Simalungun

No	NAMA USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	PERIODE PELAPORAN				JUMLAH
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MAX INTERNATIONAL SUMATERA	PMA	-	-	-	11.500.000	11.500.000
2	PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT	PMA	-	-	-	57.966.200.000	57.966.200.000
3	SURYA ALPINE RENEWABLES	PMA	-	-	15.000.000.000	20.000.000.000	35.000.000.000
4	TELEKOMUNIKAS I SELULAR	PMA	239.551.008	4.932.851.160	11.556.682.837	11.769.192.936	28.498.277.941
5	LEONG AYAMSATU PRIMADONA	PMA	-	-	-	-	-
6	AIR PRODUCTS INDONESIA	PMA	134.537.000	537.720.973	36.545.243.055	-	37.217.501.028
7	AIR PRODUCTS INDONESIA GASES	PMA	48.259.039.565	119.429.189.194	-	18.023.630.124	185.711.858.883
8	ALL COSMOS BIOTEK	PMA	1.407.731.457	862.573.019	-	-	2.270.304.476
9	ALLIANCE CONSUMER PRODUCTS INDONESIA	PMA	147.536.128.960	-	5.522.777.995	-	153.058.906.955
10	BASIC INTERNATIONAL SUMATERA	PMA	60.755.828.863	23.660.864.285	680.348.167.790	3.035.913.323.521	3.800.678.184.459
11	EMERY OLEOCHEMICALS INDONESIA	PMA	-	-	-	-	-
12	EVYAP SABUN INDONESIA	PMA	106.441.875.843	183.466.879.210	483.521.317.197	459.756.872.198	1.233.186.944.448
13	EXCEL LIFE CARE	PMA	-	5.000.000.000	185.000.000.000	2.327.435.165	192.327.435.165
14	GUTHRIE INTERNATIONAL SEI MANGKEI REFINERY	PMA	247.299.276.222	380.916.934.113			628.216.210.339
15	KALTIMEX CCI OILS AND FEED INDONESIA	PMA	96.497.728	83.500.134	79.945.600	14.921.576	274.865.038
16	PTEC RESEARCH AND DEVELOPMENT	PMA	1.573.200.000	12.217.700.000	18.526.000.000	-	32.316.900.000
17	SGF OLEO ASIA	PMA	-	26.948.541.844		3.084.176.126	30.032.717.970
18	SHEEL OIL INDONESIA	PMA	85.517.569.168	78.863.134.485	35.985.895.743		200.366.599.396
19	TANIMAS RESOURCES INTERNATIONAL	PMA	82.308.774.345	55.594.020.726	100.909.378.475	-	238.812.173.546
20	THERMAX INTERNATIONAL INDONESIA	PMA	-	-	-	-	-
21	UNILEVER OLEOCHEMICAL INDONESIA	PMA	2.087.476.593.817	1.553.792.943.342	88.092.323.092	-	3.729.361.860.251
22	WILSON AND HUGHES	PMA	-	-	-	-	-
23	BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE	PMA	-	-	-	-	-
24	EASTERN SUMATRA INDONESIA	PMA	7.218.461.723	6.422.277.461	3.735.305.216	7.735.125.077	25.111.169.477
25	KERASAAN INDONESIA	PMA	3.330.635.250	9.945.970.102	2.188.610.146	2.188.610.146	17.653.825.644
26	JIVA AGRICULTURE INDONESIA	PMA	-	-	-	-	-
27	TIMBERLAND INDUSTRI	PMA	-	-	-	-	-
	RENIKOLA						

No	NAMA USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	PERIODE PELAPORAN				JUMLAH
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	PRIMER ENERGI	PMA	-	-	-	-	-
29	INDO BNK POWER	PMA	-	477.223.465	-	19.370.059	496.593.524
30	AICE SUMATERA INDUSTRY	PMA	-	13.512.613	-	-	13.512.613
31	GREEN ENVIRONMENT MANAGEMENT SERVICES	*PMA*	-	-	*7.161.130.387*	*129.760.147.749*	*136.921.278.136*
32	ECOOILS JAYA INDONESIA	*PMA*	-	*98.451.833.771*	-	-	*98.451.833.771*
33	LEONG HUP JAYAINDO	*PMA*	-	-	-	-	-
34	ALAM SUTERA TERA ENERGI	*PMA*	-	-	-	-	-
35	XLSMART TELECOM SEJAHTERA	*PMA*	-	-	-	-	-
36	HUTAHAEAN	*PMDN*	*10.000.000*	*292.598.810*	-	-	*302.598.810*
37	INDOMARCO PRISMATAMA	*PMDN*	-	-	-	*4.335.667.312*	*4.335.667.312*
38	AGATHA INDAH PERSADA	*PMDN*	*850.000.000*	*450.000.000*	*150.000.000*	*550.000.000*	*2.000.000.000*
39	AGRO MITRA SEJAHTERA	*PMDN*	*4.309.112.640*	-	-	-	*4.309.112.640*
40	ALAMJAYA WIRASENTOSA	*PMDN*	-	-	-	-	-
41	ALLEGRINDO NUSANTARA	*PMDN*	*1.175.135.191*	-	*968.585.476*	*58.979.813*	*2.202.700.480*
42	AYU SEPTA PERDANA	*PMDN*	*450.000.000*	*300.000.000*	*450.000.000*	*400.000.000*	*1.600.000.000*
43	BANGUN TIRTA MEDAN	*PMDN*	*1.728.055.756*	*6.760.789.847*	*7.278.245.995*	*4.032.458.849*	*19.799.550.447*
44	BERSAUDARA SIMALUNGUN ENERGI	*PMDN*	*490.664.316*	*931.469.976*	*130.824.548*	*650.038.820*	*2.202.997.660*
45	BINA SAN PRIMA	*PMDN*	-	-	*4.154.000*	-	*4.154.000*
46	BINA TEHNIK	*PMDN*	-	-	-	*50.000.000*	*50.000.000*
47	CENTRATAMA MENARA INDONESIA	*PMDN*	*10.506.783*	-	-	-	*10.506.783*
48	CIOMAS ADISATWA	*PMDN*	-	-	-	-	-
49	CIPTA NIAGA SEMESTA	*PMDN*	*72.960.000*	*111.527.273*	-	*20.685.000*	*205.172.273*
50	DAMAI INDAH BERSAMA	*PMDN*	-	-	-	*20.000.000*	*20.000.000*
51	DAYA INDAH YASA	*PMDN*	-	*2.881.000*	*1.911.841*		*4.792.841*
52	EUROASIATIC HEAT & POWER SYSTEMS	*PMDN*	-	-	-	-	-
53	FLORA SURYA LESTARI	*PMDN*	-	-	-	-	-
54	GILANG PRATAMA PERSADA	*PMDN*	-	-	-	-	-
55	HARKAT SEJAHTERA	*PMDN*	-	-	-	-	-
56	HOTEL INDONESIA PROPERTI	*PMDN*	*35.308.500*	-	*14.850.000*	-	*50.158.500*
57	INDOJAYA AGRINUSA	*PMDN*	*44.070.000*	*560.200.000*	-	*1.120.452.876*	*1.724.722.876*
58	INDUSTRI NABATI LESTARI	*PMDN*	-	*556.687.933.474*	-	-	*556.687.933.474*
59	INTI BANGUN SEJAHTERA	*PMDN*	-	-	-	-	-
60	INTIJAYA MANDRASA JAYASARI	*PMDN*	-	*926.766.900*	-	-	*926.766.900*
61	JAPFA COMFEED INDONESIA	*PMDN*	*75.983.465*	*25.657.653.628*	*4.445.502.183*	*4.939.910.469*	*36.019.049.745*
62	JASA TIRTA I	*PMDN*	-	-	-	-	-
63	KARYABADI SAMASEJATI	*PMDN*	-	-	-	*70.000.000*	*70.000.000*
64	KAWASAN INDUSTRI NUSANTARA	*PMDN*	-	-	-	-	-
65	LABERSA HUTAHAEAN	*PMDN*	*100.000.000*	*15.000.000*	*250.000.000*	-	*365.000.000*
66	LEMBAH DAMAI NAULI	*PMDN*	*192.792.594*	*10.113.005.274*	*1.733.364.031*	*159.791.370*	*12.198.953.269*
67	MEDAN DISTRIBUSINDOR	*PMDN*	-	*2.617.417.684*	*574.990.990*	*419.089.725*	*3.611.498.399*

No	NAMA USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	PERIODE PELAPORAN				JUMLAH
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AYA						
68	MIDI UTAMA INDONESIA	PMDN	572.030.906	54.255.403	42.519.938	101.303.855	770.110.102
69	MITRA AGUNG SAWITA SEJATI	PMDN	-	-	-	-	-
70	MUTI INDOFOOD LESTARI	PMDN	-	-	-	-	-
71	NIAGATAMA KENCANA	PMDN	2.132.100	857.500.000	17.500.000	46.953.750	924.085.850
72	PANTJA SURYA	PMDN	145.235.767	358.398.652	741.298.174	1.045.183.250	2.290.115.843
73	PATRA JASA	PMDN	19.346.616	35.493.177	36.803.666	63.952.453	155.595.912
74	PERHOTELAN SURYANIAGARA INDAH	PMDN	-	-	-	-	-
75	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	PMDN	96.964.607.408	70.668.696.262	-	532.215.613.872	699.848.917.542
76	PERUSAHAAN PERKEBUNAN INDUSTRI DAN DAGANG MURIDA	PMDN	5.622.285.939.991	-	-	-	5.622.285.939.991
77	PLN NUSANTARA POWER	PMDN	-	-	-	-	-
78	PRIMA SAUHUR LESTARI	PMDN	-	-	-	-	-
79	PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	PMDN	-	-	-	-	-
80	RISET PERKEBUNAN NUSANTARA	PMDN	-	-	-	-	-
81	SABARITHA PERKASA ABADI	PMDN	-	-	-	-	-
82	SOLUSI TUNAS PRATAMA	PMDN	-	-	-	-	-
83	SRI PAMELA MEDIKA NUSANTARA	PMDN	-	-	-	-	-
84	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	PMDN	3.468.766.614	3.516.882.747	715.226.408	1.699.467.198	9.400.342.967
85	SURI TANI PEMUKA	PMDN	35.783.007.852	46.275.036.371	-	-	82.058.044.223
86	TAGOR MANIK	PMDN	-	-	-	-	-
87	TIRTAKENCANA TATAWARNA	PMDN	-	569.563.958	167.044.957	10.240.000	746.848.915
88	TRI CAHAYA SAWIT	PMDN	16.881.135.185	-	-	1.263.900.000	18.145.035.185
89	VINDIA AGRO INDUSTRI	PMDN	1.104.388.400	-	71.796.400	-	1.176.184.800
90	WAHANA TIRTASARI	PMDN	-	-	-	-	-
91	PRIMA MEDICA NUSANTARA	PMDN	-	369.077.891	-	1.186.257.000	1.555.334.891
92	PUPUK INDONESIA NIAGA	PMDN	-	1.000.000	500.000	450.000	1.950.000
93	REJEKI ABADI SAMBOSAR	PMDN	-	-	500.000.000	-	500.000.000
94	RUDOLF V SARAGIH SE.AK, CA., MH.	PMDN	-	1.080.000.000	-	-	1.080.000.000
95	RUMAH BERNEH	PMDN	-	2.070.050.000	-	1.505.050.000	3.575.100.000
96	SINAR TENERA	PMDN	-	150.000.000	-	-	150.000.000
97	TAPIAN NAULI MALAU	PMDN	-	-	-	-	-
98	TRANS SUMATERA REALTY	PMDN	-	-	-	-	-
99	WIRA KREASI USAHA	PMDN	-	-	-	-	-
100	PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA	PMDN	-	6.342.351.167	1.811.253.381	15.002.192.266	23.155.796.814
01	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA	PMDN	-	457.779.179	5.309.447.215	-	65.767.226.394

No	NAMA USAHA	STATUS PENANAMAN MODAL	PERIODE PELAPORAN				JUMLAH
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
102	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA	PMDN	-	-	-	-	-
103	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	PMDN	-	-	94.337.079	-	94.337.079
104	PERTAGAS NIAGA	PMDN	-	-	-	-	-
105	PERTAMINA POWER INDONESIA	PMDN	-	-	-	-	-
106	PERTAMINA POWER INDONESIA	PMDN	-	-	-	-	-
107	KARYA BUDI ABADI	PMDN	-	-	-	-	-
108	KARYA IBUNDA KONSTRUKSI	PMDN	-	1.800.000.000	-	-	11.800.000.000
109	INDOMARCO ADI PRIMA	PMDN	-	3.295.000	-	-	3.295.000
110	HOTEL INDONESIA NATOUR	PMDN	-	-	-	-	-
111	EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V	PMDN	-	-	-	-	-
112	ALTIM DAMAI SEJAHTERA	PMDN	-	3.775.000.000	370.000.000	1.400.000.000	5.545.000.000
113	ANDALAN SEHAT	PMDN	-	-	-	-	-
114	ANUGRAH BENTENG PERKASA	PMDN	-	-	-	7.165.000.000	7.165.000.000
115	ASPALINDO GLOBAL MANDIRI	PMDN	-	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000
116	CIPTA JAYA WOOD	PMDN	-	-	-	10.021.000.000	10.021.000.000
117	FLORINDO MAKMUR	PMDN	-	-	-	2.100.000	2.100.000
118	SAPADIA WISATA	PMDN	-	-	-	80.095.000	80.095.000
119	SETIA TEGUH MANDIRI	PMDN	-	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
120	SIPISO-PISO SOADAMARA	PMDN	-	-	-	50.000.000	50.000.000
121	TOWER BERSAMA	PMDN	-	-	10.304.566.429	5.302.283.216	15.606.849.645
122	SOLUSI MENARA INDONESIA	PMDN	-	-	728.897.602	-	728.897.602
	TOTAL	PMA dan PMDN	8.667.266.881.033	3.315.429.293.570	1.771.086.397.850	4.348.558.620.771	18.102.341.193.224

Sumber: DPMPTSP Kab. Simalungun, 2025

Tabel diatas menampilkan daftan Perusahaan-perusahaan yang menginfestasikan perusahaan dalam kategori Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang tersebar di Kabupaten Simalungun. Perusahaan tersebut begerak di beberapa sektor industri seperti; Perkebunan (kelapa sawit, karet, teh); Pertanian dan hortikultura; Pariwisata (karena dekat dengan Danau Toba) ; Industri pengolahan hasil pertanian ;Energi dan pertambangan; Perdagangan dan jasa

Gambar
Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Utara TW I S.D TW IV Tahun 2025 berdasarkan lokasi

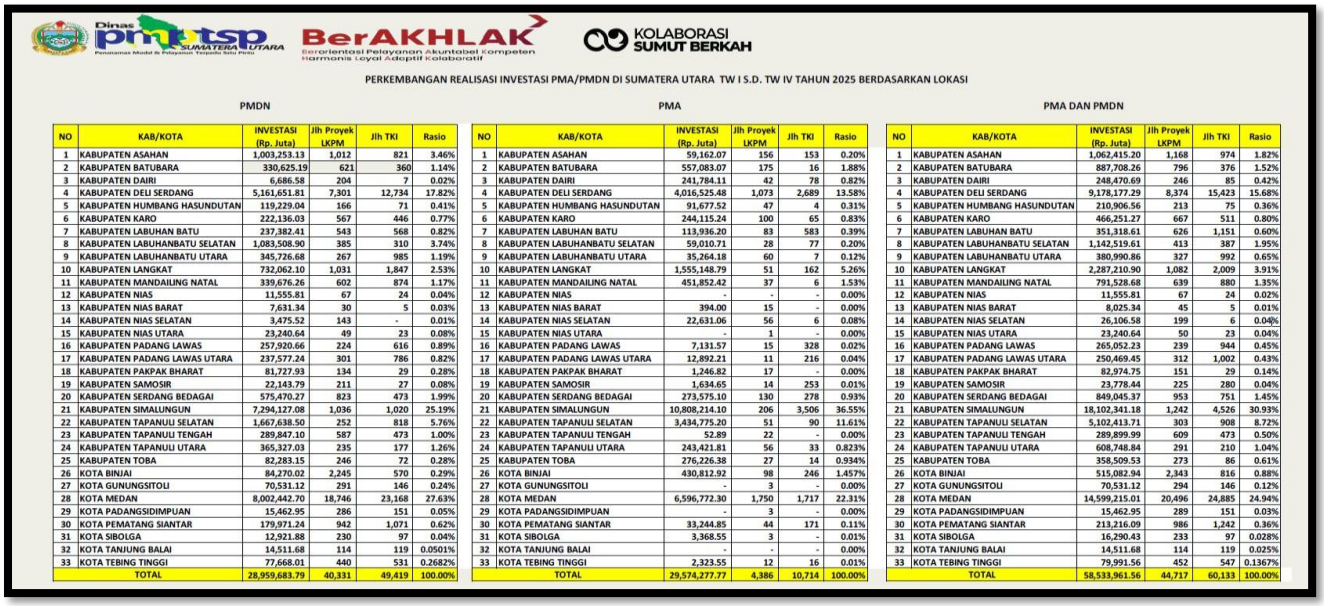

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA/PMDN DI SUMATERA UTARA TW I S.D. TW IV TAHUN 2025 BERDASARKAN LOKASI

PMDN

NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. Juta)	Jlh Proyek LKPM	Jlh TKI	Rasio
1	KABUPATEN ASAHAN	1,003,253.13	1,012	821	3.46%
2	KABUPATEN BATUBARA	330,625.19	621	360	1.14%
3	KABUPATEN DAIRI	6,686.58	204	7	0.02%
4	KABUPATEN DELI SERDANG	5,161,651.81	7,301	12,734	17.82%
5	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	119,229.04	166	71	0.41%
6	KABUPATEN KARO	222,136.03	567	446	0.77%
7	KABUPATEN LABUHAN BATU	237,382.41	543	568	0.82%
8	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	1,083,508.90	385	310	3.74%
9	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	345,726.68	267	985	1.19%
10	KABUPATEN LANGKAT	732,062.10	1,031	1,847	2.53%
11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	339,676.26	602	874	1.17%
12	KABUPATEN NIAS	11,555.81	67	24	0.04%
13	KABUPATEN NIAS BARAT	7,631.34	30	5	0.03%
14	KABUPATEN NIAS SELATAN	3,475.52	143	-	0.01%
15	KABUPATEN NIAS UTARA	23,240.64	49	23	0.08%
16	KABUPATEN PADANG LAWAS	257,920.66	224	616	0.89%
17	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	237,577.24	301	786	0.82%
18	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	81,727.93	134	29	0.28%
19	KABUPATEN SAMOSIR	22,143.79	211	27	0.08%
20	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	575,470.27	823	473	1.99%
21	KABUPATEN SIMALUNGUN	7,294,127.08	1,036	1,020	25.19%
22	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	1,667,638.50	252	818	5.76%
23	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	289,847.10	587	473	1.00%
24	KABUPATEN TAPANULI UTARA	365,327.03	235	177	1.26%
25	KABUPATEN TOBA	82,283.15	246	72	0.28%
26	KOTA BINJAI	84,270.02	2,245	570	0.29%
27	KOTA GUNUNGSITOLI	70,531.12	291	146	0.24%
28	KOTA MEDAN	8,002,442.70	18,746	23,168	27.63%
29	KOTA PADANGSIDIMPUAN	15,462.95	286	151	0.05%
30	KOTA PEMATANG SIANTAR	179,971.24	942	1,071	0.62%
31	KOTA SIBOLGA	12,921.88	230	97	0.04%
32	KOTA TANJUNG BALAI	14,511.68	114	119	0.0501%
33	KOTA TEBING TINGGI	77,668.01	440	531	0.2682%
TOTAL		28,959,683.79	40,331	49,419	100.00%

PMA

NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. Juta)	Jlh Proyek LKPM	Jlh TKI	Rasio
1	KABUPATEN ASAHAN	59,162.07	156	153	0.20%
2	KABUPATEN BATUBARA	557,083.07	175	16	1.88%
3	KABUPATEN DAIRI	241,784.11	42	78	0.82%
4	KABUPATEN DELI SERDANG	4,016,525.48	1,073	2,689	13.58%
5	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	91,677.52	47	4	0.31%
6	KABUPATEN KARO	244,115.24	100	65	0.83%
7	KABUPATEN LABUHAN BATU	113,936.20	83	583	0.39%
8	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	59,010.71	28	77	0.20%
9	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	35,264.18	60	7	0.12%
10	KABUPATEN LANGKAT	1,555,148.79	51	162	5.26%
11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	451,852.42	37	6	1.53%
12	KABUPATEN NIAS	-	-	-	0.00%
13	KABUPATEN NIAS BARAT	394.00	15	-	0.00%
14	KABUPATEN NIAS SELATAN	22,631.06	56	6	0.08%
15	KABUPATEN NIAS UTARA	-	1	-	0.00%
16	KABUPATEN PADANG LAWAS	7,131.57	15	328	0.02%
17	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	12,892.21	11	216	0.04%
18	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	1,246.82	17	-	0.00%
19	KABUPATEN SAMOSIR	1,634.65	14	253	0.01%
20	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	273,575.10	130	278	0.93%
21	KABUPATEN SIMALUNGUN	10,808,214.10	206	3,506	36.55%
22	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	3,434,775.20	51	90	11.61%
23	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	52.89	22	-	0.00%
24	KABUPATEN TAPANULI UTARA	243,421.81	56	33	0.823%
25	KABUPATEN TOBA	276,226.38	27	14	0.934%
26	KOTA BINJAI	430,812.92	98	246	1.457%
27	KOTA GUNUNGSITOLI	-	3	-	0.00%
28	KOTA MEDAN	6,596,772.30	1,750	1,717	22.31%
29	KOTA PADANGSIDIMPUAN	-	3	-	0.00%
30	KOTA PEMATANG SIANTAR	33,244.85	44	171	0.11%
31	KOTA SIBOLGA	3,368.55	3	-	0.01%
32	KOTA TANJUNG BALAI	-	-	-	0.00%
33	KOTA TEBING TINGGI	2,323.55	12	16	0.01%
TOTAL		29,574,277.77	4,386	10,714	100.00%

PMA DAN PMDN

NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. Juta)	Jlh Proyek LKPM	Jlh TKI	Rasio
1	KABUPATEN ASAHAN	1,062,415.20	1,168	974	1.82%
2	KABUPATEN BATUBARA	887,708.26	796	376	1.52%
3	KABUPATEN DAIRI	248,470.69	246	85	0.42%
4	KABUPATEN DELI SERDANG	9,178,177.29	8,374	15,423	15.68%
5	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	210,906.56	213	75	0.36%
6	KABUPATEN KARO	466,251.27	667	511	0.80%
7	KABUPATEN LABUHAN BATU	351,318.61	626	1,151	0.60%
8	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	1,142,519.61	413	387	1.95%
9	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	380,990.86	327	992	0.65%
10	KABUPATEN LANGKAT	2,287,210.90	1,082	2,009	3.91%
11	KABUPATEN MANDAILING NATAL	791,528.68	639	880	1.35%
12	KABUPATEN NIAS	11,555.81	67	24	0.02%
13	KABUPATEN NIAS BARAT	8,025.34	45	5	0.01%
14	KABUPATEN NIAS SELATAN	26,106.58	199	6	0.04%
15	KABUPATEN NIAS UTARA	23,240.64	50	23	0.04%
16	KABUPATEN PADANG LAWAS	265,052.23	239	944	0.45%
17	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	250,469.45	312	1,002	0.43%
18	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	82,974.75	151	29	0.14%
19	KABUPATEN SAMOSIR	23,778.44	225	280	0.04%
20	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	849,045.37	953	751	1.45%
21	KABUPATEN SIMALUNGUN	18,102,341.18	1,242	4,526	30.93%
22	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	5,102,413.71	303	908	8.72%
23	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	289,899.99	609	473	0.50%
24	KABUPATEN TAPANULI UTARA	608,748.84	291	210	1.04%
25	KABUPATEN TOBA	358,509.53	273	86	0.61%
26	KOTA BINJAI	515,082.94	2,343	816	0.88%
27	KOTA GUNUNGSITOLI	70,531.12	294	146	0.12%
28	KOTA MEDAN	14,599,215.01	20,496	24,885	24.94%
29	KOTA PADANGSIDIMPUAN	15,462.95	289	151	0.03%
30	KOTA PEMATANG SIANTAR	213,216.09	986	1,242	0.36%
31	KOTA SIBOLGA	16,290.43	233	97	0.028%
32	KOTA TANJUNG BALAI	14,511.68	114	119	0.025%
33	KOTA TEBING TINGGI	79,991.56	452	547	0.1367%
TOTAL		58,533,961.56	44,717	60,133	100.00%

Sumber: DPMPTSP Kab. Simalungun, 2025

e. Kontribusi PDRB Kab/Kota

Tabel 3.36
Realisasi capaian Kinerja Indikator Kontribusi PDRB Kab/Kota Sumatera Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 3: Dampingi							
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,170	5,23	101%	Sangat Memuaskan

Tabel 3.37
Kontribusi PDRB Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
1	Nias	0,46
2	Mandailing Natal	1,78
3	Tapanuli Selatan	1,91
4	Tapanuli Tengah	1,18
5	Tapanuli Utara	0,97
6	Toba Samosir	0,87
7	Labuhan Batu	4,43
8	Asahan	5,1

No	Kabupaten/Kota	Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
9	Simalungun	5,23
10	Dairi	1,1
11	Karo	2,46
12	Deli Serdang	13,1
13	Langkat	5,5
14	Nias Selatan	0,78
15	Humbang Hasundutan	0,71
16	Pakpak Bharat	0,15
17	Samosir	0,53
18	Serdang Bedagai	3,73
19	Batu Bara	4,15
20	Padang Lawas Utara	1,58
21	Padang Lawas	1,66
22	Labuhan Batu Selatan	3,73
23	Labuhan Batu Utara	3,2
24	Nias Utara	0,41
25	Nias Barat	0,22
26	Kota Sibolga	0,61
27	Kota Tanjung Balai	1,06
28	Kota Pematang Siantar	1,49
29	Kota Tebing Tinggi	0,67
30	Kota Medan	28,53
31	Kota Binjai	1,34
32	Kota Padangsidimpuan	0,74
33	Kota Gunungsitoli	0,62

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.38
Realisasi capaian kinerja indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 3: Dampingi							
8	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12	4,48	114%	-

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap total jumlah angkatan kerja. Secara Hafiah TPT memberikan gambaran mengenai seberapa besar porsi tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja atau menunjukkan adanya penawaran tenaga kerja yang tidak termanfaatkan secara maksimal, **semakin kecil** angka Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT), maka kondisinya **semakin baik.** Pada tahun angka TPT berada pada posisi 4,48% dari target yang ditetapkan sebesar 5,12% sehingga capaiann kinerja dari Indikator TPT adalah sebesar 114%.

Tabel 3.39
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT[2] *Unemployment Rate-UR*[2]	%	5,51	5,35	5,17	4,48

Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Standar Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang berada dalam kondisi berikut:

- **Sedang mencari pekerjaan**: Mereka yang aktif melamar atau mencari peluang kerja.
- **Sedang mempersiapkan usaha**: Mereka yang dalam proses membangun bisnis sendiri.
- **Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan**: Kelompok yang sudah putus asa dalam mencari kerja.
- **Sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai**: Mereka yang telah diterima bekerja namun masih menunggu waktu mulai aktif

Tabel 3.40
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kab/Kota
di Sumatera Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	TPT/*UR*			
	Feb *Feb* 2024	Agt *Aug* 2025	Feb *Feb* 2024	Agt *Aug* 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/*Regency*				
01 Nias	...	...	2,10	2,08
02 Mandailing Natal	...	...	7,22	7,18
03 Tapanuli Selatan	...	...	3,41	3,35
04 Tapanuli Tengah	...	...	7,45	7,21
05 Tapanuli Utara	...	...	1,21	NA
06 Toba	...	...	1,09	1,00
07 Labuhanbatu	...	...	5,90	5,53
08 Asahan	...	...	5,94	5,46

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	TPT/*UR*			
	Feb *Feb* 2024	Agt *Aug* 2025	Feb *Feb* 2024	Agt *Aug* 2025
09 Simalungun	...	...	5,17	4,48
10 Dairi	...	...	1,43	1,21
11 Karo	...	...	2,40	1,93
12 Deli Serdang	...	...	8,02	7,69
13 Langkat	...	...	6,08	5,85
14 Nias Selatan	...	...	3,03	2,98
15 Humbang Hasundutan	...	...	0,92	NA
16 Pakpak Bharat	...	...	0,97	0,91
17 Samosir	...	...	0,89	0,87
18 Serdang Bedagai	...	...	4,88	4,31
19 Batu Bara	...	...	5,75	5,44
20 Padang Lawas Utara	...	...	3,99	3,73
21 Padang Lawas	...	...	5,47	5,03
22 Labuhanbatu Selatan	...	...	3,24	3,19
23 Labuhanbatu Utara	...	...	4,60	4,21
24 Nias Utara	...	...	2,82	2,40
25 Nias Barat	...	...	1,00	0,97
Kota/*Municipality*				
71 Sibolga	...	...	6,52	6,44
72 Tanjungbalai	...	...	4,08	3,81
73 Pematangsiantar	...	...	8,00	7,74
74 Tebing Tinggi	...	...	6,18	5,99
75 Medan	...	...	8,13	7,99
76 Binjai	...	...	5,44	5,37
77 Padang Sidempuan	...	...	7,17	7,00
78 Gunungsitoli	...	...	3,30	3,29
Sumatera Utara	**5,10**	**5,05**	**5,60**	**5,32**

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

Tabel 3.41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2024 dan 2025

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	TPAK/*LFPR*			
	Feb *Feb* 2024	Agt *Aug* 2025	Feb *Feb* 2024	Agt *Aug* 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/*Regency*				
01 Nias	...	...	82,45	77,37
02 Mandailing Natal	...	...	64,42	71,49
03 Tapanuli Selatan	...	...	75,68	75,35
04 Tapanuli Tengah	...	...	75,72	77,51
05 Tapanuli Utara	...	...	83,69	82,91
06 Toba	...	...	82,57	78,31
07 Labuhanbatu	...	...	65,46	66,21
08 Asahan	...	...	67,64	69,12
09 Simalungun	...	...	71,31	74,52
10 Dairi	...	...	83,80	83,24
11 Karo	...	...	84,13	86,04
12 Deli Serdang	...	...	67,57	70,13
13 Langkat	...	...	76,30	70,81
14 Nias Selatan	...	...	78,83	78,78
15 Humbang Hasundutan	...	...	86,52	87,00
16 Pakpak Bharat	...	...	85,43	87,28
17 Samosir	...	...	85,59	84,80
18 Serdang Bedagai	...	...	67,75	72,88
19 Batu Bara	...	...	72,01	70,31
20 Padang Lawas Utara	...	...	73,01	76,19
21 Padang Lawas	...	...	77,52	78,89

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*		TPAK/*LFPR*			
		Feb *Feb*	Agt *Aug*	Feb *Feb*	Agt *Aug*
		2024	2025	2024	2025
22	Labuhanbatu Selatan	...	...	71,92	69,62
23	Labuhanbatu Utara	...	...	64,87	73,40
24	Nias Utara	...	...	79,70	78,91
25	Nias Barat	...	...	81,18	82,60
Kota/*Municipality*					
71	Sibolga	...	...	70,83	69,10
72	Tanjungbalai	...	...	69,57	73,02
73	Pematangsiantar	...	...	71,82	73,73
74	Tebing Tinggi	...	...	66,48	71,77
75	Medan	...	...	66,44	65,66
76	Binjai	...	...	64,22	64,86
77	Padang Sidempuan	...	...	68,53	69,78
78	Gunungsitoli	...	...	71,12	71,14
Sumatera Utara		**70,30**	**70,13**	**71,36**	**72,29**

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan IM Japan unuk melakukan pelatihan magang Pada tahun 2025 telah melakukan pelatihan kepada pencari kerja usia produktif, beberapa pelatihan magang diantaranya:

- ❖ pemagangan ke luar negeri (Jepang) bekerjasama dengan IM JAPAN dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang (gelombang I : 8 peserta dan gelombang II : 21 peserta).
- ❖ Pelatihan produktivitas selama 5 hari dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.42
Rekapitulasi Data Daftar Pemagangan Luar Negeri Ke Jepang
Program Kerjasama Dengan Im Japan Tahun 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tgl. lahir	NIK	Asal Sekolah	Alamat	Kecamatan	No Hp/WA	No Rekomendasi	Tgl Rekomendasi
Gelombang I										
1	Renaldi Firts Boy Panjaitan	Laki-Laki	Bandar Rakyat, 23 Juli 2004	1208232307040005	SMK Abdi Sejati, Kerasaan I	Huta I Nagori Bandar Rakyat	Bandar	081528554832	500.15.6.2/1/2025	17 Februari 2025
2	Andreas Sidabutar	Laki-Laki	Manik Hataran, 15 November 2006	1208091511060002	SMK Negeri 2 Pematangsiantar	Manik Hataran	Sidamanik	082275430808	500.15.6.1/2/2025	6 Maret 2025
3	Edowan Sahputra Saragih	Laki-Laki	Bulu Pange, 9 Juli 2006	1208260907060001	MA Swasta Melati Pematangsiantar	Huta Saing	Dolok Silou	089513202455	500.15.6.2/3/2025	7 Maret 2025
4	Natanael Sijabat	Laki-Laki	Jakarta, 12 Februari 2004	3175071202040008	SMK Negeri 1 Jorlang Hataran	Ujung Bondar	Dolok Panribuan	085368411262	500.15.6.2/4/2025	7 Maret 2025
5	Panca Audica Lubis	Laki-Laki	Bukit Rejo, 24 September	1208092409010002	SMA Swasta Kartika I-	Bukit Rejo	Sidamanik	085277820241	500.15.6.2/5/2025	7 Maret 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tgl. lahir	NIK	Asal Sekolah	Alamat	Kecamatan	No Hp/WA	No Rekomendasi	Tgl Rekomendasi
			2001		4 Pematang siantar					
6	Hotrotuahman Saragih	Laki-Laki	Bosi Sinombah, 15 November 2005	1208261511050002	SMA Negeri 1 Delitua, Kab. Deli Serdan	Bosi Sinombah	Dolok Silou	085837443808	500.15.6.2/7/2025	25 Maret 2025
7	David Afrizal Tarigan	Laki-Laki	Malopot, 24 September 2005	1208172409050001	MK Negeri 3 Pematang siantar	Huta Malopot	Dolok Batu Nanggar	083197341192	500.15.6.2/8/2025	26 Maret 2025
8	Alpin Karsen Sinaga	Laki-Laki	Bah Torop, 31 Oktober 2005	1208053110050002	SMK Swasta GKPI 3 Pematang siantar	Huta Bah Torop	Panombeian Pane	083848192187	500.15.6.2/9/2025	26 Maret 2025
Gelombang II										
1	Rajael Sitepu	Laki-Laki	Kabanjahe, 03 April 2005	1208260304050002	SMKN 4 Medan	Nagori Bawang	Dolok Silou	083857895894	500.15.6.1/10/2025	23 Juli 2025
2	Fazly Hikmawan	Laki-Laki	Marjandi, 22 Juni 2001	1208052206010002	MAN 1 Panombeian Panei	Marjandi Pondok Jeruk	Panimbeian Pane	0895367768000	500.15.6.2/11/2025	23 Juli 2025
3	Aldi Franciskus Sihombing	Laki-Laki	Tanjung Ledong, 15 Maret 2005	1208111503050004	SMK Swasta Teladan Tanah Jawa	Muara Mulia	Tanah Jawa	081536202730	500.15.6.2/12/2025	4 Agustus 2025
4	Muhammad Syahbani Siahaan	Laki-Laki	Tanjung Ledong, 15 Maret 2005	1208113108070001	SMK Swasta Nusantara Tanah	Muara Mulia	Tanah Jawa	085762045387	500.15.6.2/13/2025	4 Agustus 2025
5	Lukas Ebennezer Panjaitan	Laki-Laki	Simalungun, 12 Desember 2005	1208111212050004	SMA Swasta Pelita Pematang siantar	Muara Mulia	Tanah Jawa	081362217808	500.15.6.2/14/2025	4 Agustus 2025
6	Jeri Ginting	Laki-Laki	Bawang, 14 April 2004	1208261404040002	SMK Swasta Dharma Bakti 2 Meda	Bawang	Dolok Silou	085272282201	500.15.6.2/15/2025	13 Agustus 2025
7	Brema Ekin Jorenta Peranginangin	Laki-Laki	Bawang, 20 Desember 2005	1208262012050002	SMA Swasta GBKP Kabanjahe	Bawang	Dolok Silou	081397409022	500.15.6.2/16/2025	13 Agustus 2025
8	Edowan Sahputra Saragih	Laki-Laki	Bulu Pange, 9 Juli 2006	1208260907060001	SMA Swasta Melati Pematang siantar	Huta Saing	Dolok Silou	089513202455	500.15.6.2/17/2025	13 Agustus 2025
9	Bayu Josua Perdana Sidabalok	Laki-Laki	Gunung Bayu, 11 Juni 2007	1208081108070001	SMKN 2 Pematang sianta	Gunung Bayu	Bosar Maligas	083850342610	500.15.6.2/18/2025	13 Agustus 2025
10	Fransisko Mulia Sitorus	Laki-Laki	Mariah Bandar, 07 September 2006	1208210709060004	MK Abdi Sejati, Kerasaan I	Mariah Bandar	Pematang Bandar	08388684122	500.15.6.2/19/2025	13 Agustus 2025
11	Natanael Sijabat	Laki-Laki	Jakarta, 12 Februari 2004	3175071202040008	SMK Negeri 1 Jorlang Hataran	Ujung Bondar	Dolok Panribuan	085368411262	500.15.6.2/20/2025	19 Agustus 2025
12	Rafli Ardiansyah Batubara	Laki-Laki	Binjai, 16 Mei 2007	1208241605070002	MK N 1 Bandar Masilam	Pasar Baru	Bandar Masilam	082275270171	500.15.6.2/21/2025	22 Agustus 2025
13	Boaz Aldion Silaban	Laki-Laki	Tanjung Saribu, 14 Mei 2003	1208201405030001	SMK Swasta HKBP Pematang siantar	Tanjung Saribu	Dolok Pardamean	082278029263	500.15.6.2/22/2025	22 Agustus 2025
14	Royen Kuasa Matondang	Laki-Laki	Afd V Gunung Bayu, 26 Agustus 2006	1208082608060002	SMA N 1 Bandar	Gunung Bayu	Bosar maligas	081262438465	500.15.6.2/23/2025	22 Agustus 2025
15	Juan Prido Purba	Laki-Laki	Puli Buah, 29 Januari 2006	1208072901060001	SMAN 1 Raya Kahean	Puli Buah	Raya Kahean	085135229786	500.15.6.2/25/2025	22 Agustus 2025
16	Daryadi Paulus Damanik	Laki-Laki	Manik Hataran, 30 Juli 2006	1208093006060002	MA Swasta Santo Thomas 3 Medan	Manik Hataran	Sidamanik	08315263248	500.15.6.2/27/2025	22 Agustus 2025
17	Edo Rikardo Purba	Laki-Laki	Puli Buah, 15 Maret 2004	1208071503040001	SMAN 1 Raya Kahea	Puli Buah	Raya Kahean	085951632190	500.15.6.2/28/2025	22 Agustus 2025
18	Joy Samri Sinaga	Laki-Laki	Sinondang, 24 Mei 2006	1208142905060001	SMA N 1 Silimakuta	Hinalang	Purba	085762886198	500.15.6.2/29/2025 2	26 Agustus 2025
19	Alpin Karsen Sinaga	Laki-Laki	Bah Torop, 31 Oktober 2005	1208053110050002	SMK Swasta GKPI 3 Pematang	Huta Bah Torop	Panombeian Pane	082191953270	500.15.6.2/30/2025	26 Agustus 2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat, Tgl. lahir	NIK	Asal Sekolah	Alamat	Kecamatan	No Hp/WA	No Rekomendasi	Tgl Rekomendasi
					sianta					
20	Stanlaytua Parningotan Nababan	Laki-Laki	Tangerang, 17 Maret 2007	1404091703070001	SMK Swasta GKPS 2 Pematang siantar	Urung Purba	Purba	081264540686	500.15.6.2/31/2025	28 Agustus 2025
21	Adriel Geovanni Samosir	Laki-Laki	Bukit Hataran, 30 Agustus 2006	1208093008060001	SMK N 1 Pematang siantar	Manik Hataran	Sidamanik	082276908237	500.15.6.2/32/2025	28 Agustus 2025

Sumber: Dinas Ketenagakerjaa Kab. Simalungun, 2025

Tabel 3.43
Rekapitulasi Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Di Kabupaten Simalungun Tahun 2025

No	Nama	Nama Perusahaan/Instansi
1	BENTHON R. SINAGA	PT. LABERSA HUTAHAEAN
2	SHELLY HUTAEAN	PT. LABERSA HUTAHAEAN
3	MUHAMMAD BADRA HARAHAP	PT. TIRTABUMI MEDAN PERKAS
4	DINI FADILA HARDANI	PT. TIRTABUMI MEDAN PERKAS
5	SUZANNA EVY ROSMERI DAMANIK	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
6	DINA HARTATI PURBA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
7	GILANG CAKRA RAHDANA	PABRIK KELAPA SAWIT HBM
8	RUSLAN PURBA	PABRIK KELAPA SAWIT HBM
9	WILLU H. SILABAN	PT. HUTAHAEAN PABRIK TAPIOKA PERDAGANGAN
10	HARA RISKY HUTAHAEN	PT. HUTAHAEAN PABRIK TAPIOKA PERDAGANGAN
11	ADE IRAWAN	PTPN IV DOLOK SINUMBAH
12	HAJARUL	PTPN IV DOLOK SINUMBAH
13	BONUS SINAGA	PT. INDUSTRI NABATI LESTARI (INL)
14	DIAH FIKA SATRIA	PT. INDUSTRI NABATI LESTARI (INL)
15	ANDA ADI UTAMA	SIPEF
16	ELSA SARISKA MANIK	SIPEF
17	SYAHRIL RAMDANI	PKS SEI MANGKEI
18	CHANDRA WARMAN SARAGIH	PKS SEI MANGKEI
19	ZULFAN ANSHARI	PT. KINRA
20	RONNI ABDURRAHMAN	PT. KINRA

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kab. Simalungun, 2025

2. Perbandingan Realisai Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan usaha dan kegiatan ekonomi lokal tahun 2025 dengan Beberapa tahun Terakhir

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi local tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Tahun		
				2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
3	Meningkatnya	Tingkat Kemiskinan	%	8.26	7.87	7.72	7,57	6,91	109%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Tahun		
				2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
4	Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Gini Rasio	Rasio	0.2620	2.950	0.2950	0,290	0,230	126%
5		PDRB Perkapita	Juta Rp	47.285	52.23	57.6	58,3	60,17	103%
6		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68	5,07	4.89	5,37	4,73	88%
7		Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	4,93	4,99	5,14	5,170	5,23	101%
8		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,17	5,51	5,17	5,12	4,48	114%

3. Perbandingan antara Realisasi Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan usaha dan kegiatan ekonomi lokal tahun 2025 dengan target Akhir RPJMD Tahun 2029

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Tingkat Kemiskinan	%	6,91	5,95	86% Kolom (6:5) x 100%
2		Gini Rasio	Rasio	0,230	0,279	121% Kolom (6:5) x 100%
3		PDRB Perkapita	Juta Rp	60,17	149,46	40% Kolom (5:6) x 100%
4		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	5,47	86% Kolom (5:6) x 100%
5		Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,23	5,175	101% Kolom (5:6) x 101%
6		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	4,77	106% Kolom (6:5) x 100%

Analisis Perbandingan capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD Tahun 2029

- **Tingkat Kemiskinan**

  Pada tahun 2025 realisasi Indikator Tingkat Kemiskinan berada pada angka 6,91% sedangkan target akhir RPJMD yang akan disasar adalah 5,95% sehingga capaian tiingkat kemajuan adalah sebesar 86%, capain ini di peroleh dengan membandingkan Target RPJMD dengan Realisasi

Tahun 2025. Pemerintah Terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan beberapa program seperti program masyarakat produktif, pemberian bantuan social dan Pendidikan gratis bagi siswa sekolah.

- **Gini rasio**

  Gini rasio kabupaten Simalungun tahun 2025 adalah sebesar 0,230 dan target yang akan disasar pada akhir RPJMD tahun 2029 adalah sebesar 0,279 sehingga capainnya adalah sebesar 121%, capaian ini diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi kinerja.

- **PDRB Perkapita**

  Kabupaten Simalungun menargetkan target PDRB perkapita pada akhir periode RPJMD tahun 2029 sebesar 149,46 (juta) sedangkan realisasi kinerja dari inikator ini untuk tahun 2025 adalah sebesar 60,17 (juta) sehingga capaiannya dari indakator tersebut terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 40%. Pemerintah terus menggiatkan lapangan usaha dengan menargetkan usaha mikro di masyarakat.

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

  Laju Petumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 adalah sebesar 4,73% dengan capaian tingkat kemajuan terhadap akhir renstra adalah sebesar 86% dari target yang akan di sasar pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 5,47%. Pemerintah Kabupaten Simalungun terus meningkatkan iklim investasi yang sehat di Kawasan Kabupaten Simalungun baik yang berada di KEK Sei Mangkei dan juga peningkatan sektor IKM mikro dan pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian.

- **Kontribusi PDRB Kab/Kota**

  Pemerintah Kabupaten Simalungun pada akhir periode RPJMD menargetkan Kontribusi PDRB Kab/Kota sebesar

5,175%. Kemudian untuk realisasi yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar 5,23% dengan tingakat kemajuan sebesar 101%. Pemerintah Kabupaten Simalungun terus meningkatkan kualitas iklim imvestasi yang sehat sehingga kontribusi PDRB Kab/Kota juga semakin meningkat dari tahun ke-tahun.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

  Angka Tingkat penangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 adalah sebesaru 4,48% sedangkan target yang akan disasar pada akhir periode RPJMD Tahun 2029 adalah sebesar 4,77 sehingga tingkat kamajuan indikator tersebut adalah sebesar 106%, Pemerintah terus menekan angka penagngguran sehingga diharapkan angka tersebut bisa mencapai target dari RPJMD tersebut. Beberapda program yang dilakukan oleh selain pertumbuhan ekonomi yang membaik Pemerintah Kabupaten Simalungun seperti Vokasi dan Pelatihan bagi Angkatan kerja produktif, dukungan.

4. Perbandingan antara Realisasi Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan usaha dan kegiatan ekonomi lokal tahun 2025 dengan Standar Provinsi.

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi Sumatera Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Standar Provinsi Sumatera Utara	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	Tingkat Kemiskinan	%	6,91	**7,24**	**95%** Kolom (5:6) x 100%
2		Gini Rasio	Rasio	0,230	**0,283**	**81%** Kolom (5:6) x 100%
3		PDRB Perkapita	Juta Rp	60,17	**78,31**	**76%** Kolom (5:6) x 100%
4		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	**4,53**	104% Kolom (5:6) x 100%
5		Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,23	-	-
6		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,48	**5,32**	**84%** Kolom (5:6) x 100%

5. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi local dengan standar provinsi.

- **Tingkat Kemsikinan**

Tingkat capaian antara Penduduk Miskin Kabupaten Simalungun terhadap Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 95% dengan membandingkan Tingkat Kemsikinan Kabupaten Simalungun sebesar 6,91% dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,24%, persentase penduduk miskin Kabupaten Simalungun dengan beberapa Kabupaten Kota lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.47
Persentase Penduduk Miskin
Manurut Kab/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2025

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*		Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*			
		Maret *March*		September *September*	
		2024	2025	2024	2025
	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kabupaten/*Regency*					
01	Nias	14,89	14,51	...	...
02	Mandailing Natal	8,69	7,91	...	...
03	Tapanuli Selatan	6,92	6,16	...	...
04	Tapanuli Tengah	11,80	11,03	...	...
05	Tapanuli Utara	8,21	7,47	...	...
06	Toba	8,07	7,21	...	...
07	Labuhanbatu	7,84	7,37	...	...
08	Asahan	8,12	7,18	...	...
09	Simalungun	7,72	6,91	...	...
10	Dairi	7,10	6,98	...	...
11	Karo	7,37	6,66	...	...
12	Deli Serdang	3,44	3,11	...	...
13	Langkat	9,04	8,42	...	...
14	Nias Selatan	16,32	16,16	...	...
15	Humbang Hasundutan	8,44	7,80	...	...
16	Pakpak Bharat	6,87	6,40	...	...
17	Samosir	11,63	10,79	...	...
18	Serdang Bedagai	6,97	6,18	...	...
19	Batu Bara	10,94	10,10	...	...
20	Padang Lawas Utara	8,97	8,04	...	...
21	Padang Lawas	7,87	7,32	...	...
22	Labuhanbatu Selatan	7,73	6,80	...	...
23	Labuhanbatu Utara	8,98	8,42	...	...
24	Nias Utara	21,50	20,79	...	...
25	Nias Barat	22,68	22,47	...	...
Kota/*Municipality*					
71	Sibolga	11,39	10,28	...	...
72	Tanjungbalai	11,97	10,67	...	...

73	Pematangsiantar	7,20	6,24	...	...
74	Tebing Tinggi	8,79	8,74	...	...
75	Medan	7,94	7,25	...	...
76	Binjai	4,75	4,71	...	...
77	Padangsidimpuan	6,23	5,61	...	...
78	Gunungsitoli	14,72	13,85	...	...
	Sumatera Utara	**7,99**	**7,36**	**7,19**	**7,24**

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

- **Gini Rasio**

  Faktor utama yang menyebabkan rendahnya dan terus menurunnya **Gini Ratio Sumatera Utara dan Juga Kabupaten Simalungun** adalah kombinasi antara kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan struktur sosial-ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025 Gini Rasio Kabupaten Simalungun berada pada posisi 0,230 dan Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi 0,283. Menurunnya angka ini juga di sebabkan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

- **PDRB Perkapita**

  Tingkat persentase capaian PDRB Perkapita antara Kabupaten Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 76%, angka ini diperoleh dengen membandingkan PDRB Perkapita Kabupaten Simalungun sebesar 60,17 (Juta) dengan PDRB perkapita Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,31 (Juta). Meskipun Kabupaten Simalungun mengalami kenaikan, angkanya masih berada di bawah daerah-daerah pusat industri dan perkebunan besar lainnya di Sumatera Utara:

  - **Labuhanbatu Utara**: Mencapai **Rp89,5 juta** per kapita (2024).
  - **Labuhanbatu**: Mencapai **Rp89,06 juta** per kapita (2024).
  - **Deli Serdang**: Sekitar **Rp68,92 juta** per kapita (2024)

- **LPE**

  Berdasarkan Data Simalungun Dalam Angka Tahun 2025 Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi terjadi pada Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 5,36% pada Tahun 2024. Laju pertumbuhan PDRB terkecil yaitu pada Kota Tebing Tinggi sebesar 3,37%. LPE Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 4,73% sedangkan LPE Sumatera Utara tahun 2025 adalah sebesar 4,53 dengan capaian LPE Kabupaten Simalungun Terhadapt LPE Sumatera Utara adalah sebesar 104%.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

  Angkat TPT Kabupaten Simalungun tahun 2025 adalah sebesar 4,48% sedangkan TPT Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 5,32% dengan tingakat capaian dari perbandingan kedua realsiasi tersebut adalah sebesar 84%. Berikut ditampilkan data perbandingan TPT Kabupaten Kota di sekitar Kabupaten Simalungun

Tabel 3.48
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab/Kota di sekitar Kab. Simalungun

Dalam hal pengangguran, angka yang **lebih rendah** berarti lebih baik.

No	Wilayah	TPT 2025 (%)	Keterangan
1	**Sumatera Utara**	**5,32%**	Rata-rata Provinsi
2	**Kab. Simalungun**	**4,48%**	Sedikit di atas rata-rata provinsi
3	Kota Pematangsiantar	8,20% (Tahun 2024)	Jauh lebih tinggi (khas daerah perkotaan)
4	Kab. Deli Serdang	7,65% (Tahun 2024)	Tinggi (pusat industri/urban)
5	Kab. Karo	2,15% (Tahun 2024)	Sangat rendah (dominasi sektor pertanian intensif)

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

6. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Perbandingan antara Realisasi Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan usaha dan kegiatan ekonomi lokal tahun 2025

- **Tingkat Kemiskinan**

  Menurunnya angkan kemiskinan di Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari penguatnya sekotr

PDRB yang merupakan tulang punggung perekonomian, selain itu Bupati Simalungun telah membentuk **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)** melalui SK Bupati Nomor 922 Tahun 2025 untuk mempertajam strategi pengentasan kemiskinan. Fokus utamanya meliputi;

- **Pengurangan Beban Pengeluaran**: Melalui subsidi dan pelayanan dasar gratis seperti kesehatan dan administrasi kependudukan.
- **Peningkatan Pendapatan**: Melalui pemberdayaan UMKM dan fasilitasi kerja sama antar desa untuk menciptakan lapangan kerja lokal.

- **Gini Rasio**

  Gini rasio di Kabupaten Simalungun tergolong rendah karena distribusi pengeluaran penduduknya cukup merata, dengan angka yang konsisten. Upaya pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur perdesaan membantu menjaga daya beli masyarakat di lapisan bawah. Hal ini mencegah terjadinya pemusatan ekonomi hanya pada kelompok tertentu, sehingga jurang pemisah antara penduduk kaya dan miskin tetap terjaga di level rendah.

- **PDRB Perkapita**

  Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Simalungun hingga tahun 2025 secara umum dipicu oleh pemulihan volume produksi di sektor-sektor kunci serta kenaikan harga komoditas unggulan, selain itu Dominasi Sektor Pertanian dan Kenaikan Konsumsi Rumah Tangga, aktivitas lapangan usaha di Simalungun tetap ekspansif, didorong juga oleh sektor administrasi pemerintahan dan jasa-jasa lainnya yang terus tumbuh.

- **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

  Kontributor pertumbuhan ekonomi (*source of growth*) terbesar di Kabupaten Simalungun didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, menguatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun didukung dengan menguatnya beberapa sektor diantaranya; Pertanian, Kahutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan dan juga penguatan sektor pariwisata.

- **Kontribusi PDRB Kab/Kota**

  Kontribusi PDRB Kabupaten Simalungun terhadap total PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023-2024 berada di angka **4,97%**, angka kontribusi ini menunjukkan bahwa Simalungun memiliki peran strategis sebagai penopang ekonomi wilayah Sumatera Utara, khususnya dari sektor agraris.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

  Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (LPE), permintaan akan tenaga kerja otomatis meningkat. Peningkatan aktivitas produksi di berbagai lapangan usaha memaksa dunia usaha untuk merekrut lebih banyak karyawan. Selain itu sektor Pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian memberikan dampak positif dengan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.

  Kabupaten Simalungun merupakan salah satu penyumbang terbesar keempat bagi ekonomi Sumatera Utara, setelah Kota Medan (28,86%), Kabupaten Deli Serdang (13,13%), dan Kabupaten Langkat (5,35%). Selain itu Sektor perkebunan di Simalungun memiliki peran krusial, menyumbang sekitar 25,41% terhadap total PDRB kabupaten itu sendiri.

3. MISI 4 : Solusi

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun

Tabel 3.49
Realisasi Capaian Kinerja Indikator
Indeks Pembangunan Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun			Klasifikasi
				Target	Realisasi	Capaian %	
Misi 4: Solusi							
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,35	76,48	100%	Sangat Memuaskan

1. Analisis Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah (seperti Simalungun) yang dilihat dari tiga dimensi dasar yakni:

1. **Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat**

   Indikatornya adalah **Umur Harapan Hidup (UHH)** saat lahir.

2. **Dimensi Pengetahuan**

   Indikatornya terdiri dari dua poin:

   - **Harapan Lama Sekolah (HLS)**: Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
   - **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**: Rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal.

3. Dimensi Standar Hidup Layak

Indikatornya adalah **Pengeluaran Per Kapita** yang disesuaikan (Keseimbangan Kemampuan Berbelanja).

- Ini mengukur kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
- Indikator ini berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan dan PDRB yang kita bahas sebelumnya.

Pada tahun 2025 skor Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 76,48 dengan capaian sebesar 100% dari target tahun 2025 sebesar 76,35. IPM Simalungun terus menunjukkan tren **meningkat**. Sebagai gambaran, pada tahun 2024 angkanya berada di sekitar **74,25** (kategori **Tinggi**). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan rata-rata lama sekolah dan perbaikan daya beli masyarakat sehingga juga mempengaruhi peningkatan PDRB perkapaita Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.50
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SOSIAL/*SOCIAL*					
Indeks Pembangunan Manusia-IPM[4]	–	74,68	75,17	75,88	76,48

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025



Grafik 4.1 Perkembangan IPM Simalungun, 2022-2025

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara, 2025

Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Seluruh kabupaten/kota menunjukkan kenaikan IPM selama periode 2022 hingga 2025. Hal yang lebih perlu diperhatikan dibandingkan ranking IPM adalah kecepatan pembangunan manusia, yang diukur dengan pertumbuhan IPM. Kabupaten Simalungun mengalami pertumbuhan dalam pembangunan manusia di periode 2022-2023 dengan pertumbuhan sekitar 0,66 persen pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga laju pertumbuhannya melambat menjadi 0,79 persen pada tahun 2025. Hal ini disebabkan ada dimensi pembentuk IPM Kabupaten Simalungun yang mengalami perlambatan yakni rata- rata lama sekolah. Sementara itu dimensi angka harapan hidup dan harapan lama sekolah, laju pertumbuhannya tidak mengalami perubahan. Sedangkan dimensi pengeluaran perkapita mengalami percepatan laju pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

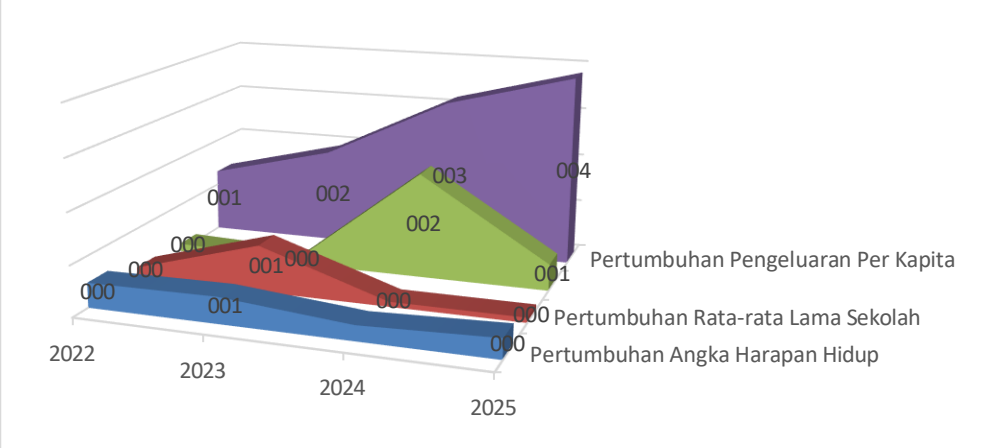

Grafik.. Pertumbuhan Komponen Pembentuk IPM Simalungun, 2022-2025

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara, 2025

Dimensi dasar pendukung IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Dimensi umur Panjang dan Umur Sehat**

  Angka harapan hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*), UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara- negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

  Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

  UHH tidak lagi hanya dilihat sebagai angka statistik kematian, melainkan sebagai cermin dari kualitas hidup dan efektivitas pembangunan manusia secara menyeluruh di suatu wilayah tantangan transisi demografi membuat kenaikan UHH harus dibarengi dengan "Harapan Hidup Sehat". Tujuannya bukan sekadar memperpanjang usia, tetapi memastikan masyarakat tetap produktif dan mandiri di masa tua, sehingga tidak menjadi beban ekonomi bagi kelompok usia produktif.

  Peningkatan UHH menandakan adanya perbaikan

nyata dalam akses dan kualitas layanan kesehatan. Hal ini mencakup keberhasilan program pencegahan penyakit (seperti imunisasi dan deteksi dini), penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta kemampuan sistem kesehatan dalam menangani penyakit degeneratif pada kelompok lansia

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Angka harapan hidup Kabupaten Simalungun tahun 2025 yaitu 74,59 tahun, berada di atas angka Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 73,19 tahun. AHH Simalungun berada di urutan ke-10 di Provinsi Sumatera Utara.

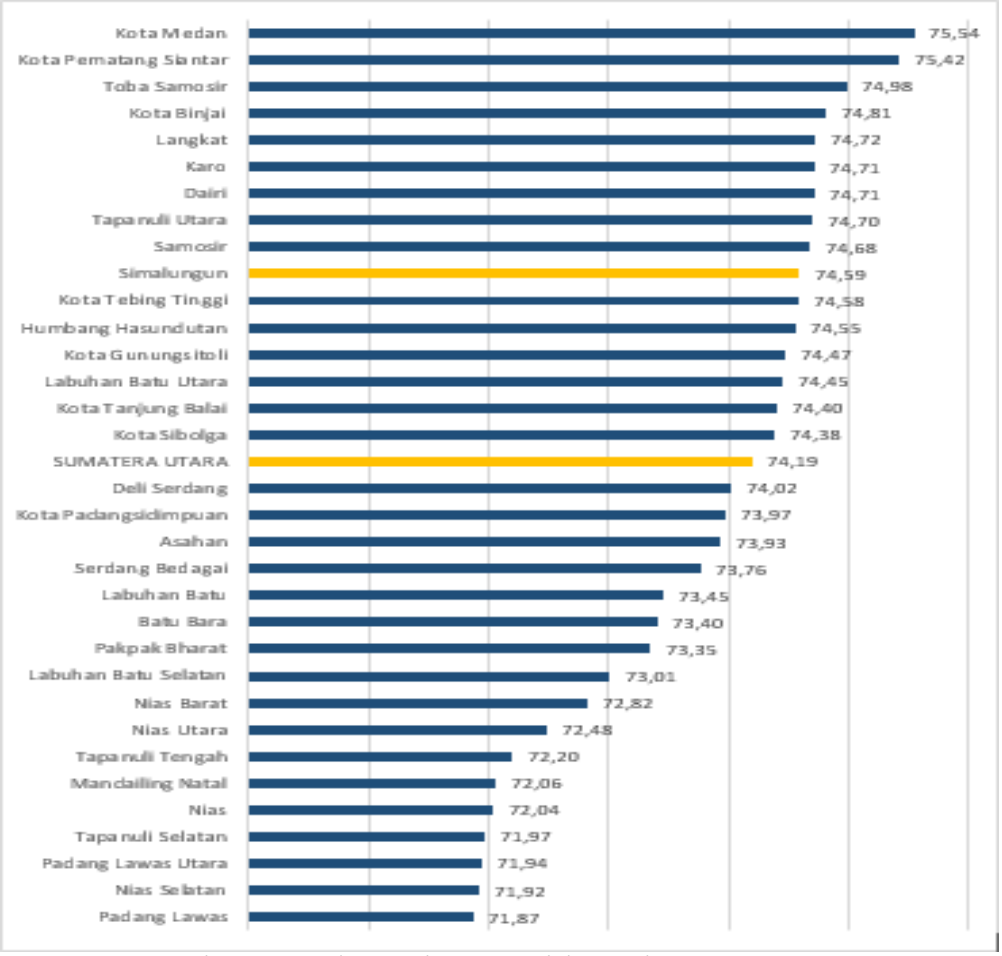

Sumber: ***BPS Kab. Simalungun (Indeks Pembangunan Manusia)***

- **Dimensi Pendidikan**

  Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata- rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator baru menggantikan angka melek huruf. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada proses pembentukan IPM, rata- rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

  - **Harapan Lama Sekolah**

    Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

❖ **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata- rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Simalungun mencapai 13,16 tahun. Harapan lama sekolah di Kabupaten Simalungun lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dengan HLS sebesar 13,50 tahun sehingga harus perlu ditingkatkan. HLS Kabupaten Simalungun berada di urutan menengah kebawah yaitu urutan 28 dari 34 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. HLS tertinggi di Kota Medan mencapai 14,80 tahun, sedangkan HLS terendah di Kabupaten Serdang Bedagai hanya 12,66 tahun. Masih

dalam dimensi pengetahuan, pada tahun 2025, rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Simalungun bersekolah selama 13,09 tahun atau mencapai SMA kelas I. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Simalungun sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yaitu selama 9,74 tahun. Jika dilihat dari urutannya dibandingkan Kabupaten/Kota lain di provinsi Sumatera Utara, RLS Kabupaten Simalungun menduduki peringkat ke-18 se-Sumatera Utara. Rata-rata Lama Sekolah tertinggi di Kota Pematangsiantar mencapai 11,83 tahun, sedangkan terendah di Kabupaten Nias hanya 6,41 tahun

Pemerintah Kabupaten Simalungun Terus Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk mendukung dan meningkatkan angka RLS diantaranya dengan meingkatkan jumlah Beasiswa Bagi Siswa SMP dan SD, selain itu juga Program Indondesia Pintas di Kabupaten Simalungun telah menyasar kepada ribuan siswa baik SD maupun SMP

Kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang diadakan oleh dinas pendidikan kabupaten Simalungun untuk meningkatkan pemahaman dan tata kelola bantuan ini di sekolah. Dengan data SMP yang sudah aktivasi 3.098 siswa, dan data SD yg sudah aktivasi 16.010 siswa.



Gambar : Program Indonesia Pintar (PIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun T.A 2025
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, 2025

- **Peran Beasiswa dalam Rata-rata lama sekolah** (khususnya untuk siswa kurang mampu dan berprestasi) adalah alat kebijakan utama untuk memecahkan hambatan ekonomi yang menyebabkan putus sekolah. Dengan demikian, penguatan program beasiswa yang tepat sasaran sangat krusial untuk mendorong RLS dari tingkat SMP menuju target wajib belajar 12 tahun. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun telah menyalurkan penerima beasiswa berprestasi jenjang SD dan SMP (negeri/swasta), dengan realisasi 2025 mencapai 3.845 siswa sebesar Rp300.000/siswa. Penerima beasiswa berprestasi jenjang SD meliputi dan SMP, dan kecamatan.



Gambar: Pemberian Beasiswa Berprestasi Jenjang SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun T.A 2025
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, 2025

- **Peran Sarana dan Prasarana dalam Rata-rata lama sekolah** dalam Upaya peningkatan RLS memerlukan pemerataan sarpras pendidikan dan perbaikan akses sekolah, Ketersediaan sarpras (gedung sekolah, fasilitas penunjang) yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, menghambat anak-anak melanjutkan pendidikan, sehingga menurunkan nilai RLS.

  Pada tahun anggaran 2025 dinas pendidikan kabupaten simalungun melakukan pembangunan dan rehabilitasi prasarana sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dibiayai

dari dana alokasi umum (dau) kabupaten simalungun yang dikelola dinas pendidikan kabupaten simalungun.

Berikut nama sekolah, kecamatan, dan rencana kegiatan penerima pembangunan dan rehabilitasi prasarana sekolah dasar (SD) :

1. SD Negeri 095137 Bah Kapul Gunung Malela Rehabilitasi Ruang Kelas
2. SD Negeri 091456 Pondok Bulu Dolok Panribuan Rehabilitasi Ruang Kelas
3. SD Negeri 091608 Sinaksak Tapian Dolok Rehabilitasi Ruang Kelas
4. SD Negeri 091714 Marubun Siboras Raya Kahean Rehabilitasi Ruang Kelas
5. SD Negeri 094099 Sirube Rube Dolok Pardamean Pembangunan Ruang Kelas Baru
6. SD Negeri 091532 Raja Hombang Hutabayu Raja Rehabilitasi Ruang Kelas
7. D Negeri 095550 Jalan Asahan Siantar Rehabilitasi Ruang Kelas
8. SD Negeri 095214 Dolok Merangir I Dolok Batu Nanggar Rehabilitasi Ruang Kelas
9. SD Negeri 091317 Pematang Raya Raya Rehabilitasi Ruang Kelas
10. Negeri 091317 Pematang Raya Raya Pembangunan Ruang Guru, Kamar Mandi, Kantin, Pagar dan Halaman Sekolah
11. SD Negeri 095137 Bah Kapul Gunung Malela Pembangunan Lab. Komputer
12. SD Negeri 095125 Marihat Tempel Gunung Malela Pembangunan Lab. Komputer
13. SD Negeri 091444 Dolok Panribuan Dolok Panribuan Rehabilitasi Ruang Kelas

14. SD Negeri 091714 Marubun Siboras Raya Kahean Rehabilitasi Ruang Guru
15. SD Negeri 091714 Marubun Siboras Raya Kahean Pembangunan Toilet (Jamban)
16. SD Negeri 097380 Banjaran Raya Kahean Rehabilitasi Ruang Kelas
17. Negeri 097380 Banjaran Raya Kahean Pembangunan Toilet (Jamban)
18. SD Negeri 095227 Gunung Datas Raya Kahean Rehabilitasi Ruang Kelas
19. SD Negeri 095177 Manik Rejo Sidamanik Rehabilitasi Ruang Kelas
20. SD Negeri 095177 Manik Rejo Sidamanik Pembangunan Toilet (Jamban)
21. SD Negeri 091439 Ambarisan Sidamanik Rehabilitasi Ruang Kelas
22. SD Negeri 097363 Simantin Tiga Sidamanik Rehabilitasi Ruang Kelas
23. SD Negeri 096125 Toba Sari Pematang Sidamanik Pembangunan Lab. Komputer
24. SD Negeri 096125 Toba Sari Pematang Sidamanik Pembangunan Ruang Guru
25. SD Negeri 095172 Saragih Ras Dolok Pardamean Pembangunan Perpustakaan
26. SD Negeri 094099 Sirube Rube Dolok Pardamean Pembangunan Ruang Guru
27. SD Negeri 094099 Sirube Rube Dolok Pardamean Pembangunan UKS
28. SD Negeri 091396 Hutabayu Panei Dolok Pardamean Pembangunan Lab. Komputer
29. SD Negeri 091396 Hutabayu Panei Dolok Pardamean Pembangunan Ruang Guru

30. SD Negeri 094098 Simp. Rajanihuta Dolok Pardamean Pembangunan Lab. Komputer
31. SD Negeri 091519 Hataran Jawa Tanah Jawa Rehabilitasi Ruang Kelas
32. SD Negeri 091519 Hataran Jawa Tanah Jawa Pembangunan Pagar & Gapura
33. SD Negeri 091522 Marubun Tanah Jawa Pembangunan Pagar & Gapura
34. SD Negeri 091532 Raja Hombang Hutabayu Raja Pembangunan Pagar & Gapura
35. SD Negeri 091532 Raja Hombang Hutabayu Raja Pembangunan Toilet (Jamban)
36. SD Negeri 091550 Raja Maligas Hutabayu Raja Rehabilitasi Ruang Kelas
37. SD Negeri 091550 Raja Maligas Hutabayu Raja Pembangunan Pagar & Gapura
38. SD Negeri 05192 Marihat Bayu Hutabayu Raja Rehabilitasi Ruang Kelas
39. SD Negeri 095259 Mandaro Bandar Masilam Pembangunan Ruang Guru
40. SD Negeri 095259 Mandaro Bandar Masilam Rehabilitasi Ruang Kelas
41. NEGERI 091370 Saribudolok Silimakuta Pembangunan Ruang Guru
42. SD NEGERI 091370 Saribudolok Silimakuta Pembangunan Lab. Komputer
43. SD NEGERI 091351 Purba Purba Pembangunan Ruang Guru
44. SD NEGERI 095136 Nagori Bosar Panombean Panei Pembangunan Lab. Komputer
45. SD Negeri 091316 Pematang Raya Raya Pembangunan Perpustakaan

46. SD Negeri 091601 Dolok Merangir Dolok Batu Nanggar Pembangunan Perpustakaan
47. SD Negeri 095214 Dolok Merangir I Dolok Batu Nanggar Pembangunan Lab. Komputer
48. SD Negeri 091517 Hatonduhan Hatonduhan Pembangunan Ruang Guru

Berikut nama sekolah, kecamatan, dan rencana kegiatan penerima pembangunan dan rehabilitasi prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

1. SMP Negeri 1 Gunung Malela Gunung Malela Rehabilitasi Ruang Kelas
2. SMP Negeri 1 Gunung Malela Gunung Malela Pembangunan Ruang Kelas Baru
3. SMP Negeri 2 Gunung Malela Gunung Malela Rehabilitasi Ruang Kelas
4. SMP Negeri 1 Jorlang Hataran Jorlang Hataran Rehabilitasi Ruang Kelas'
5. SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Dolok Panribuan Rehabilitasi Ruang Kelas
6. SMP Negeri 1 Dolok Silau Dolok Silau Pembangunan Ruang Kelas Baru
7. SMP Negeri 2 Dolok Pardamean Dolok Pardamean Pembangunan Ruang Kelas Baru
8. SMP Negeri 1 Tanah Jawa Tanah Jawa Rehabilitasi Ruang Kelas
9. SMP Negeri 1 Bandar Bandar Pembangunan (Suntik)
10. SMP Negeri 2 Bandar Bandar Pembangunan (Suntik)
11. SMP Negeri 1 Purba Purba Rehabilitasi Ruang Kelas
12. SMP Negeri 4 Satap Purba Purba Pembangunan Ruang Kelas Baru

13. SMP Negeri 1 Panombeian Panei Panombeian Panei Rehabilitasi Ruang Kelas
14. SMP Negeri 1 Raya Raya Rehabilitasi Ruang Kela
15. SMP Negeri 1 Raya Raya Pembangunan Ruang Lab IPA
16. SMP Negeri 1 Raya Raya Pembangunan Ruang Kelas Baru.
17. SMP Negeri 2 Raya Raya Rehabilitasi Ruang Kela
18. SMP Negeri 2 Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon Pembangunan Ruang Lab IPA
19. SMP Negeri 2 Jl. Asahan Siantar Rehabilitasi Ruang Kelas.
20. SMP Negeri 2 Hatonduhan Hatonduhan Pembangunan Ruang Kelas Baru
21. SMP Negeri 1 Gunung Malela Gunung Malela Pembangunan Rumah Dinas
22. SMP Negeri 1 Gunung Malela Gunung Malela Pembangunan Pagar
23. SMP Negeri 2 Bosar Maligas Bosar Maligas Pembangunan Toilet (Jamban)
24. SMP Negeri 2 Bosar Maligas Bosar Maligas Pembangunan UKS
25. SMP Negeri 2 Bosar Maligas Bosar Maligas Pembangunan Pagar dan Gapura
26. SMP Negeri 1 Bosar Maligas Bosar Maligas Pembangunan Ruang Kelas Baru
27. SMP Negeri 1 Bosar Maligas Bosar Maligas Pembangunan Ruang Ibadah
28. SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Dolok Panribuan Pembangunan Toilet (Jamban)
29. SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Dolok Panribuan Pembangunan Rumah Dinas

30. SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Dolok Panribuan Pembangunan Pagar
31. SMP Negeri 2 Dolok Panribuan Dolok Panribuan Pembangunan Toilet (Jamban)
32. SMP Negeri 1 Dolok Silau Dolok Silau Pembangunan Ruang Serbaguna
33. SMP Negeri 1 Dolok Silau Dolok Silau Pembangunan Toilet (Jamban)
34. SMP Negeri 1 Dolok Silau Dolok Silau Pembangunan Pagar
35. SMP Negeri 1 Tapian Dolok Tapian Dolok Pembangunan Toilet (Jamban)
36. SMP Negeri 1 Tapian Dolok Tapian Dolok Pembangunan Ruang Ibadah
37. SMP Negeri 1 Tapian Dolok Tapian Dolok Pembangunan Kantin
38. SMP Negeri 1 Tapian Dolok Tapian Dolok Pembangunan UKS
39. SMP Negeri 2 Tapian Dolok Tapian Dolok Pembangunan Toilet (Jamban)
40. SMP Negeri 2 Tapian Dolok Tapian Dolok Pembangunan Ruang Ibadah
41. SMP Negeri 2 Tapian Dolok Tapian Dolok Pembangunan UKS
42. SMP Negeri 1 Raya Kahean Raya Kahean Pembangunan Ruang Serbaguna
43. Negeri 2 Dolok Pardamean Dolok Pardamean Pembangunan Toilet (Jamban)
44. Negeri 2 Dolok Pardamean Dolok Pardamean Pembangunan Ruang Serbaguna
45. Negeri 2 Dolok Pardamean Dolok Pardamean Pembangunan Ruang Ibadah

46. SMP Negeri 2 Tanah Jawa Tanah Jawa Pembangunan Perpustakaan
47. SMP Negeri 2 Tanah Jawa Tanah Jawa Pembangunan Ruang Serbaguna
48. SMP Negeri 1 Huta Bayu Raja Huta Bayu Raja Pembangunan UKS
49. SMP Negeri 3 Huta Bayu Raja Huta Bayu Raja Pembangunan UKS
50. SMP Negeri 1 Bandar Masilam Bandar Masilam
51. SMP Negeri 1 Purba Purba Pembangunan Toilet (Jamban).
52. SMP Negeri 1 Purba Purba Pembangunan LAB Komputer
53. SMP Negeri 4 Satap Purba Purba Pembangunan Ruang Ibadah
54. SMP Negeri 4 Satap Purba Purba Pembangunan Kantin
55. SMP Negeri 2 Purba Purba Pembangunan Perpustakaan
56. SMP Negeri 2 Purba Purba Pembangunan Ruang Serbaguna
57. SMP Negeri 2 Panombeian Panei Panombeian Panei Pembangunan Toilet (Jamban)
58. SMP Negeri 2 Panombeian Panei Panombeian Panei Pembangunan Ruang Ibadah
59. SMP Negeri 1 Raya Raya Pembangunan Toilet (Jamban)
60. SMP Negeri 2 Raya Raya Pembangunan Perpustakaan
61. SMP Negeri 1 Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon Rehabilitasi Ruang Kelas
62. SMP Negeri 2 Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon Pembangunan UKS

63. SMP Negeri 2 Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon Pembangunan Perpustakaan
64. SMP Negeri 2 Siantar Siantar Pembangunan Ruang Guru
65. SMP Negeri 1 Hatonduhan Hatonduhan Pembangunan UKS
66. SMP Negeri 1 Hatonduhan Hatonduhan Pembangunan Toilet (Jamban)
67. SMP Negeri 2 Hatonduhan Hatonduhan Pembangunan Pagar dan Gapura
68. SMP Negeri 3 Tanah Jawa Tanah Jawa Pembangunan UKS
69. SMP Negeri 2 Satap Dolok Silou Dolok Silou Pembangunan UKS
70. SMP Negeri 3 Satap Dolok Silou Dolok Silou Pembangunan UKS



Gambar : Pembangunan dan Rehabilitasi SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun T.A 2025

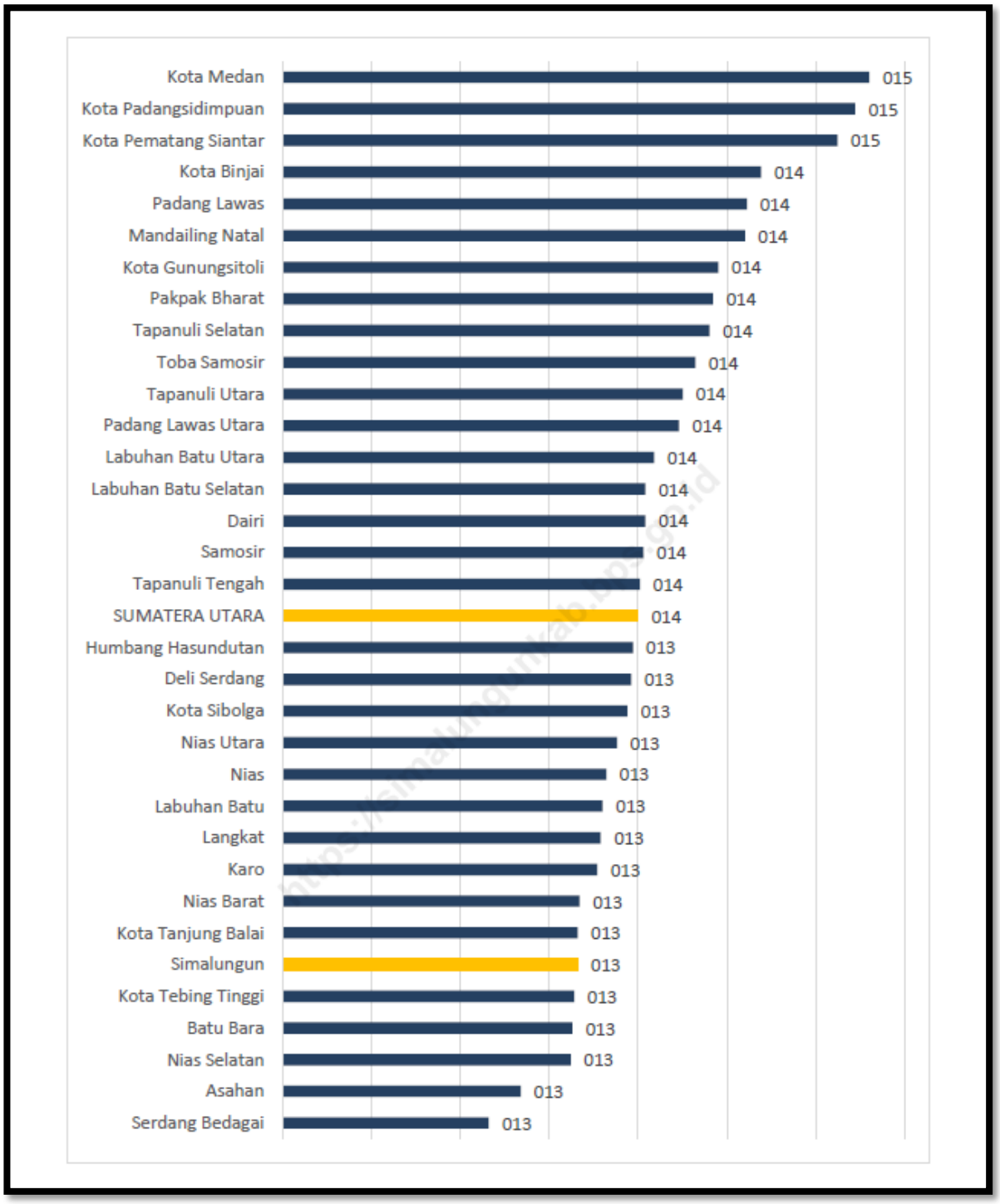

Grafik: Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara, 2025

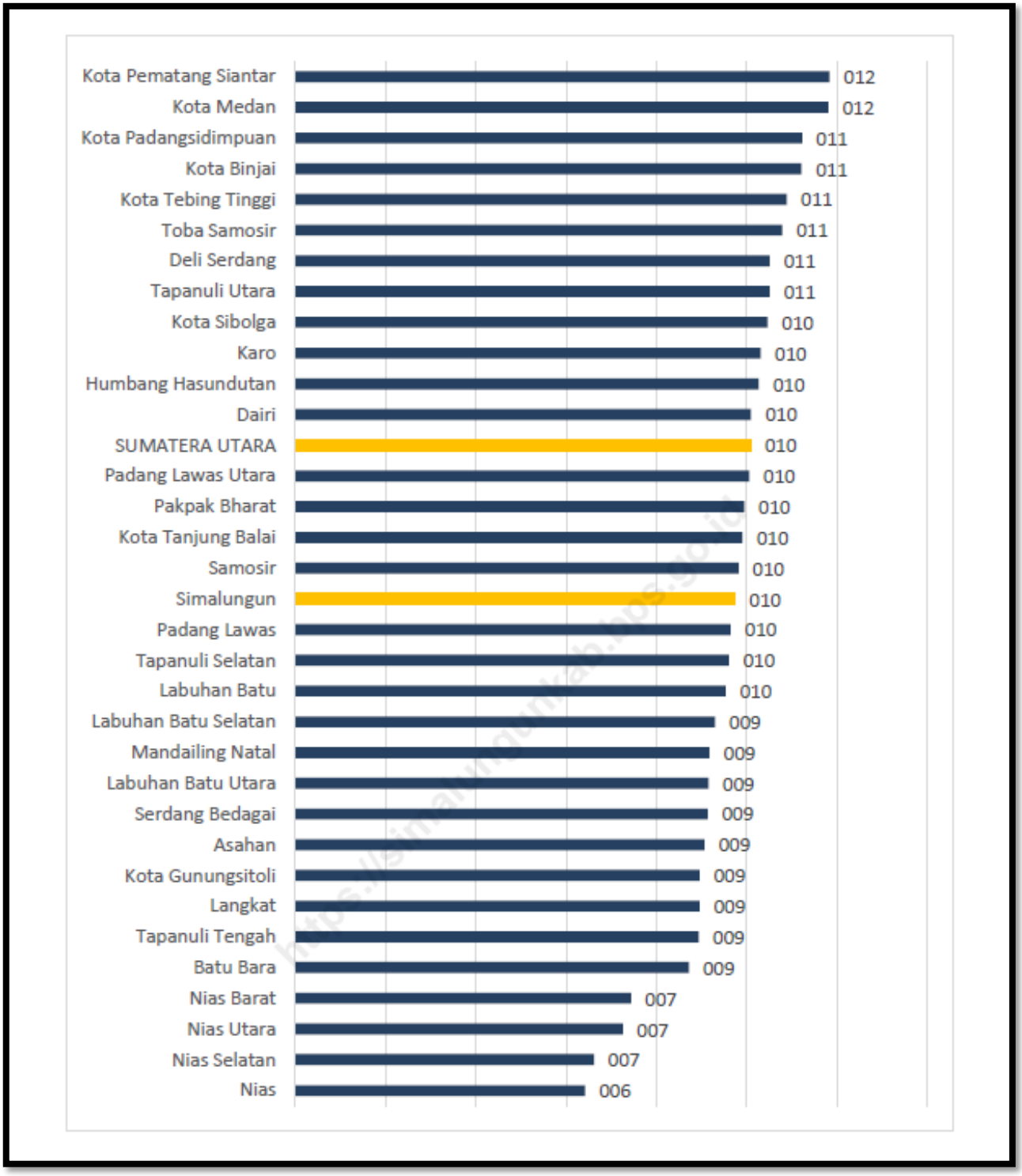

Grafik: Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2025

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara, 2025

- **Dimensi Pengeluaran Perkapita**

Pada dimensi ini telah dibahas pada bagian indikator Pendapatan Perkapita Kabupaten Simalungun Tahun 2025 PDRB perkapita Kabupaten Simalungun berada pada posisi 60.17 (juta) Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Selain itu Rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) Kabupaten Simalungun sebesar 12,58 juta rupiah per tahun Angka ini masih diatas rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 11,90 juta rupiah. PPP di Kabupaten Simalungun berada di urutan 13 se-Provinsi Sumatera Utara. Pengeluaran per kapita tertinggi di Kota Medan mencapai 16,49 juta rupiah per tahun, sedangkan terendah di Kabupaten Nias Barat hanya 7,03 juta rupiah per kapita per tahun.

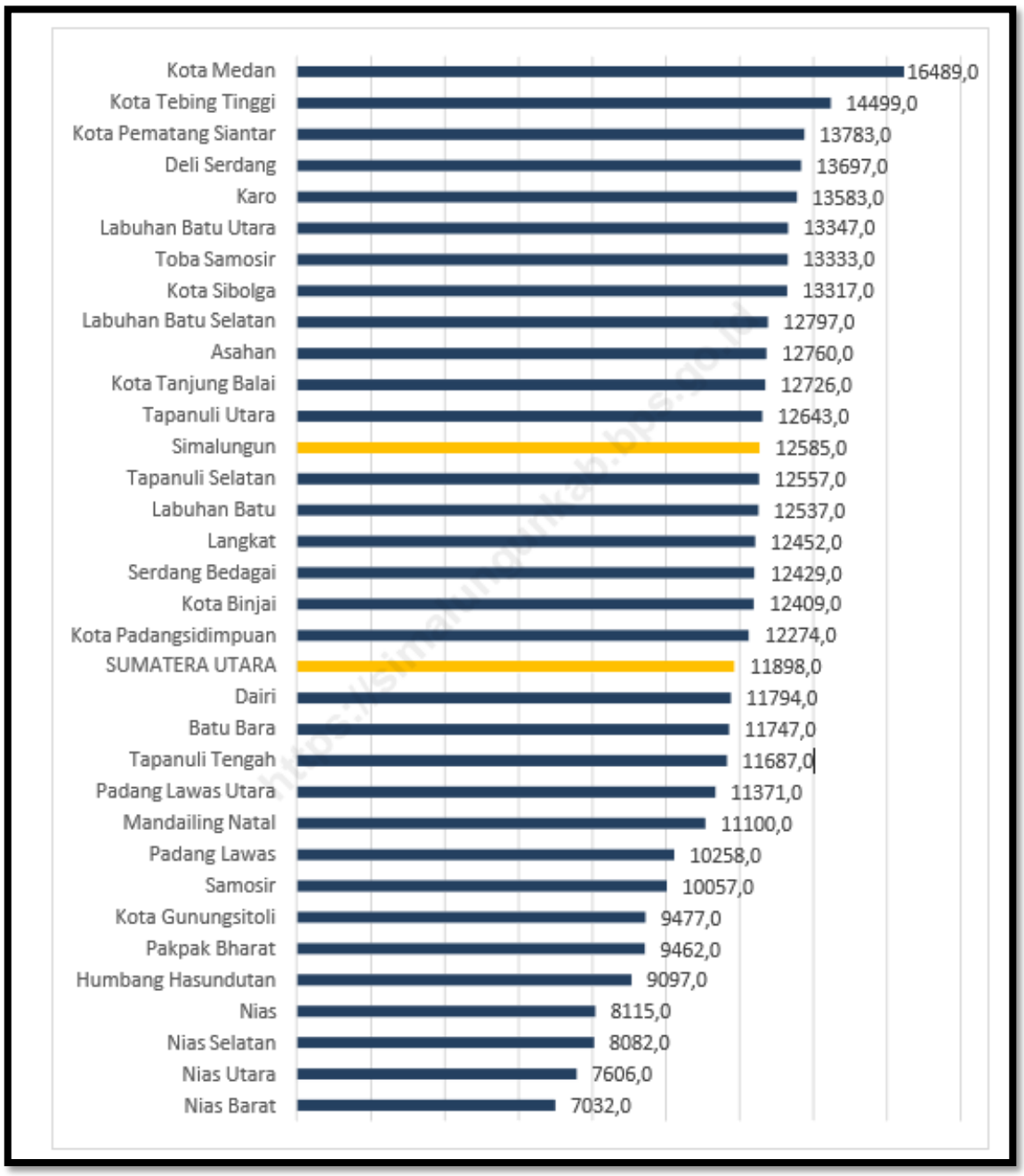

Grafik : Pengeluaran per kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2025 (juta rupiah)

Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara, 2025

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Indeks Pemabngunan Manusia Tahun 2025

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemabngunan Manusia Dengan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2025		Capaian
				2022	2023	2024	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,68	75,17	75,88	76,35	76,48	100%

Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Simalugun berada pada angka 74,68 kemudian pada tahun 2023 meningkat 0,49 poin menjadi 75,17 dan pada tahun 2024 IPM Kabupaten Simalungun meningkat 0,71 poin menjadi 75,88 atay tumbuh 0,94% dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2025 IPM kabupaten Simalungun naik 0,60 poin menjadi 76,88.

Poin Penting Perkembangan IPM Simalungun:

- **Tren Kenaikan**: Selama periode 2022–2025, IPM Simalungun konsisten naik dengan rata-rata pertumbuhan yang stabil.
- **Posisi Wilayah**: Pada tahun 2024 dan 2025, nilai IPM Kabupaten Simalungun tercatat berada di atas rata-rata IPM Provinsi Sumatera Utara (IPM Sumut 2025: 76,47).
- **Faktor Pendukung**: Peningkatan ini didorong oleh kemajuan pada seluruh dimensi penyusunnya, yaitu umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (HLS & RLS), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita)

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan manusia Tahun 2025 dengan target Akhir Jangka Menengah di RPJMD 2025-2029

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD 2029	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,48	78,91	96%%

Pada tabel tersebut menunjukan tingkat kemajuan realisasi kinerja dari Indikator Pembangunan Manusia sebesar 96%, dengan tren positif yang terus meningkat maka target kahir RPJMD dari Indikator IPM akan tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan manusia Tahun 2025 dengan target Nasional/Provinsi

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional dan Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Nasional / Provinsi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,48	75,90 (Nasional)	100,%
					76,47 (Sumatera Utara)	100%

Pada tabel diatas menunjukan skor IPM Nasioal yang berada pada angka 75,90 tersbut adalah merupakan cerminan rata-rata capaian IPM Provinsi, Kabupaten Kota di Indonesia dengan mengambil titik tengah antara IPM tertinggi di Indonesia dengan IPM terendah. Begitupula dengan skor IPM Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan cerminan skor IPM seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, untuk IPM tertinggi ada di Kota Siantar dengan skor 81,71 denngan status sangat tinggi

Tabel 3.54
Perbandingan Realisasi Pertumbuhan IPM Nasional, Provinsi dan Kab/Kota di sekitar Kab. Simalungun

No	Bancmark (Nsional dan Provinsi, Kab/Kota sekitar)	2024	2025	Status	Pertumbuhan dari Tahun 2024-2025
1	Nasional	75,02	75,90	Tinggi	+0,88 poin
2	Sumatera Utara	75,76	76,47	Tinggi	+0,71 poin
3	Deli Serdang	77,56	78,26	Tinggi	+0,73 poin
4	Serdang Bedagai	74,15	74,69	Tinggi	+0,54 poin
5	Karo	77,49	78,10	Tinggi	+0,61 poin
6	Siantar	81,17	81,71	Sangat Tinggi	+0,71 poin
7	Simalungun	75,88	76,48	Tinggi	+0,60 poin

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025

a. Percepatan Standar Hidup Layak (Ekonomi)

Dimensi ini diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

- **Pendorong**: Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung daerah mengalami peningkatan produktivitas melalui perbaikan infrastruktur irigasi dan distribusi bibit unggul. Selain itu, renovasi jalan-jalan utama antar kecamatan mempermudah mobilitas barang dagangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

b. Penguatan Dimensi Pengetahuan (Pendidikan)

Peningkatan IPM didukung oleh tren positif pada dua indikator pendidikan utama:

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**: Tercatat mencapai **13,38 tahun** pada 2025. Hal ini didorong oleh bantuan renovasi gedung sekolah dan penambahan fasilitas pembelajaran yang meningkatkan angka partisipasi belajar siswa.

- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**: Berada di angka **9,72 tahun**. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan jangka panjang dalam menekan angka putus sekolah dan keberlanjutan pendidikan masyarakat usia dewasa.

c. Peningkatan Kualitas Kesehatan (Umur Panjang)

- **Umur Harapan Hidup (UHH)**: Bayi yang lahir di Simalungun pada tahun 2025 diproyeksikan memiliki harapan hidup hingga **74,15 tahun**.
- **Layanan Primer**: Pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan mengoptimalkan operasional Puskesmas dan memastikan ketersediaan obat-obatan esensial yang lebih merata.
- **Apresiasi**: Capaian di bidang kesehatan ini diperkuat dengan keberhasilan Kabupaten Simalungun meraih penghargaan **Universal Health Coverage (UHC) Madya**, yang menunjukkan komitmen pada jaminan kesehatan masyarakat.

d. Kebijakan Kesejahteraan dan Tata Kelola

- **Kesejahteraan Tenaga Kerja**: Pengangkatan ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada formasi 2025 diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
- **Digitalisasi**: Program percepatan digitalisasi daerah seperti penerapan sistem manajemen kas di desa-desa (*Siskeudes-Link*) membantu efisiensi pengelolaan anggaran pembangunan di tingkat akar rumput

3.2. Realiasai Anggaran

3.2.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalugun Tahun 2025

Tabel 3.55
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2025

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6 = (5/5)*100
1.	**4.1**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**280.971.278.663,93**	**287.514.555.890,24**	**102,32**
2.	4.1.01	Pajak Daerah	205.495.195.692,00	205.939.231.277,00	100,21
3.	4.1.01.09	Pajak Reklame	1.800.000.000,00	2.114.938.877,00	117,49
4.	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00	2.114.938.877,00	117,49
5.	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.800.000.000,00	2.114.938.877,00	117,49
6.	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.500.000.000,00	10.959.921.475,00	115,36
7.	4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	9.500.000.000,00	10.959.921.475,00	115,36
8.	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	9.500.000.000,00	10.959.921.475,00	115,36
9.	4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
10.	4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
11.	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
12.	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	3.323.215.193,00	110,77
13.	4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	3.323.215.193,00	110,77
14.	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	3.323.215.193,00	110,77
15.	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.883.860.872,00	63.617.366.435,00	115,91
16.	4.1.01.15.01	PBBP2	54.883.860.872,00	63.617.366.435,00	115,91
17.	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	54.883.860.872,00	63.617.366.435,00	115,91
18.	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.000.000.000,00	18.544.828.334,00	88,30
19.	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	21.000.000.000,00	18.544.828.334,00	88,30
20.	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	21.000.000.000,00	18.544.828.334,00	88,30
21.	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	55.571.061.059,00	60.633.596.910,00	109,11
22.	4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.500.000.000,00	6.166.752.253,00	137,03
23.	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	4.500.000.000,00	6.166.752.253,00	137,03
24.	4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	39.000.000.000,00	40.850.173.559,00	104,74
25.	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	39.000.000.000,00	40.850.173.559,00	104,74
26.	4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	11.500.000.000,00	13.007.604.962,00	113,10
27.	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	11.500.000.000,00	13.007.604.962,00	113,10
28.	4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	271.061.059,00	344.655.137,00	127,15
29.	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	271.061.059,00	344.655.137,00	127,15
30.	4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	300.000.000,00	264.410.999,00	88,13
31.	4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	300.000.000,00	264.410.999,00	88,13
32.	4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	39.889.461.084,00	29.271.226.428,00	73,38
33.	4.1.01.20.01	Opsen PKB	39.889.461.084,00	29.271.226.428,00	73,38
34.	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	39.889.461.084,00	29.271.226.428,00	73,38
35.	4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	19.849.812.677,00	17.473.137.625,00	88,02
36.	4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	19.849.812.677,00	17.473.137.625,00	88,02
37.	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	19.849.812.677,00	17.473.137.625,00	88,02
38.	4.1.02	Retribusi Daerah	6.038.440.966,00	4.342.508.279,00	71,91
39.	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.776.213.728,00	1.470.231.447,00	82,77
40.	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	68.630.205,00	22.805.000,00	33,22
41.	4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	68.630.205,00	22.805.000,00	33,22
42.	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	113.557.500,00	551.229.334,00	485,41

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Capaian
43.	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	113.557.500,00	551.229.334,00	485,41
44.	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	648.900.000,00	243.015.000,00	37,45
45.	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	648.900.000,00	243.015.000,00	37,45
46.	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	459.993.613,00	361.673.012,00	78,62
47.	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	459.993.613,00	361.673.012,00	78,62
48.	4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
49.	4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
50.	4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	485.132.410,00	291.509.101,00	60,08
51.	4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	469.580.716,00	290.399.101,00	61,84
52.	4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.551.694,00	1.110.000,00	7,13
53.	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.662.227.238,00	404.963.000,00	15,21
54.	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	3.420.000,00	0,00
55.	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	3.420.000,00	0,00
56.	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
57.	4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00
58.	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00
59.	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	242.351.333,00	0,00	0,00
60.	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	242.351.333,00	0,00	0,00
61.	4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00
62.	4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	0,00	0,00	0,00
63.	4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	23.163.913,00	3.600.000,00	15,54
64.	4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	23.163.913,00	3.600.000,00	15,54
65.	4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.000.000.000,00	8.918.000,00	0,44
66.	4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.000.000.000,00	8.918.000,00	0,44
67.	4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	396.711.992,00	389.025.000,00	98,06
68.	4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	396.711.992,00	389.025.000,00	98,06
69.	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.600.000.000,00	2.467.313.832,00	154,20
70.	4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.194.942.840,00	119,49
71.	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.194.942.840,00	119,49
72.	4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00	1.272.370.992,00	212,06
73.	4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	600.000.000,00	1.272.370.992,00	212,06
74.	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.984.918.125,00	22.984.918.125,00	100,00
75.	4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	22.984.918.125,00	22.984.918.125,00	100,00
76.	4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	22.984.918.125,00	22.984.918.125,00	100,00
77.	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	22.984.918.125,00	22.984.918.125,00	100,00
78.	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	46.452.723.880,93	54.247.898.209,24	116,78
79.	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	113.868.314,00	34.413.000,00	30,22
80.	4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	40.797.065,00	34.413.000,00	84,35
81.	4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	40.797.065,00	34.413.000,00	84,35
82.	4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	73.071.249,00	0,00	0,00
83.	4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	73.071.249,00	0,00	0,00
84.	4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.033.208.750,00	0,00	0,00
85.	4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.033.208.750,00	0,00	0,00
86.	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.033.208.750,00	0,00	0,00
87.	4.1.04.05	Jasa Giro	11.417.521.764,00	5.536.494.081,00	48,49
88.	4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.146.917.450,00	5.341.114.158,00	58,39
89.	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.146.917.450,00	5.341.114.158,00	58,39
90.	4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.075.120.029,00	25.179.111,00	2,34
91.	4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.075.120.029,00	25.179.111,00	2,34
92.	4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	481.871,00	27.523.918,00	5.711,88
93.	4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	481.871,00	27.523.918,00	5.711,88

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Capaian
94.	4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.195.002.414,00	142.676.894,00	11,93
95.	4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.195.002.414,00	142.676.894,00	11,93
96.	4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	0,00	0,00
97.	4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	0,00	0,00
98.	4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.367.100.283,00	31.309.004,00	0,33
99.	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.367.100.283,00	31.309.004,00	0,33
100.	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.367.100.283,00	31.309.004,00	0,33
101.	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	94.265.940,00	5.462.047.397,05	5.794,29
102.	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	94.265.940,00	5.462.047.397,05	5.794,29
103.	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	94.265.940,00	5.462.047.397,05	5.794,29
104.	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	8.000.000,00	582.732.800,00	7.284,16
105.	4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	4.345.273,00	434,52
106.	4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.000.000,00	4.345.273,00	434,52
107.	4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.000.000,00	22.226.170,00	2.222,61
108.	4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.000.000,00	22.226.170,00	2.222,61
109.	4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000,00	242.015,00	24,20
110.	4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00
111.	4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.000.000,00	242.015,00	24,20
112.	4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	7.307.783,00	730,77
113.	4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000,00	7.307.783,00	730,77
114.	4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.000.000,00	27.500,00	2,75
115.	4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.000.000,00	27.500,00	2,75
116.	4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.000.000,00	1.252.747,00	125,27
117.	4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.000.000,00	1.252.747,00	125,27
118.	4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000,00	4.180.913,00	418,09
119.	4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000,00	4.180.913,00	418,09
120.	4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000,00	122.597.741,00	12.259,77
121.	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.000.000,00	122.597.741,00	12.259,77
122.	4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	420.481.846,00	0,00
123.	4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	420.481.846,00	0,00
124.	4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	70.812,00	0,00
125.	4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00	70.812,00	0,00
126.	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	11.678.081.397,73	13.289.331.506,19	113,79
127.	4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	57.030.400,00	61.595.090,00	108,00
128.	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	57.030.400,00	61.595.090,00	108,00
129.	4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	158.159.654,00	246.863.328,00	156,08
130.	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	156.570.726,00	243.964.763,00	155,81
131.	4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.588.928,00	2.898.565,00	182,42
132.	4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	630.810.292,00	624.979.612,00	99,07
133.	4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	630.810.292,00	624.979.612,00	99,07
134.	4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	10.364.048.475,00	12.128.817.217,00	117,02
135.	4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.364.048.475,00	12.128.817.217,00	117,02
136.	4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	468.032.576,73	227.076.259,19	48,51
137.	4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	468.032.576,73	227.076.259,19	48,51
138.	4.1.04.16	Pendapatan BLUD	12.740.677.432,20	29.311.570.421,00	230,06

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Capaian
139.	4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	12.740.677.432,20	29.311.570.421,00	230,06
140.	4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	12.740.677.432,20	29.311.570.421,00	230,06
		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**280.971.278.663,93**	**287.514.555.890,24**	**102,32**

3.2.2. Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Tabel 3.56
Realisasi Pendapatan Transfer Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2025

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6 = (4/5)x100%
1.	**4.2**	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.586.092.530.162,71**	**2.481.041.824.180,00**	**95,93**
2.	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.333.952.128.418,71	2.242.060.730.140,00	96,06
3.	4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
4.	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00
5.	4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
6.	4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
7.	4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00
8.	4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00
9.	4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00
10.	4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00
11.	4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00
12.	4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00
13.	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
14.	4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00
15.	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00
16.	4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00
17.	4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00
18.	4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00
19.	4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00
20.	4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00
21.	4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00
22.	4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00
23.	4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00
24.	4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00
25.	4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00
26.	4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
27.	4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00
28.	4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00
29.	4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
30.	4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
31.	4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00
32.	4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
33.	4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
34.	4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00
35.	4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
36.	4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00
37.	4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Capaian
38.	4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00
39.	4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	80.142.451.000,00	74.753.539.800,00	93,27
40.	4.2.01.07.01	DBH Pajak	69.742.320.000,00	64.157.645.800,00	91,99
41.	4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	50.345.190.000,00	46.470.508.900,00	92,30
42.	4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	18.115.864.000,00	15.657.621.800,00	86,43
43.	4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	163.086.000,00	911.327.100,00	558,80
44.	4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.118.180.000,00	1.118.188.000,00	100,00
45.	4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	5.078.445.000,00	5.274.208.000,00	103,85
46.	4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	12.184.000,00	11.156.000,00	91,56
47.	4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	0,00	1.029.000,00	0,00
48.	4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	125.626.000,00	131.760.000,00	104,88
49.	4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	3.938.460.000,00	4.127.156.000,00	104,79
50.	4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	168.370.000,00	169.302.000,00	100,55
51.	4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00
52.	4.2.01.07.03	DBH Lainnya	5.321.686.000,00	5.321.686.000,00	100,00
53.	4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	5.321.686.000,00	5.321.686.000,00	100,00
54.	4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.491.714.477.000,00	1.505.898.079.984,00	100,95
55.	4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.229.679.273.000,00	1.266.590.396.800,00	103,00
56.	4.2.01.08.01.0001	DAU	1.229.679.273.000,00	1.266.590.396.800,00	103,00
57.	4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	262.035.204.000,00	239.307.683.184,00	91,32
58.	4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00
59.	4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62.260.088.000,00	39.532.567.184,00	63,49
60.	4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	133.730.639.000,00	133.730.639.000,00	100,00
61.	4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	60.644.477.000,00	60.644.477.000,00	100,00
62.	4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	429.334.682.418,71	397.208.623.208,00	92,51
63.	4.2.01.09.01	DAK Fisik	56.157.160.000,00	52.783.147.720,00	93,99
64.	4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.110.000.000,00	7.829.909.200,00	96,54
65.	4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.176.737.000,00	12.176.731.500,00	99,99
66.	4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.140.000.000,00	1.117.152.246,00	97,99
67.	4.2.01.09.01.0061	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	15.000.000.000,00	14.777.161.315,00	98,51
68.	4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	260.045.000,00	248.268.150,00	95,47
69.	4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	226.120.000,00	225.383.160,00	99,67
70.	4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	19.244.258.000,00	16.408.542.149,00	85,26
71.	4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	373.177.522.418,71	344.425.475.488,00	92,29
72.	4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.015.713.374,00	3.015.713.374,00	100,00
73.	4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	4.724.032.800,00	2.328.783.300,00	49,29
74.	4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	112.592.898.186,00	112.637.576.949,00	100,03
75.	4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.733.750.000,00	3.733.750.000,00	100,00
76.	4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.104.600.000,00	6.916.622.300,00	97,35
77.	4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
78.	4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	347.700.000,00	336.600.000,00	96,80
79.	4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
80.	4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.498.678.532,00	5.497.011.732,00	99,96
81.	4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.430.589.281,71	21.410.989.279,00	99,90
82.	4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	197.801.894.000,00	174.892.342.309,00	88,41
83.	4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	6.269.000.000,00	2.955.520.000,00	47,14
84.	4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.636.872.245,00	9.678.772.245,00	100,43
85.	4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	961.794.000,00	961.794.000,00	100,00
86.		**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN**	**2.001.191.610.418,71**	**1.977.860.242.992,00**	**98,83**
87.					
88.	4.2.01.05	Dana Desa	332.760.518.000,00	264.200.487.148,00	79,39
89.	4.2.01.05.01	Dana Desa	332.760.518.000,00	264.200.487.148,00	79,39
90.	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	332.760.518.000,00	264.200.487.148,00	79,39

No	Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	Capaian
91.		**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**332.760.518.000,00**	**264.200.487.148,00**	**79,39**
92.					
93.	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.140.401.744,00	238.981.094.040,00	94,78
94.	4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	203.068.295.370,00	189.908.987.666,00	93,51
95.	4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	203.068.295.370,00	189.908.987.666,00	93,51
96.	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	45.312.780.380,00	45.312.780.380,00	100,00
97.	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.482.279.446,00	26.482.279.446,00	100,00
98.	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	77.173.930.138,00	60.024.029.789,00	77,77
99.	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.275.084.366,00	2.894.385.194,00	54,86
100.	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	48.824.221.040,00	55.195.512.857,00	113,04
101.	4.2.02.02	Bantuan Keuangan	49.072.106.374,00	49.072.106.374,00	100,00
102.	4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	49.072.106.374,00	49.072.106.374,00	100,00
103.	4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	49.072.106.374,00	49.072.106.374,00	100,00
104.		**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**252.140.401.744,00**	**238.981.094.040,00**	**94,78**
105.					
106.		**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER**	**2.586.092.530.162,71**	**2.481.041.824.180,00**	**95,93**
107.					
108.	**4.3**	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**38.588.308.898,68**	**34.022.163.876,00**	**88,16**
109.	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	88,16
110.	4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	88,16
111.	4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	88,16
112.	4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	38.588.308.898,68	34.022.163.876,00	88,16
113.		**JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**38.588.308.898,68**	**34.022.163.876,00**	**88,16**

3.2.3.Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Tabel 3.57
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
1	2	3	4	5	
1.	**5**	**BELANJA DAERAH**	**3.011.338.831.777,06**	**2.643.511.032.939,00**	**87,78**
2.	**5.1**	**BELANJA OPERASI**	**2.165.536.480.916,86**	**1.903.191.395.823,00**	**87,88**
3.	5.1.01	Belanja Pegawai	1.356.639.921.836,17	1.176.138.593.451,00	86,69
4.	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	959.595.604.250,83	835.311.714.113,00	87,04
5.	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	715.175.995.965,00	642.631.674.136,00	89,85
6.	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	397.505.636.062,00	372.286.807.880,00	93,65
7.	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	317.670.359.903,00	270.344.866.256,00	85,10
8.	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.413.484.616,00	51.056.772.762,00	76,87
9.	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.802.098.247,00	34.729.193.216,00	94,36
10.	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	29.611.386.369,00	16.327.579.546,00	55,13
11.	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.457.709.574,00	8.724.349.430,00	92,24
12.	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.457.709.574,00	8.724.349.430,00	92,24
13.	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	56.238.307.886,00	49.080.963.626,00	87,27
14.	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.985.004.733,00	24.781.363.033,00	88,55
15.	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.253.303.153,00	24.299.600.593,00	86,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
16.	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.022.649.274,00	5.175.132.054,00	73,69
17.	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.634.779.609,00	3.790.288.850,00	81,77
18.	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.387.869.665,00	1.384.843.204,00	57,99
19.	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	40.323.272.521,00	33.822.407.480,00	83,87
20.	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.809.295.245,00	18.024.834.432,00	90,99
21.	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.513.977.276,00	15.797.573.048,00	77,00
22.	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.631.201.185,00	1.444.306.160,00	88,54
23.	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.631.201.185,00	1.444.306.160,00	88,54
24.	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.512.239,50	7.797.757,00	20,24
25.	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.622.720,50	4.675.157,00	13,90
26.	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.889.519,00	3.122.600,00	63,86
27.	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	50.181.162.715,00	38.038.062.337,00	75,80
28.	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	31.806.972.239,00	23.661.818.356,00	74,39
29.	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18.374.190.476,00	14.376.243.981,00	78,24
30.	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.762.581.512,00	1.334.709.591,00	75,72
31.	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	999.605.050,00	766.491.666,00	76,67
32.	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	762.976.462,00	568.217.925,00	74,47
33.	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.223.864.654,00	3.995.538.780,00	76,48
34.	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.936.321.210,00	2.291.042.229,00	78,02
35.	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.287.543.444,00	1.704.496.551,00	74,51
36.	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.126.862.109,33	0,00	0,00
37.	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	6.126.862.109,33	0,00	0,00
38.	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	366.917.062.167,34	311.872.898.517,00	84,99
39.	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	114.578.666.191,34	91.127.025.763,00	79,53
40.	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	114.578.666.191,34	91.127.025.763,00	79,53
41.	5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	252.338.395.976,00	220.745.872.754,00	87,48
42.	5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	90.000.000,00	86.849.200,00	96,49
43.	5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	475.363.098,00	460.418.431,00	96,85
44.	5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	144.173.175,00	96,11
45.	5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.745.144.783,00	2.661.036.489,00	96,93
46.	5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.075.038.136,00	762.141.843,00	70,89
47.	5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.401.930.426,00	2.399.801.327,00	99,91
48.	5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.265.236.527,00	0,00	0,00
49.	5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	823.780.406,00	536.473.380,00	65,12
50.	5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	229.867.382.200,00	206.957.690.909,00	90,03
51.	5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.784.769.400,00	16.018.000,00	0,89
52.	5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	11.659.751.000,00	6.721.270.000,00	57,64
53.	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
54.	5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
55.	5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
56.	5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
57.	5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00
58.	5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
59.	5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
60.	5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00
61.	5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
62.	5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
63.	5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	0,00	0,00	0,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
64.	5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
65.	5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
66.	5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
67.	5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	0,00	0,00	0,00
68.	5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
69.	5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
70.	5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
71.	5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
72.	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
73.	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
74.	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
75.	5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.885.321.181,00	27.835.141.057,00	96,36
76.	5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.112.685.000,00	99,85
77.	5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.112.685.000,00	99,85
78.	5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.408.400,00	95.432.400,00	61,40
79.	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.408.400,00	95.432.400,00	61,40
80.	5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	115.582.320,00	57,00
81.	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	115.582.320,00	57,00
82.	5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.403.000,00	99,89
83.	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.403.000,00	99,89
84.	5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.393.250,00	99,85
85.	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.393.250,00	99,85
86.	5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.670.100,00	133.919.100,00	84,93
87.	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	157.670.100,00	133.919.100,00	84,93
88.	5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.868.200,00	25.715.025,00	38,45
89.	5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.868.200,00	25.715.025,00	38,45
90.	5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00
91.	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00
92.	5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	1.425.900.000,00	97,00
93.	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.470.000.000,00	1.425.900.000,00	97,00
94.	5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	536.961.528,00	524.522,00	0,09
95.	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	536.961.528,00	524.522,00	0,09
96.	5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.235.151.953,00	5.008.130.440,00	95,66
97.	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	124.395.348,00	96.766.908,00	77,78
98.	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	46.700.329,00	5.806.014,00	12,43
99.	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	58.376.276,00	7.257.518,00	12,43
100.	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.005.680.000,00	4.898.300.000,00	97,85
101.	5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.395.040.000,00	9.388.456.000,00	99,92
102.	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.395.040.000,00	9.388.456.000,00	99,92
103.	5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00
104.	5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	0,00	0,00
105.	5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	248.814.237,00	217.783.764,00	87,52
106.	5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	126.165.000,00	101.400.000,00	80,37
107.	5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	126.165.000,00	101.400.000,00	80,37
108.	5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.801.900,00	6.108.000,00	89,79
109.	5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.801.900,00	6.108.000,00	89,79
110.	5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56
111.	5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56
112.	5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.235.362,00	5.286.660,00	84,78
113.	5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.235.362,00	5.286.660,00	84,78
114.	5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.695.546,00	808.044,00	47,65
115.	5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.695.546,00	808.044,00	47,65
116.	5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.009,00	1.860,00	1,82
117.	5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	102.009,00	1.860,00	1,82

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
118.	5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.540.156,00	5.449.920,00	83,33
119.	5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.540.156,00	5.449.920,00	83,33
120.	5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62
121.	5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62
122.	5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62
123.	5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62
124.	5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	901.056.000,00	90,72
125.	5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	301.056.000,00	76,58
126.	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	301.056.000,00	76,58
127.	5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
128.	5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
129.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	768.534.251.580,69	688.336.827.754,00	89,56
130.	5.1.02.01	Belanja Barang	206.653.985.936,57	182.108.045.819,00	88,12
131.	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	206.646.818.436,57	182.101.179.617,00	88,12
132.	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	821.819.700,00	754.355.640,00	91,79
133.	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.033.210.942,20	1.777.122.159,00	87,40
134.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.590.159.400,00	949.038.694,00	59,68
135.	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
136.	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.985.537.400,00	1.749.551.200,00	88,11
137.	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	550.800,00	550.000,00	99,85
138.	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	163.930.000,00	148.172.640,00	90,38
139.	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00
140.	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	310.121.700,00	140.362.000,00	45,26
141.	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	889.346.701,00	763.287.104,00	85,82
142.	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	274.350.265,00	265.286.850,00	96,69
143.	5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00
144.	5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
145.	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
146.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.127.997.768,00	2.735.847.618,00	87,46
147.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.900.350.650,00	2.551.215.589,00	87,96
148.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.555.193.464,43	8.672.883.269,00	82,16
149.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	97.361.200,00	72.814.460,00	74,78
150.	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.495.161.814,00	2.050.432.411,00	82,17
151.	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.934.169.429,00	1.696.107.576,00	87,69
152.	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.091.075.318,00	957.246.572,00	87,73
153.	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	326.733.500,00	258.399.958,00	79,08
154.	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
155.	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.957.619.800,00	1.753.108.800,00	89,55
156.	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.186.654.545,80	1.565.697.306,00	71,60
157.	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	15.615.376.325,00	11.581.835.788,00	74,16
158.	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.830.764.825,00	7.637.627.724,00	77,69
159.	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	52.730.762.560,00	50.336.924.640,00	95,46
160.	5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	54.656.228.728,99	52.578.021.375,00	96,19
161.	5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
162.	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.381.811.385,00	3.872.424.544,00	88,37
163.	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	167.622.000,00	167.622.000,00	100,00
164.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.216.670.859,15	15.745.217.782,00	81,93
165.	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.420.624.100,00	2.162.867.800,00	63,23
166.	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.724.624.956,00	4.023.186.675,00	70,27
167.	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.062.084.300,00	3.399.670.309,00	83,69
168.	5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	172.588.100,00	167.965.000,00	97,32

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
169.	5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	700.000.000,00	496.725.000,00	70,96
170.	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00
171.	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	166.412.500,00	131.234.748,00	78,86
172.	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	434.319.000,00	328.213.059,00	75,56
173.	5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	213.500.000,00	212.902.991,00	99,72
174.	5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	3.892.000,00	0,00	0,00
175.	5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00
176.	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	377.732.400,00	366.833.340,00	97,11
177.	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.100.000,00	12.066.996,00	99,72
178.	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	18.360.000,00	18.360.000,00	100,00
179.	5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	999.000,00	999.000,00	100,00
180.	5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	999.000,00	999.000,00	100,00
181.	5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.168.500,00	5.867.202,00	95,11
182.	5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.168.500,00	5.867.202,00	95,11
183.	5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00
184.	5.1.02.02	Belanja Jasa	335.273.318.332,00	283.332.131.522,00	84,50
185.	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	175.059.611.375,00	144.056.398.745,00	82,28
186.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.469.850.000,00	2.191.622.500,00	49,03
187.	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	836.450.000,00	612.100.000,00	73,17
188.	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	266.200.000,00	183.800.000,00	69,04
189.	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.808.160.000,00	3.887.970.000,00	80,86
190.	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.600.000,00	4.800.000,00	63,15
191.	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	150.000.000,00	147.500.000,00	98,33
192.	5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00
193.	5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	120.800.000,00	108.000.000,00	89,40
194.	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	404.000.000,00	354.000.000,00	87,62
195.	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	541.200.000,00	498.900.000,00	92,18
196.	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.080.000.000,00	874.800.000,00	81,00
197.	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	45.706.988.000,00	39.184.842.517,00	85,73
198.	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	416.210.000,00	324.533.084,00	77,97
199.	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	100.000.000,00	0,00	0,00
200.	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	75.000.000,00	900.000,00	1,20
201.	5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00
202.	5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	966.358.000,00	871.380.000,00	90,17
203.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00
204.	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	77.028.840,00	46.217.304,00	60,00
205.	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	34.338.717.424,00	24.985.780.400,00	72,76
206.	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.949.624.000,00	1.703.348.000,00	87,36
207.	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.129.308.420,00	7.041.718.574,00	98,77
208.	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	102.500.000,00	61.850.000,00	60,34
209.	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	606.432.870,00	429.662.054,00	70,85
210.	5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	289.908.792,00	212.000.000,00	73,12
211.	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00
212.	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.206.903.384,00	1.542.952.324,00	69,91
213.	5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	334.151.970,00	315.235.970,00	94,33
214.	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	0,00	0,00
215.	5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	943.820.000,00	779.130.000,00	82,55
216.	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	788.250.000,00	518.850.000,00	65,82
217.	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	320.000.000,00	297.650.000,00	93,01
218.	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	181.826.000,00	159.897.267,00	87,93
219.	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
220.	5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	10.560.000,00	10.560.000,00	100,00
221.	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.592.426.200,00	3.420.587.009,00	95,21
222.	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	88.007.147,00	0,00	0,00
223.	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.041.191.664,00	354.293.194,00	34,02
224.	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	42.643.570.732,00	39.251.703.779,00	92,04
225.	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	630.093.900,00	558.809.500,00	88,68
226.	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.289.083.128,00	6.177.212.163,00	74,52
227.	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	23.670.000,00	5.567.500,00	23,52
228.	5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	93.564.000,00	63.104.375,00	67,44
229.	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	898.870.000,00	255.610.212,00	28,43
230.	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	7.553.846.904,00	6.164.813.017,00	81,61
231.	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	330.000.000,00	147.628.002,00	44,73
232.	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	229.280.000,00	147.780.000,00	64,45
233.	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	418.160.000,00	159.290.000,00	38,09
234.	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	111.367.101.199,00	101.538.821.761,00	91,17
235.	5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.471.790.432,00	4.529.711.180,00	82,78
236.	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	81.489.207.313,00	78.778.095.000,00	96,67
237.	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.375.109.037,00	6.707.484.000,00	80,08
238.	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.865.543.280,00	2.540.097.572,00	52,20
239.	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.399.732.588,00	5.229.717.142,00	81,71
240.	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.765.718.549,00	3.753.716.867,00	78,76
241.	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.804.562.710,00	7.163.410.450,00	73,06
242.	5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	323.261.450,00	297.798.850,00	92,12
243.	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.989.872.000,00	1.504.618.000,00	75,61
244.	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	697.370.000,00	368.300.000,00	52,81
245.	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
246.	5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00
247.	5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
248.	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.770.710.000,00	3.557.410.000,00	74,56
249.	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	706.657.020,00	441.203.600,00	62,43
250.	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	973.092.240,00	805.280.000,00	82,75
251.	5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	60.000.000,00	20.000.000,00	33,33
252.	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	84.000.000,00	61.000.000,00	72,61
253.	5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	183.600.000,00	91.800.000,00	50,00
254.	5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00
255.	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	941.700.000,00	651.900.000,00	69,22
256.	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	469.600.000,00	411.600.000,00	87,64
257.	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	362.100.000,00	200.800.000,00	55,45
258.	5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	50.000.000,00	0,00	0,00
259.	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00
260.	5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	60.000.000,00	39.500.000,00	65,83
261.	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
262.	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
263.	5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.620.888.048,00	14.766.223.081,00	88,84
264.	5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00
265.	5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.266.348.619,00	1.497.687.476,00	66,08
266.	5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	344.697.000,00	339.099.450,00	98,37
267.	5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	300.000.000,00	199.533.800,00	66,51
268.	5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.200.000.000,00	997.520.625,00	83,12
269.	5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	4.208.800.000,00	4.194.997.025,00	99,67

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
270.	5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	855.000.000,00	849.532.950,00	99,36
271.	5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	0,00
272.	5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	440.021.000,00	419.050.530,00	95,23
273.	5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.951.571.429,00	2.383.510.800,00	80,75
274.	5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.553.200.000,00	1.517.444.925,00	97,69
275.	5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.116.300.000,00	1.109.573.150,00	99,39
276.	5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
277.	5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.375.000.000,00	1.248.322.350,00	90,78
278.	5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	566.430.000,00	468.958.000,00	82,79
279.	5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
280.	5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	166.430.000,00	122.030.000,00	73,32
281.	5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00
282.	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	146.928.000,00	73,46
283.	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00
284.	5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
285.	5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	284.944.000,00	274.725.000,00	96,41
286.	5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	284.944.000,00	274.725.000,00	96,41
287.	5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	217.000.000,00	149.960.000,00	69,10
288.	5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	144.000.000,00	76.960.000,00	53,44
289.	5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00
290.	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.396.081.000,00	14.246.734.485,00	69,85
291.	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.396.081.000,00	14.246.734.485,00	69,85
292.	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00
293.	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	67.479.520.639,20	61.392.751.261,00	90,97
294.	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.850.225.000,00	11.638.299.275,00	84,02
295.	5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	88.126.000,00	14.490.000,00	16,44
296.	5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	97.931.000,00	81.675.000,00	83,40
297.	5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	92.319.000,00	34.250.000,00	37,09
298.	5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	56.540.000,00	42.310.050,00	74,83
299.	5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.000.000,00	14.970.000,00	99,80
300.	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.056.410.000,00	8.014.548.727,00	88,49
301.	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	742.200.000,00	694.324.700,00	93,54
302.	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	959.500.000,00	709.118.341,00	73,90
303.	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	753.799.000,00	372.090.102,00	49,36
304.	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00
305.	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
306.	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	144.350.000,00	135.405.000,00	93,80
307.	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00
308.	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	216.990.000,00	215.605.845,00	99,36
309.	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	544.940.000,00	327.552.550,00	60,10
310.	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
311.	5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	600.000.000,00	587.162.250,00	97,86
312.	5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
313.	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00
314.	5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	256.000.000,00	244.437.960,00	95,48
315.	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	136.120.000,00	70.756.250,00	51,98
316.	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	90.000.000,00	79.602.500,00	88,44
317.	5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.112.449.690,00	29.880.733.538,00	90,24
318.	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.551.837.690,00	6.998.337.513,00	73,26
319.	5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	120.000.000,00	100.566.000,00	83,80
320.	5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
321.	5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	23.179.612.000,00	22.522.352.825,00	97,16
322.	5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	198.800.000,00	197.727.200,00	99,46
323.	5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	62.200.000,00	61.750.000,00	99,27
324.	5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.516.845.949,20	19.873.718.448,00	96,86
325.	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	12.319.466.469,20	12.187.016.267,00	98,92
326.	5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	4.850.000.000,00	4.709.114.710,00	97,09
327.	5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.997.379.480,00	2.628.340.000,00	87,68
328.	5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00	199.657.820,00	99,82
329.	5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	150.000.000,00	149.589.651,00	99,72
330.	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
331.	5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00
332.	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.670.781.008,92	68.381.644.525,00	86,92
333.	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.670.781.008,92	68.381.644.525,00	86,92
334.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.415.224.093,34	31.736.098.125,00	89,61
335.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.515.968.652,58	34.251.267.500,00	86,67
336.	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.876.222.263,00	1.729.812.500,00	60,14
337.	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	863.366.000,00	664.466.400,00	76,96
338.	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.314.777.380,00	5.422.401.073,00	85,86
339.	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.758.530.000,00	2.032.003.693,00	73,66
340.	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	653.730.000,00	652.003.693,00	99,73
341.	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
342.	5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.924.800.000,00	1.225.500.000,00	63,66
343.	5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	150.000.000,00	124.500.000,00	83,00
344.	5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00
345.	5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.556.247.380,00	3.390.397.380,00	95,33
346.	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.556.247.380,00	3.390.397.380,00	95,33
347.	5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
348.	5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
349.	5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
350.	5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	59.641.868.284,00	57.943.017.320,00	97,15
351.	5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	59.641.868.284,00	57.943.017.320,00	97,15
352.	5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	57.980.285.052,00	56.343.295.604,00	97,17
353.	5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.661.583.232,00	1.599.721.716,00	96,27
354.	5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.500.000.000,00	29.756.836.234,00	205,21
355.	5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.500.000.000,00	29.756.836.234,00	205,21
356.	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.500.000.000,00	29.756.836.234,00	205,21
357.	5.1.05	Belanja Hibah	39.733.357.500,00	38.157.474.618,00	96,03
358.	5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
359.	5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
360.	5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
361.	5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
362.	5.1.05.03.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
363.	5.1.05.03.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
364.	5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
365.	5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
366.	5.1.05.04.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
367.	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.714.309.500,00	15.292.163.965,00	91,49
368.	5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.279.450.000,00	8.877.304.465,00	95,66
369.	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.662.300.000,00	7.276.022.300,00	94,95
370.	5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.617.150.000,00	1.601.282.165,00	99,01
371.	5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
372.	5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
373.	5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.300.000.000,00	4.730.000.000,00	89,24
374.	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.300.000.000,00	4.730.000.000,00	89,24
375.	5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.134.859.500,00	1.684.859.500,00	78,92
376.	5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.134.859.500,00	1.684.859.500,00	78,92
377.	5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	21.112.100.000,00	20.958.362.653,00	99,27
378.	5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.112.100.000,00	20.958.362.653,00	99,27
379.	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.112.100.000,00	20.958.362.653,00	99,27
380.	5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.906.948.000,00	1.906.948.000,00	100,00
381.	5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.906.948.000,00	1.906.948.000,00	100,00
382.	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.906.948.000,00	1.906.948.000,00	100,00
383.	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	628.950.000,00	558.500.000,00	88,79
384.	5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	502.950.000,00	432.500.000,00	85,99
385.	5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	502.950.000,00	432.500.000,00	85,99
386.	5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	502.950.000,00	432.500.000,00	85,99
387.	5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
388.	5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
389.	5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
390.	5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	116.000.000,00	116.000.000,00	100,00
391.	5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	116.000.000,00	116.000.000,00	100,00
392.	5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	116.000.000,00	116.000.000,00	100,00
393.		**JUMLAH BELANJA OPERASI**	**2.165.536.480.916,86**	**1.903.191.395.823,00**	**87,88**
394.					
395.	**5.2**	**BELANJA MODAL**	**314.047.380.220,20**	**291.290.325.913,00**	**92,75**
396.	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.986.181.550,00	58.911.262.046,00	95,03
397.	5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.683.990.996,00	1.370.307.929,00	81,37
398.	5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	83.500.000,00	83.016.900,00	99,42
399.	5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00
400.	5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	0,00	0,00	0,00
401.	5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	83.500.000,00	83.016.900,00	99,42
402.	5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.600.490.996,00	1.287.291.029,00	80,43
403.	5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.531.058.000,00	1.235.991.033,00	80,72

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
404.	5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	16.799.996,00	16.799.996,00	100,00
405.	5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	52.633.000,00	34.500.000,00	65,54
406.	5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.961.702.000,00	2.934.409.998,00	99,07
407.	5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.961.702.000,00	2.934.409.998,00	99,07
408.	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.002.400.000,00	1.999.399.997,00	99,85
409.	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
410.	5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	635.000.000,00	634.950.000,00	99,99
411.	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	99.302.000,00	91.680.000,00	92,32
412.	5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	225.000.000,00	208.380.001,00	92,61
413.	5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
414.	5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
415.	5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00
416.	5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00
417.	5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
418.	5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.536.600,00	10.516.800,00	99,81
419.	5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	10.536.600,00	10.516.800,00	99,81
420.	5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	10.536.600,00	10.516.800,00	99,81
421.	5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00
422.	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.407.600,00	1.407.600,00	100,00
423.	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.407.600,00	1.407.600,00	100,00
424.	5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.407.600,00	1.407.600,00	100,00
425.	5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
426.	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.391.507.585,00	27.207.450.216,00	95,82
427.	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.749.656.100,00	1.600.315.226,00	91,46
428.	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.004.100,00	27.925.380,00	99,71
429.	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.721.652.000,00	1.572.389.846,00	91,33
430.	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.800.690.485,00	24.783.047.569,00	96,05
431.	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	23.156.510.740,00	22.476.147.617,00	97,06
432.	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.469.200,00	8.000.000,00	94,45
433.	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	530.852.920,00	437.779.076,00	82,46
434.	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	57.828.900,00	21.290.000,00	36,81
435.	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.990.928.725,00	1.784.280.876,00	89,62
436.	5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	56.100.000,00	55.550.000,00	99,01
437.	5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	841.161.000,00	824.087.421,00	97,97
438.	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	22.032.000,00	18.248.400,00	82,82
439.	5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.353.000,00	9.712.500,00	93,81
440.	5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
441.	5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.752.000,00	7.326.000,00	94,50
442.	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	801.024.000,00	788.800.521,00	98,47
443.	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	236.064.000,00	232.538.600,00	98,50
444.	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	86.064.000,00	84.981.600,00	98,74
445.	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.264.000,00	3.196.800,00	97,94
446.	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	80.000.000,00	79.254.000,00	99,06
447.	5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.800.000,00	2.530.800,00	90,38
448.	5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	150.000.000,00	147.557.000,00	98,37
449.	5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	150.000.000,00	147.557.000,00	98,37
450.	5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
451.	5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00
452.	5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
453.	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.211.235.897,00	7.650.123.158,00	93,16
454.	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.385.697.597,00	5.935.741.268,00	92,95
455.	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.509.544.198,00	1.355.769.003,00	89,81
456.	5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.662.483.150,00	1.508.297.545,00	90,72
457.	5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	907.815.000,00	892.968.500,00	98,36
458.	5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	137.728.450,00	91.671.830,00	66,55
459.	5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
460.	5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00
461.	5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	283.544.000,00	258.700.000,00	91,23
462.	5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	607.501.620,00	587.501.000,00	96,70
463.	5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	0,00	0,00	0,00
464.	5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	209.493.060,00	201.000.000,00	95,94
465.	5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00
466.	5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	67.588.119,00	59.633.390,00	88,23
467.	5.2.02.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	0,00	0,00	0,00
468.	5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00
469.	5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.000.000.000,00	980.200.000,00	98,02
470.	5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.825.538.300,00	1.714.381.890,00	93,91
471.	5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.825.538.300,00	1.714.381.890,00	93,91
472.	5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	694.461.600,00	193.812.800,00	27,90
473.	5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	14.011.600,00	13.932.800,00	99,43
474.	5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	3.621.000,00	3.617.600,00	99,90
475.	5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	0,00	0,00
476.	5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	3.475.000,00	3.449.600,00	99,26
477.	5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	6.915.600,00	6.865.600,00	99,27
478.	5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	662.450.000,00	162.393.000,00	24,51
479.	5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	162.450.000,00	162.393.000,00	99,96
480.	5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	500.000.000,00	0,00	0,00
481.	5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	18.000.000,00	17.487.000,00	97,15
482.	5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	18.000.000,00	17.487.000,00	97,15
483.	5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
484.	5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	0,00
485.	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.987.639.055,00	6.461.277.482,00	92,46
486.	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.109.141.225,00	5.819.292.037,00	95,25
487.	5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
488.	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.770.756.986,00	4.558.920.620,00	95,55
489.	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.338.384.239,00	1.260.371.417,00	94,17
490.	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	878.497.830,00	641.985.445,00	73,07
491.	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	103.836.000,00	88.884.997,00	85,60
492.	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	33.554.030,00	33.172.500,00	98,86
493.	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	741.107.800,00	519.927.948,00	70,15
494.	5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.086.606.000,00	1.032.441.000,00	95,01
495.	5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	1.086.606.000,00	1.032.441.000,00	95,01
496.	5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.086.606.000,00	1.032.441.000,00	95,01
497.	5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	180.000.000,00	162.066.000,00	90,03
498.	5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	180.000.000,00	162.066.000,00	90,03
499.	5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00
500.	5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	180.000.000,00	162.066.000,00	90,03
501.	5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.570.000,00	0,00	0,00
502.	5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	3.570.000,00	0,00	0,00
503.	5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	3.570.000,00	0,00	0,00
504.	5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.772.060.000,00	1.768.361.276,00	99,79
505.	5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.772.060.000,00	1.768.361.276,00	99,79
506.	5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00
507.	5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.772.060.000,00	1.768.361.276,00	99,79
508.	5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	752.457.500,00	750.410.000,00	99,72
509.	5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	752.457.500,00	750.410.000,00	99,72
510.	5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	752.457.500,00	750.410.000,00	99,72
511.	5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
512.	5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
513.	5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
514.	5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	9.012.942.717,00	9.136.139.187,00	101,36
515.	5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	9.012.942.717,00	9.136.139.187,00	101,36
516.	5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	8.781.065.473,00	8.916.772.943,00	101,54
517.	5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	231.877.244,00	219.366.244,00	94,60
518.	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.202.143.081,00	68.257.309.278,00	93,24
519.	5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	69.361.143.081,00	66.117.233.278,00	95,32
520.	5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.361.143.081,00	66.117.233.278,00	95,32
521.	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	212.511.480,00	209.418.100,00	98,54
522.	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.278.771.052,00	12.486.110.508,00	87,44
523.	5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	199.873.650,00	99,93
524.	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.921.507.000,00	32.985.649.465,00	103,33
525.	5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	11.883.318.532,00	11.666.506.855,00	98,17
526.	5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00
527.	5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	167.372.369,00	166.535.800,00	99,50
528.	5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
529.	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	10.462.663.568,00	8.169.332.900,00	78,08
530.	5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
531.	5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	199.999.080,00	198.806.000,00	99,40
532.	5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.841.000.000,00	2.140.076.000,00	55,71
533.	5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.841.000.000,00	2.140.076.000,00	55,71
534.	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.841.000.000,00	2.140.076.000,00	55,71
535.	5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00
536.	5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
537.	5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
538.	5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
539.	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.572.222.566,20	135.455.575.766,00	89,96
540.	5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	119.058.016.380,20	109.194.987.459,00	91,71
541.	5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	119.058.016.380,20	109.194.987.459,00	91,71
542.	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	110.511.418.591,20	100.688.380.244,00	91,11
543.	5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	7.200.000.000,00	7.168.865.696,00	99,56
544.	5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.346.597.789,00	1.337.741.519,00	99,34
545.	5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	26.260.514.186,00	22.102.612.907,00	84,16
546.	5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	22.565.921.718,00	18.411.368.053,00	81,58
547.	5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	22.565.921.718,00	18.411.368.053,00	81,58
548.	5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.694.592.468,00	3.691.244.854,00	99,90
549.	5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.694.592.468,00	3.691.244.854,00	99,90
550.	5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.222.012.000,00	4.126.368.400,00	79,01
551.	5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.442.500.000,00	3.236.612.400,00	94,01
552.	5.2.04.03.01.0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	3.442.500.000,00	3.236.612.400,00	94,01
553.	5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.779.512.000,00	889.756.000,00	50,00
554.	5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.779.512.000,00	889.756.000,00	50,00
555.	5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00
556.	5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00
557.	5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	31.680.000,00	31.607.000,00	99,76
558.	5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	31.680.000,00	31.607.000,00	99,76
559.	5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	31.680.000,00	31.607.000,00	99,76
560.	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.848.333.023,00	28.424.703.823,00	102,06
561.	5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	601.634.024,00	584.246.363,00	97,10
562.	5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	601.634.024,00	584.246.363,00	97,10
563.	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	500.409.821,00	483.022.160,00	96,52
564.	5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	25.833.985,00	25.833.985,00	100,00
565.	5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00
566.	5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	10.721.268,00	10.721.268,00	100,00
567.	5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	30.388.914,00	30.388.914,00	100,00
568.	5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	34.280.036,00	34.280.036,00	100,00
569.	5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak	5.100.000,00	0,00	0,00

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
		Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
570.	5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00
571.	5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00
572.	5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	5.100.000,00	0,00	0,00
573.	5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	5.100.000,00	0,00	0,00
574.	5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
575.	5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
576.	5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00
577.	5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	27.241.598.999,00	27.840.457.460,00	102,19
578.	5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	27.241.598.999,00	27.840.457.460,00	102,19
579.	5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	25.746.309.475,00	26.309.163.112,00	102,18
580.	5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	1.495.289.524,00	1.531.294.348,00	102,40
581.	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	438.500.000,00	241.475.000,00	55,06
582.	5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	438.500.000,00	241.475.000,00	55,06
583.	5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	438.500.000,00	241.475.000,00	55,06
584.	5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	438.500.000,00	241.475.000,00	55,06
		JUMLAH BELANJA MODAL	**314.047.380.220,20**	**291.290.325.913,00**	**92,75**
585.	**5.3**	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**32.027.096.574,00**	**17.802.727.800,00**	**55,58**
586.	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.027.096.574,00	17.802.727.800,00	55,58
587.	5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.027.096.574,00	17.802.727.800,00	55,58
588.	5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.027.096.574,00	17.802.727.800,00	55,58
589.	5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	32.027.096.574,00	17.802.727.800,00	55,58
		JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**32.027.096.574,00**	**17.802.727.800,00**	**55,58**
590.	**5.4**	**BELANJA TRANSFER**	**499.727.874.066,00**	**431.226.583.403,00**	**86,29**
591.	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.971.574.266,00	10.659.992.569,00	97,16
592.	5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.971.574.266,00	10.659.992.569,00	97,16
593.	5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.971.574.266,00	10.659.992.569,00	97,16
594.	5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.971.574.266,00	10.659.992.569,00	97,16
595.	5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
596.	5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
597.	5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
598.	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	488.756.299.800,00	420.566.590.834,00	86,04
599.	5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000,00	0,00
600.	5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000,00	0,00
601.	5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000,00	0,00
602.	5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	488.756.299.800,00	420.066.590.834,00	85,94
603.	5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	155.995.781.800,00	155.866.103.686,00	99,91
604.	5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	155.995.781.800,00	155.866.103.686,00	99,91
605.	5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	332.760.518.000,00	264.200.487.148,00	79,39
606.	5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
607.	5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	332.760.518.000,00	264.200.487.148,00	79,39
		JUMLAH BELANJA TRANSFER	**499.727.874.066,00**	**431.226.583.403,00**	**86,29**
		JUMLAH BELANJA	**3.011.338.831.777,06**	**2.643.511.032.939,00**	**87,78**
		SURPLUS/DEFISIT	**(105.686.714.051,74)**	**159.067.511.007,24**	**(150,50)**
608.	**6**	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**105.686.714.051,74**	**105.686.714.051,45**	**99,99**

No	s	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI	Capaian
609.	**6.1**	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**113.186.714.051,74**	**113.186.714.051,45**	**99,99**
610.	6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.186.714.051,74	113.186.714.051,45	99,99
611.	6.1.01.05	Penghematan Belanja	113.186.714.051,74	0,00	0,00
612.	6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	113.186.714.051,74	0,00	0,00
613.	6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	113.186.714.051,74	0,00	0,00
614.	6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	93.946.614.850,33	0,00
615.	6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	93.946.614.850,33	0,00
616.	6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	93.946.614.850,33	0,00
617.	6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	19.240.099.201,12	0,00
618.	6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	1.759.322.567,80	0,00
619.	6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	1.759.322.567,80	0,00
620.	6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	681.861.814,00	0,00
621.	6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	681.861.814,00	0,00
622.	6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	6.198.076.101,32	0,00
623.	6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0,00	6.198.076.101,32	0,00
624.	6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	0,00	0,00
625.	6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00
626.	6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00
627.	6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	10.600.838.718,00	0,00
628.	6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	10.600.838.718,00	0,00
		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**113.186.714.051,74**	**113.186.714.051,45**	**99,99**
629.	**6.2**	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**100,00**
630.	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
631.	6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
632.	6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
633.	6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**7.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**100,00**
		PEMBIAYAAN NETTO	**105.686.714.051,74**	**105.686.714.051,45**	**99,99**
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**264.754.225.058,69**	**0,00**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana amanah Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran tahun 2025. Laporan Kinerja tahun 2025 Terdiri dari 4 Sasaran dan 9 Indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam target kinerja Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, secara umum Kabupaten Simalungun telah berusahan untuk mewujudkan capaian Sasaran Kinerja yang di maksud.

Pencapaian Sasaran Kinerja secara analisis pada indikator Sasaran berdasarkan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB terdapat keselarasan pada beberapa Indikator Sasaran dengan tujuan dan Sasaran, untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun telah di upayakan Langkah-angkah kebijakan dan strategi yang telah dilakukan. Secara keseluruhan dan secara umum capain Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun termasuk dalam Kategori Baik. Berikut adalah simpulan kinerja tahun 2025, yakni:

1. **Misi 1 : Benahi,**

   Sasaran: Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan.

   Indikator Kinerja : Penurunan Emisi GRK dengan target 173.083,31 TonCO2Eq dan Realisasi 84,10262588 TonCO2Eq dengan capaian 0,0005% dan dengan Interpretasi **Sangat Kurang.**

2. **Misi 2: Awasi**,

   Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

   Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 64,47 dan Realisasi sebesar 68,90 serta capaian sebesar 106% dengan Interpretarsi **Sangat Memuaskan**

3. **Misi 3: Dampingi**

   Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal

   Indikator Kinerja :

   a. Tingkat Kemiskinan dengan target 7,57% dan Realisasi 6,91% dan dengan capaian sebesar 109% serta interpretasi **Sangat Memuaskan**
   b. Gini Rasio dengan target Rasio 0,290 dan realisasi 0,230 serta dengan capaian 126% dan dengan Interpretasi **Sangat Memuaskan**
   c. PDRB Perkapita dengan target (Juta Rp) 58,3 dan dengan realisasi 60,17 serta dengan capaian 103% dan Interpretasi **Sangat Memuaskan**
   d. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,37% dan Realiasai sebesar 4,74% dengan capaian 91% serta dengan Interpretasi **Sangat Memuaskan**
   e. Kontribusi PDRB Kab/Kota dengan target 5,170% dengan realisasi 5,23% dan capaian sebesar 101% serta Interpretasi **Sangat Memuaskan**
   f. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 5,12% dan capaian 4,48% dan capaian sebesar 114% serta Interpretasi **Sangat Memuaskan**

4. Misi 4 : Solusi

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Simalungun

Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Manusia dengan target 76,35 dan realisasi 76,48 dengan capaian sebesar 100% serta Interpretasi **Sangat Memuaskan.**

Dari Uraian dan anaslisis serta evaluasi atas pencapaian 4 sasaran 9 Indikator sasaran, tersirat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan target yang di tetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan bertekad membangun sistem pertangung jawaban. Dari seluruh indikator sasaran dapat di rata-ratakan persentse capaian adalah sebesar 94,73% dengan nilai interpretasi rata-rata yakni **Sangat Memuskan**

4.2. Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah pelaksana kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan visi misinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga terwujudlah masyarakat yang memiliki Semangat Baru sesuai dengan Visi Kabupaten Simalungun yakni Bersama Semangat Baru Menuju Simalungun Maju yang juga selaras dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025-2029.

Harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja kedepan ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian sehingga pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah satunya dengan melakukan beberapa perubahan program kegiatan. Berbagai tantangan, hambatan serta keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang terlihat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 ini akan memacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Simalungun

untuk meraih hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang baik di tahun 2026 dan tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Simalungun disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Tahun 2025. Diharapkan laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dimasa yang akan datang.

Pamatang Raya, 14 April 2026

Bupati Simalungun,

Anton Achmad Saragih

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2025 (Berdasarkan RPJMD 2021-2026)
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2025 (Berdasarkan RPJMD 2025-2029)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 000.8.6.3/6/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H
Jabatan : Bupati Simalungun

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pamatang Raya, 19 Februari 2025

Bupati Simalungun,

Radiapoh Hasiholan Sinaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BUPATI SIMALUNGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.34
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.80
		LPE Kategori Industri Pengolahan	3.5
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.88
3.	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	5.4
4.	Menigkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7
		Indeks Gini	0.265
		Pendapatan Perkapita	56.01
5.	Menigkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.1
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.64
		Indeks Kesehatan	80.44
7.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	70.87
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.1
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	62.5
9.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Refromasi Birokrasi	64.17 (B)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	64.00 (B)
		Opini BPK	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Dearah	72.5
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	68.5
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	30.05
11.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	22.87
12.	Meningkatnya kulaitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	72.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

NO	URUSAN	ANGGARAN
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.397.842.820
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	180.618.100
3.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.000.000.000
4.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.745.528.568
5.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.180.895.919
6.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.491.450.172
7.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.939.647.984
8.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.750.050.951
9.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.536.393.425
10.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.920.047.242
11.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.528.252.755
12.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.197.325.126
13.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43.986.831.350
14.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.512.057.432
15.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66.687.500
16.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.000.000
17.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	78.960.000
18.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.934.174.044
19.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	443.593.176.120
20.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.476.739.378
21.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	252.934.391.702

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URUSAN	ANGGARAN
22.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	967.890.590.128
23.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.166.648.237
24.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.811.173.225
25.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.765.040.369
26.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6.974.281.463
27.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	16.247.282.500
28.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	7.222.700.680
29.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.598.865.063
30.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	108.450.756.582
31.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	606.532.719.654
32.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	788.927.758
33.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	269.999.700
34.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.707.198.977
35.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.460.034.773
36.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	58.969.078.582
37.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	63.351.756.124
38.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.352.468.345
39.	UNSUR KEWILAYAHAN	105.503.267.559
TOTAL		2.902.538.860.307

Pamatang Raya, 19 Februari 2025

Bupati Simalungun,

Radiapoh Hasiholan Sinaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI SIMALUNGUN
TAHUN 2025

Nomor : 000.8.6.3/7/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tranparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anton Achmad Saragih
Jabatan : Bupati Simalungun

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pamatang Raya, 17 November 2025
Bupati Simalungun,

Anton Achmad Saragih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI SIMALUNGUN TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025
1	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya		Tingkat Kemiskinan	%	7,57
2			Gini Rasio	Rasio	0,29
3		Terciptanya program-program pembangunan yang berbasis lingkungan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	173.083,31
4	Terwujudnya pemerintahan yang responsif dan solutif terhadap permasalahan masyarakat, dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,35
5		Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keterampilan praktis dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,12
6		Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi lokal	PDRB Perkapita	Juta Rp	58,3
7	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemandirian melalui pendampingan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37
8			Kontribusi PDRB Kab/Kota	%	5,17
9	Terwujudnya Pengawasan yang efektif terhadap pembangunan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,67

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANGGARAN URUSAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

NO	Urusan	Bidang Urusan	Anggaran
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.363.558.477,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	135.997.000,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.051.836.400,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	5.671.967.568,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	9.203.013.896,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	9.054.619.172,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	12.517.577.366,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	8.341.643.659,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.270.746.545,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.690.566.788,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.873.760.755,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	23.109.745.139,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	52.220.524.442,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.242.898.123,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	-
	Urusan Pemerintahan Wajib	Urusan Pemerintahan Bidang	64.800.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Urusan	Bidang Urusan	Anggaran
	Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Pertanahan	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	17.500.000,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3.559.006.436,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	465.475.088.695,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	38.394.457.474,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	248.456.392.128,39
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.003.048.951.502,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.182.883.217,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6.437.725.198,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2.582.915.369,00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	6.952.689.269,00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	16.452.812.900,00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	7.304.196.280,00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	66.316.305.797,80
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	111.274.645.215,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Keuangan	626.809.309.641,87
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Pendidikan Dan Pelatihan	3.381.144.328,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Penelitian Dan Pengembangan	309.069.100,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	6.378.004.628,00
5	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	17.550.215.104,00
6	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	61.217.955.401,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	Urusan	Bidang Urusan	Anggaran
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	60.946.151.124,00
7	Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.922.627.345,00
8	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	98.555.530.294,00
	Total		**3.011.338.831.777,06**

Pamatang Raya, 14 April 2026

Bupati Simalungun,

Anton Achmad Saragih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).